

# LAPORAN PEREKONOMIAN

## Provinsi Sumatera Selatan



MEI 2026

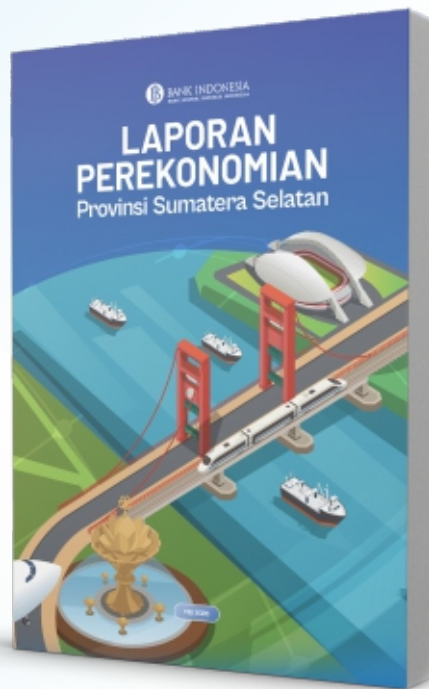


# LAPORAN PEREKONOMIAN

## Provinsi Sumatera Selatan

“Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi  
Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”

MEI 2026



Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Selatan-Mei-2026.aspx>

Salinan Publikasi ini dapat diperoleh dengan menghubungi :

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan**

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang

Telp : 0711 - 354188 ext 8246

Faks : 0711 – 312013

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun “Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi Mei 2026” ini tepat pada waktunya. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Sumatera Selatan.

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh tetap kuat sebesar 5,34% (yoy), sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,54% (yoy). Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 5,13% (yoy) namun lebih rendah dari Nasional yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Tetap tumbuhnya ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 disumbang utamanya oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah didorong oleh percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Selatan pada triwulan I 2026. Dari sisi inflasi, realisasi inflasi pada triwulan I 2026 tercatat 3,09% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,91% (yoy). Tekanan inflasi didorong oleh tekanan harga emas perhiasan serta berbagai produk hortikultura akibat permintaan masyarakat yang kuat di tengah gangguan cuaca yang mengganggu pasokan di daerah sentra.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini melalui kontribusi data dan informasi, baik melalui forum diskusi maupun media lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik, perbankan, akademisi, asosiasi, serta pemangku kebijakan lainnya. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa mendatang. Kami juga menyadari bahwa Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga masukan berupa saran, kritik, dan dukungan informasi maupun data dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan ini ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Akhir kata, kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi Mei 2026 ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Palembang, Mei 2026  
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Bambang Pramono**  
Direktur

# Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Visi dan Misi Bank Indonesia	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	x
Indikator Utama	xiii
Ringkasan Umum	xv
	xvii
	xx

## 01 Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1. Perkembangan Ekonomi Secara Umum	2
1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	2
1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah	3
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi	5
1.2.3. Ekspor Luar Negeri	6
1.2.4. Impor Luar Negeri	8
1.3. Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	10
1.3.1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	11
1.3.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	12
1.3.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi	14
Boks 1: <i>The 3rd Sriwijaya Economic Forum: Policy Talks</i>	15
Boks 2: LIKE IT 2026 Series #1: Dari Literasi Menuju Investasi	17

## 02 Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Inflasi Secara Umum	22
2.2. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	23
2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	23
2.2.2. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	23
2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	24
2.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	24
2.2.5. Kelompok Kesehatan	24
2.2.6. Kelompok Transportasi	24
2.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	25
2.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	25
2.2.9. Kelompok Pendidikan	25
2.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	25
2.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	26
2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan dan <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan II 2026	26
2.4. Analisis Inflasi Spasial	28
2.4.1. Kota Palembang	28
2.4.2. Kota Lubuklinggau	29
2.4.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	30
2.4.4. Kabupaten Muara Enim	31
2.5. Upaya Pengendalian Inflasi	32
Boks 3: Inkubi Sultan Muda 2026: Kolaborasi Strategis Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mendorong UMKM Go Digital	36
Boks 4: Memperkuat Ekosistem Digital Daerah: Sinergi TP2DD Sumatera Selatan dan SIGUNTANG	38

## 03 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3.1. Kondisi Umum Sumatera Selatan	44
3.2. Pembiayaan Daerah	45
3.2.1. Perkembangan Pembiayaan Korporasi	45
3.2.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	47
3.3. Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM	48

## 04

### Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah	54
4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai	54
4.2.1. Transaksi SKNBI dan BI-RTGS	54
4.2.2. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	55
4.3. Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce	57
4.4. Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	61
Boks 3: <i>Launching Task Force</i> Percepatan Investasi Sumatera Selatan	64

Lampiran	90
Daftar Istilah	102

## 05

### Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

5.1. Kondisi Ketenagakerjaan	68
5.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	68
5.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68
5.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	68
5.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	69
5.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan	69
5.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	69
5.1.7. Survei Konsumen	70
5.2. Kondisi Kesejahteraan	70
5.3. Kemiskinan	71
5.3.1. Perubahan Garis Kemiskinan	72
5.3.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	73
5.3.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk	73

## 06

### Prospek Perekonomian Daerah

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026	78
6.2. Prospek Makroekonomi Keseluruhan Tahun 2026	80
6.3. Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026	82
6.4. Rekomendasi	83

# Daftar Grafik

## 01

### Perkembangan Ekonomi Daerah

Grafik 1.1.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.2.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.3.	Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)	4
Grafik 1.4.	Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan	4
Grafik 1.5.	Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan	5
Grafik 1.6.	Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan	5
Grafik 1.7.	Volume Penjualan Semen di Sumatera Selatan	6
Grafik 1.8.	Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan	6
Grafik 1.9.	Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan	6
Grafik 1.10.	Nilai Impor Barang Konsumsi Sumatera Selatan	6
Grafik 1.11.	Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan	7
Grafik 1.12.	Perkembangan Harga Komoditas Internasional	7
Grafik 1.13.	Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan	7
Grafik 1.14.	Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan	7
Grafik 1.15.	Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan	7
Grafik 1.16.	Perkembangan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan	7
Grafik 1.17.	Perkembangan Nilai Ekspor Pulp & Paper Sumatera Selatan	8
Grafik 1.18.	Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan	8
Grafik 1.19.	Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor	8
Grafik 1.20.	Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor	8
Grafik 1.21.	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan	9
Grafik 1.22.	Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan	9
Grafik 1.23.	Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	9

Grafik 1.24.	Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	9
Grafik 1.25.	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalan Sumatera Selatan	12
Grafik 1.26.	Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
Grafik 1.27.	Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan	13
Grafik 1.28.	Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan	13
Grafik 1.29.	Penyaluran Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
Grafik 1.30.	Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan	14
Grafik 1.31.	Realisasi Penjualan Semen di Sumatera Selatan	14

## 02

### Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional	23
Grafik 2.2.	Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan I 2026	23
Grafik 2.3.	Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi	28

## 03

### Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Grafik 3.1.	Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan	44
Grafik 3.2.	Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	44
Grafik 3.3.	Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank	44

<b>Grafik 3.4.</b> Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	<b>46</b>	<b>Grafik 4.4.</b> Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan	<b>55</b>
<b>Grafik 3.5.</b> Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	<b>46</b>	<b>Grafik 4.5.</b> Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan	<b>55</b>
<b>Grafik 3.6.</b> Likert Scale Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan	<b>46</b>	<b>Grafik 4.6.</b> Nilai Nominal Transaksi Kartu ATM/D	<b>56</b>
<b>Grafik 3.7.</b> Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi	<b>46</b>	<b>Grafik 4.7.</b> Volume Transaksi Kartu ATM/D	<b>56</b>
<b>Grafik 3.8.</b> NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan	<b>47</b>	<b>Grafik 4.8.</b> Pangsa Transaksi ATM/D	<b>56</b>
<b>Grafik 3.9.</b> Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan	<b>47</b>	<b>Grafik 4.9.</b> Jumlah Kartu ATM/D	<b>56</b>
<b>Grafik 3.10.</b> Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	<b>47</b>	<b>Grafik 4.10.</b> Nominal Transaksi Kartu Kredit	<b>57</b>
<b>Grafik 3.11.</b> Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan	<b>48</b>	<b>Grafik 4.11.</b> Volume Transaksi Kartu Kredit	<b>57</b>
<b>Grafik 3.12.</b> Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	<b>48</b>	<b>Grafik 4.12.</b> Pangsa Transaksi Kartu Kredit	<b>57</b>
<b>Grafik 3.13.</b> NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan	<b>48</b>	<b>Grafik 4.13.</b> Jumlah Kartu Kredit	<b>57</b>
<b>Grafik 3.14.</b> Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp Triliun)	<b>49</b>	<b>Grafik 4.14.</b> Jumlah UE	<b>58</b>
<b>Grafik 3.15.</b> Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)	<b>49</b>	<b>Grafik 4.15.</b> Jumlah UE reader	<b>58</b>
<b>Grafik 3.16.</b> Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM	<b>49</b>	<b>Grafik 4.16.</b> Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal	<b>59</b>
<b>Grafik 3.17.</b> Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	<b>50</b>	<b>Grafik 4.17.</b> Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume	<b>59</b>
<b>Grafik 3.18.</b> Pertumbuhan Sektoral Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan I 2026	<b>50</b>	<b>Grafik 4.18.</b> Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	<b>59</b>
<b>Grafik 3.19.</b> Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan	<b>50</b>	<b>Grafik 4.19.</b> Persebaran <i>Merchant</i> QRIS	<b>59</b>
<b>Grafik 3.20.</b> Perkembangan NPL Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	<b>50</b>	<b>Grafik 4.20.</b> Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	<b>60</b>
		<b>Grafik 4.21.</b> Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako	<b>60</b>
		<b>Grafik 4.22.</b> Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako	<b>60</b>
		<b>Grafik 4.23.</b> Nominal transaksi <i>E-commerce</i>	<b>61</b>
		<b>Grafik 4.24.</b> Frekuensi transaksi <i>E-commerce</i>	<b>61</b>
		<b>Grafik 4.25.</b> Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan	<b>61</b>
		<b>Grafik 4.26.</b> Transfer Dana Domestik- <i>Incoming</i>	<b>62</b>
		<b>Grafik 4.27.</b> Transfer Dana Luar Negeri- <i>incoming</i>	<b>62</b>
		<b>Grafik 4.28.</b> Transfer Dana Domestik- <i>Outgoing</i>	<b>62</b>
		<b>Grafik 4.29.</b> Transfer Dana Luar Negeri- <i>Outgoing</i>	<b>62</b>

## 04

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

<b>Grafik 4.1.</b> Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan	<b>54</b>	<b>Grafik 5.1.</b> Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2024-2026	<b>68</b>
<b>Grafik 4.2.</b> Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan	<b>54</b>	<b>Grafik 5.2.</b> Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2024-2026 (dalam %)	<b>68</b>
<b>Grafik 4.3.</b> Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan	<b>54</b>	<b>Grafik 5.3.</b> Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)	<b>69</b>
		<b>Grafik 5.4.</b> Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	<b>69</b>

## 05

## Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

Grafik 5.5.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama	69
Grafik 5.6.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2024-2025 (dalam %)	70
Grafik 5.7.	Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	70
Grafik 5.8.	Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu	70
Grafik 5.9.	Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang dibayar dan Nilai Tukar Petani	70
Grafik 5.10.	Nilai Tukar Petani Per Subsektor	71
Grafik 5.11.	Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan	71
Grafik 5.12.	Perkembangan Penduduk Miskin	72
Grafik 5.13.	Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional	73
Grafik 5.14.	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk	73
Grafik 5.15.	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan	73
Grafik 5.16.	Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan	73

# Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2024-2026 (%yoy)	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)	3
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)	3
Tabel 1.4.	Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)	9
Tabel 1.5.	Laju Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)	10
Tabel 1.6.	Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)	11
Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 2.2.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026	22
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	23
Tabel 2.4.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Khaki	23
Tabel 2.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	24
Tabel 2.6.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	24
Tabel 2.7.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan	24
Tabel 2.8.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi	25
Tabel 2.9.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	25
Tabel 2.10.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	25
Tabel 2.11.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan	25
Tabel 2.12.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	26
Tabel 2.13.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	26
Tabel 2.14.	Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	29
Tabel 2.15.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kota Palembang	29
Tabel 2.16.	Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	30
Tabel 2.17.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kota Lubuklinggau	30
Tabel 2.18.	Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	31
Tabel 2.19.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kab. OKI	31
Tabel 2.20.	Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	32
Tabel 2.21.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kab. Muara Enim	32
Tabel 3.1.	Perkembangan Pertumbuhan DPK di Sumatera Selatan	45
Tabel 4.1.	Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel 4.2.	Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan	58
Tabel 5.1.	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan I 2026	71
Tabel 5.2.	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan I 2026	71
Tabel 5.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	72
Tabel 5.4.	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan	73
Tabel 5.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan	73
		79
Tabel 6.1.	<i>Global Economic Outlook</i>	80
Tabel 6.2.	Volume Perdagangan Internasional	

# Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan	26
Gambar 2.2.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Januari 2026	27
Gambar 2.3.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Februari 2026	27
Gambar 2.4.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Maret 2026	27
Gambar 2.5.	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada April 2026	28



# Indikator Utama

## A. PDRB & INFLASI

Indikator	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
MAKRO											
Indeks Harga Konsumen											
Sumatera Selatan	105,93	106,42	105,78	107,01	107,01	107,81	109,02	109,42	110,12	110,12	111,14
Palembang	105,71	106,15	105,39	106,33	106,33	107,11	108,42	108,85	109,43	109,43	110,43
Lubuk Linggau	104,81	105,23	104,59	105,49	105,49	106,15	107,41	108,00	108,52	108,52	109,28
Ogan Komering Ilir	107,00	107,77	106,98	108,80	108,80	110,11	111,14	111,11	111,96	111,96	113,13
Muara Enim	106,24	106,77	106,93	109,08	109,08	109,46	110,30	111,00	112,22	112,22	113,28
Laju Inflasi Tahunan (yoy)											
Sumatera Selatan	3,24	2,48	1,40	1,20	1,20	1,77	2,44	3,44	2,91	2,91	3,09
Palembang	2,90	2,64	1,41	1,24	1,24	1,32	2,14	3,28	2,92	2,92	3,10
Lubuk Linggau	2,36	2,16	1,11	1,02	1,02	1,28	2,07	3,26	2,87	2,87	2,95
Ogan Komering Ilir	4,56	2,27	1,72	1,48	1,48	2,91	3,13	3,86	2,90	2,90	2,74
Muara Enim	3,76	2,17	1,08	0,74	0,74	3,03	3,31	3,81	2,88	2,88	3,49

Indikator	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
Pertumbuhan Tahunan PDRB Sektoral (yoy)											
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	3,29	2,58	2,39	2,59	5,15	2,17	7,79	7,24	5,60	3,58
Pertambangan dan Penggalian	4,19	0,97	3,52	4,71	3,33	3,98	5,93	0,61	3,97	3,47	-0,16
Industri Pengolahan	4,70	4,89	4,09	3,91	4,39	3,58	5,58	5,13	3,94	4,67	7,04
Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,06	5,76	6,88	4,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,52	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15	4,25
Konstruksi	6,89	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,09	4,96	6,03	5,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,72	7,71	7,33	7,88	7,42	8,36	8,78	8,58	8,48	8,47	9,85
Transportasi dan Pergudangan	2,77	3,80	3,90	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03	4,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66	12,32
Informasi dan Komunikasi	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10	8,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,19	8,09	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94	11,19	4,45	6,23
Real Estate	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79	8,54
Jasa Perusahaan	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11	7,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02	4,47	3,40	6,59
Jasa Pendidikan	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28	9,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79	6,86
Jasa lainnya	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11	3,67
Pertumbuhan Tahunan PDRB Penggunaan (yoy)											
Konsumsi Rumah Tangga	4,15	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89	4,90	4,91	4,97
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13	3,79	3,77	3,12
Konsumsi Pemerintah	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,90	-3,98	3,65	3,15	1,01	14,15
Investasi	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,65	3,05	0,08	2,77	4,20
Ekspor Luar Negeri	-18,72	-9,59	16,10	2,54	0,15	25,02	1,25	-2,49	-15,28	-0,56	-21,63
Impor Luar Negeri	183,00	91,28	42,30	1,42	46,90	-49,97	-2,15	-7,65	-21,25	-5,62	-25,49

**B. Ekspor-Import**

Ekspor Import	2024		2025					2026
	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
Nilai ekspor nonmigas (USD Juta)	1.848,55	6.262,31	1.665,19	1.343,19	1.529,60	1.413,44	5.951,43	1.114,66
Nilai impor nonmigas (USD Juta)	383,60	2.068,72	258,42	253,04	259,82	304,31	1.075,58	304,14
Volume ekspor nonmigas (juta kg)	17022,05	37.837,49	14.646,53	11.362,63	14.356,43	14.032,43	54.398,02	7.553,03
Volume impor nonmigas (juta kg)	510,25	2.004,60	553,14	452,89	459,84	374,32	1.840,19	274,19

### C. Perbankan

Indikator	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Perbankan									
Total Aset (Rp Triliun)	139,00	147,13	156,39	156,50	156,50	155,83	157,09	165,26	166,22
DPK (Rp Triliun)	102,42	106,55	109,65	108,65	108,65	109,49	110,85	116,50	119,46
- Giro	19,4	19,4	21,6	17,3	17,3	19,2	19,3	20,5	25,7
- Tabungan	53,2	55,1	56,5	60,3	60,3	58,9	58,9	64,8	63,8
- Deposito	29,8	32,1	31,5	31,1	31,1	31,4	32,6	31,2	29,9
Jumlah Rekening DPK (Ribu)	12.979	13.256	13.289	13.508	13.508	13.556	13.546	14.319	13.808
- Giro	120	121	124	121	121	121	121	126	126
- Tabungan	12.773	13.049	13.080	13.301	13.301	13.350	13.340	14.113	13.603
- Deposito	86	86	86	85	85	85	85	81	79
Kredit Berdasarkan Penggunaan (Rp Triliun)	163,55	167,37	170,57	174,25	174,25	175,50	177,79	191,36	197,13
- Modal Kerja	66,09	67,11	69,05	72,27	68,85	69,84	71,36	69,70	74,19
- Investasi	46,99	48,31	47,87	48,70	50,09	50,16	50,42	60,77	61,08
- Konsumsi	50,47	51,95	53,65	54,95	55,31	55,49	56,00	60,89	61,85
Total Kredit (Rp Triliun)	163,55	167,37	170,57	175,92	174,25	175,50	177,79	191,36	197,13
Kredit Lapangan Usaha/Korporasi (RpTriliun)	113,08	115,42	116,93	118,94	118,94	120,01	121,78	130,48	135,27
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	28,39	29,22	28,34	28,36	28,36	28,33	28,34	29,51	29,23
Pertambangan dan Penggalian	11,09	11,04	13,18	12,76	12,76	12,73	12,93	12,46	13,09
Industri Pengolahan	32,68	34,04	34,41	35,78	35,78	36,95	38,44	47,80	52,21
Listrik, Gas dan Air Bersih	3,26	33,50	3,03	3,33	3,33	3,34	3,39	3,00	3,01
Konstruksi	5,99	58,24	5,57	5,50	5,50	5,39	5,37	5,20	4,96
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	22,14	21,98	21,94	21,99	21,99	22,07	21,98	21,32	21,56
Transportasi dan Pergudangan dan Komunikasi	2,12	2,21	2,21	2,33	2,33	2,38	2,12	2,93	2,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	2,09	2,13	2,14	2,14	2,12	2,47	2,14	2,17
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,85	2,92	2,80	2,98	2,98	2,95	0,56	3,07	3,08
Jasa-jasa	2,56	2,74	2,86	2,90	2,90	2,89	3,00	2,63	2,73
Kredit Bukan Lapangan Usaha/Kredit Konsumsi (RpTriliun)	50,47	51,95	53,65	55,31	55,31	55,49	56,00	60,89	61,85
Rumah Tinggal	14,69	16,06	16,36	16,61	16,61	16,79	16,98	18,51	18,87
Flat dan Apartemen	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16	0,16
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	1,26	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,42	0,41
Kendaraan Bermotor	3,72	3,81	4,04	4,13	4,13	4,14	4,20	3,96	4,00
Multiguna	18,30	18,58	18,94	19,38	19,38	19,35	19,47	20,88	20,36
Lainnya	30,68	31,50	13,74	14,61	14,61	14,64	14,77	16,95	18,06
LDR	158,4%	157,8%	156,7%	153,5%	158,1%	156,9%	154,2%	151,0%	1,5%
NPL Gross	2,66%	2,59%	1,86%	1,86%	1,87%	1,89%	1,89%	1,87%	1,94%

(sumber: Bank Indonesia)

**D. Sistem Pembayaran**

Keterangan	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Jumlah hari	58	52	65	63	58	60	64	64	56
1. Perputaran Kliring									
a.Nominal (Rp Miliar)	8.021	7.825	8.442	9.265	6.979	6.890	7.828	8.576	6.685
b.Warkat (lembar)	148.544	145.396	162.078	164.598	131.082	126.327	148.910	170.884	109.469
2. Rata-rata Harian Kliring									
a.Nominal (Rp Miliar)	138,3	150,5	129,8	147,1	120,3	114,8	122,3	134,0	119,4
b.Jumlah Warkat (lembar)	2.561	2.796	2.494	2.613	2.260	2.105	2.327	2.670	1.955
3. Rata-rata Harian RTGS									
a.Nominal/Hari (Rp Miliar)	589,7	901,0	759,2	1.019,6	877	780	652	634	408
b.Jumlah Warkat (lembar)	266	299	264	307	264	13.982	16.726	19.005	14.358
4. Penolakan Cek/BG									
a.Nominal (Rp Miliar)	55,2	49,0	50,5	55,1	46,9	51,6	50,6	51,0	50,5
b.Warkat (lembar)	997	943	926	876	802	977	908	912	901
5. Penolakan Cek/BG									
a.Nominal (%)	0,69%	0,63%	0,60%	0,59%	0,67%	0,75%	0,65%	0,59%	0,76%
b.Warkat (%)	0,67%	0,65%	0,57%	0,53%	0,61%	0,77%	0,61%	0,53%	0,82%
6. Mutasi kas (Rp Miliar)									
Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	975,8	445,2	99,6	57,8	61,8	198,5	1.667,3	570,5	552,3
a.Aliran uang masuk/inflow	3.901,4	4.374,2	2.368,1	1.729,2	2.901,3	4.200,8	2.157,8	1.224,5	4.430,1
b.Aliran uang keluar (outflow)	4.996,8	6.189,2	4.284,1	6.398,2	5.756,4	3.057,8	4.843,2	4.582,8	5.234,2
c.Net Inflow (outflow)	(1.095,4)	(1.815,0)	(1.916,0)	(4.669,0)	(2.855,1)	1.143,0	(2.685,4)	(3.358,3)	(804,1)

(sumber: Bank Indonesia)

# Ringkasan Eksekutif

Mei 2026



## Perkembangan Ekonomi Daerah



**Ekonomi Sumatera Selatan tetap tumbuh kuat pada triwulan I 2026 sebesar 5,34% (yoy) yang didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah.** Kinerja positif tersebut didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah yang didorong oleh percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Selatan pada triwulan I 2026. Jika dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 5,13% (yoy) namun lebih rendah dari Nasional yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Sementara itu, pangsa ekonomi Sumatera Selatan terhadap ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tercatat 13,60%.

Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I 2026 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari konsumsi pemerintah. Kinerja positif tersebut didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah didorong oleh percepatan belanja APBD, khususnya pada komponen belanja operasi dan belanja transfer. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 bersumber dari komponen LU Akomodasi dan Makan Minum. Sementara LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

## Perkembangan Inflasi Daerah



**Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat meningkat pada triwulan I 2026 sejalan dengan dorongan konsumsi masyarakat pada momentum HBKN Imlek dan Idulfitri.** Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,09% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,91% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 didorong utamanya oleh tekanan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global. Selain itu, tekanan inflasi juga didorong oleh berbagai produk bahan pangan pokok dan hortikultura (cabai merah dan beras) serta akibat permintaan masyarakat yang meningkat di tengah momen ramadhan dan perayaan idul fitri. Tekanan inflasi pada Triwulan II 2026 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat setelah periode puncak permintaan pada Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

## Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian yang mendorong sikap *wait and see* oleh masyarakat dan pelaku usaha. Hal direfleksikan melalui pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan. Di lain sisi, pertumbuhan kinerja intermediasi turut disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga. Kinerja pertumbuhan aset perbankan pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 6,12% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,60% (yoy). Kinerja aset perbankan disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 7,45% (yoy). Berdasarkan golongan debitur, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh 9,73% (yoy) dan penyaluran kredit korporasi tumbuh 11,05% (yoy). Di lain sisi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 5,98% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 10,05% (yoy). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro (28,89% (yoy)) dan Tabungan (5,47% (yoy)) serta ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-3,69% (yoy)). Sejalan dengan penyaluran kredit secara umum, kredit UMKM triwulan I 2026 tetap mencatatkan kinerja positif dicatatkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 1,99% (yoy) sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 6,71% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar terkontraksi sebesar -1,12% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui instrumen tunai maupun nontunai terus memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026. Peredaran uang kartal pada triwulan I 2026 menunjukkan *net outflow* yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat dikarenakan data historis dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yaitu Hari Raya Idul Fitri. Data pada triwulan laporan mencatatkan peredaran uang kartal di Sumatera Selatan mengalami *net outflow* sebesar Rp. 804 miliar. Realisasi *net outflow* tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp3,35 triliun seiring dengan adanya normalisasi berupa arus balik uang kartal pasca momen Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dari sisi nontunai, kinerja transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Triwulan I 2026 masih mengalami perlambatan secara tahunan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Secara nominal, nilai transaksi perputaran kliring tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau terkontraksi 10,33% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada Triwulan IV 2025 sebesar 7,44% (yoy). Dari sisi volume, jumlah warkat tercatat sebanyak 109,47 ribu warkat atau terkontraksi 16,49% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan masih terbatasnya perbaikan aktivitas transaksi melalui SKNBI, seiring dengan berlanjutnya pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha menuju instrumen pembayaran digital non-kliring, khususnya BI-FAST dan QRIS.

Di sisi lain, akselerasi digitalisasi pembayaran terus berlanjut. Pertumbuhan positif pada nominal transaksi Uang Elektronik (UE) dan e-commerce, mencerminkan tingginya preferensi masyarakat Sumatera Selatan terhadap instrumen pembayaran digital. Perkembangan tersebut turut diperkuat oleh semakin luasnya akseptansi QRIS di berbagai sektor ekonomi.

## Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah



**Pada triwulan I 2026, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik.** Hal ini tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Selatan pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,59%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,89%. Di sisi lain, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan pendapatan masyarakat saat ini lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu dan tetap optimis akan meningkat ke depan. Peningkatan optimisme dan aktivitas ekonomi tersebut turut berdampak pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

## Prospek Perekonomian Daerah



**Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2026, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Ke depan, inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$ , mempertahankan capaian di tahun 2025. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.





# 01

## Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh tetap kuat pada triwulan I 2026 dengan realisasi sebesar 5,34% (yoy), didukung oleh percepatan realisasi belanja pemerintah serta terjaganya daya beli masyarakat pada periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri.

- Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I 2026 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari konsumsi pemerintah. Kinerja positif tersebut didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah didorong oleh percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Selatan pada triwulan I 2026.
- Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 bersumber dari komponen LU Akomodasi dan Makan Minum. Sementara LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

## 1.1. Perkembangan Ekonomi Secara Umum

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy), menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,54% (yoy) (Grafik 1-1). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antar triwulan pada triwulan I 2026 juga tercatat mengalami peningkatan meskipun masih terkontraksi sebesar 0,02% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,53% (qtq) (Grafik 1-2). Jika dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 5,13% (yoy) namun lebih rendah dari Nasional yang tercatat sebesar 5,61% (yoy). Sementara itu, pangsa ekonomi Sumatera Selatan terhadap ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tercatat 13,60%.

**Tetap tingginya kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.** Kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 14,15% (yoy), atau tumbuh signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,15% (yoy). Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan I 2026 utamanya didorong oleh percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Selatan. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 4,97% (yoy), atau tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Kinerja konsumsi rumah tangga secara tahunan yang tumbuh lebih baik pada triwulan laporan utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri seiring dengan dorongan mobilisasi oleh pemerintah melalui pemberian insentif tarif transportasi dan operasional pesawat rute internasional yang semakin banyak mendukung adanya lonjakan wisatawan mancanegara pada triwulan I 2026.

**Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan didorong oleh**

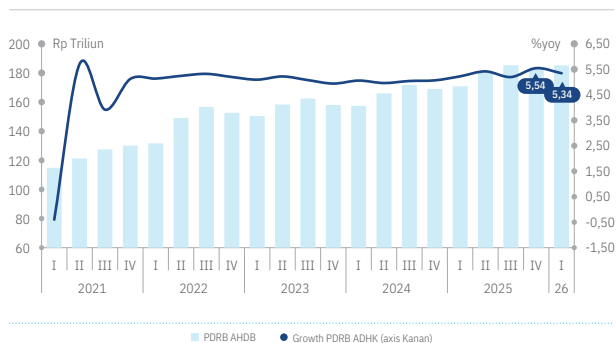
**peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan.** Akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan utamanya bersumber dari Industri Non Migas, diantaranya Industri Makanan dan Minuman serta Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Adapun kinerja subsektor industri makanan dan minuman didorong oleh faktor meningkatnya produksi kelapa sawit di tengah dukungan adanya peningkatan permintaan dari mitra dagang utama. Selanjutnya, pada subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik, terdapat perbaikan harga pada triwulan I 2026

**Di sisi lain, LU Industri Pertambangan dan Penggalian serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penahan kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026.** Perlambatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh penurunan tingkat produksi batu bara akibat adanya penyesuaian regulasi di tengah adanya dukungan perbaikan harga. Selanjutnya, terbatasnya kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan.

## 1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

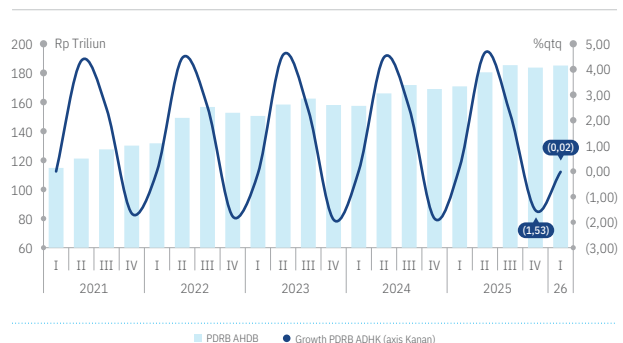
**Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, struktur perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 didominasi oleh konsumsi rumah tangga.** Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pangsa sebesar 61,72% terhadap total PDRB. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 2,95% (yoy) (Tabel 1-1). Perkembangan ini tercatat meningkat dibandingkan andil pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,90% (yoy). Selanjutnya, PMTB atau investasi pada triwulan I 2026 dengan pangsa terbesar kedua yaitu sebesar 30,09% terhadap PDRB Sumatera Selatan memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,27% (yoy). Sementara, kinerja ekspor barang dan jasa dengan pangsa sebesar 18,11% dan memberikan andil pertumbuhan yang terkontraksi sebesar 7,90% (yoy).

**Grafik 1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 1.2. PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Tabel 1.1. Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2024-2026 (%yoy)**

Komponen Pengeluaran	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,52	2,83	2,73	2,93	2,75	2,92	2,91	2,79	2,90	2,88	2,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,50	1,20	1,38	1,34	1,35	0,69	1,69	0,98	0,03	0,85	1,27
Ekspor Luar Negeri	(5,48)	(2,75)	4,11	3,92	0,04	5,86	(0,82)	(2,34)	(6,11)	(1,09)	(7,90)
Lainnya	6,52	3,68	(3,18)	(3,12)	0,89	(4,25)	1,68	3,77	8,72	2,71	1,12
PDRB	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

### 1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

Pada triwulan I 2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,97% (yoy), atau tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy) (Tabel 1-2). Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga secara triwulanan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,66% (qtq) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,79% (qtq). (Tabel 1-3). Kinerja konsumsi rumah tangga secara tahunan yang tumbuh lebih baik pada triwulan laporan utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri seiring dengan pemberian insentif tarif

transportasi dan operasional rute penerbangan internasional yang semakin banyak. Kemudian, berlanjutnya penguatan konsumsi rumah tangga didorong oleh penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berlanjut pada tahun 2025. Penyaluran berbagai subsidi tersebut menjadi *social shock absorbers* yang disalurkan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

**Kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap kuat terkonfirmasi dari hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia.** Hal tersebut tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang terjaga berada di atas level optimis (>100) sebesar

**Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)**

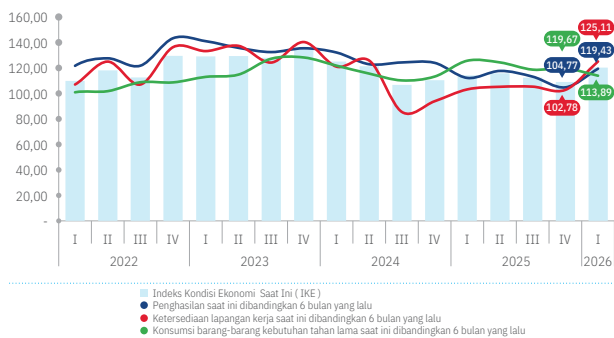
Komponen Pengeluaran	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,19	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89	4,90	4,91	4,97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13	3,79	3,77	3,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,30	(5,91)	3,44	3,15	1,01	14,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,66	3,29	0,08	2,77	4,20
Ekspor Luar Negeri	(18,72)	(9,59)	0,84	14,18	0,15	17,65	1,11	(2,23)	(15,28)	(0,56)	(21,63)
Impor Luar Negeri	183,00	91,28	42,83	(18,54)	46,90	14,15	(2,74)	(7,10)	(21,25)	(5,62)	(25,49)
PDRB	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)**

Komponen Pengeluaran	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,63	3,42	(0,92)	1,77	0,59	3,44	(0,96)	1,79	0,66
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,50	2,78	(7,46)	2,03	4,92	5,97	(7,34)	0,73	4,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(39,35)	32,73	(8,56)	42,62	(39,28)	18,82	0,36	42,22	(32,83)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(2,67)	0,12	2,17	4,66	(4,54)	3,50	(0,12)	1,41	(0,61)
Ekspor Luar Negeri	(15,72)	9,95	7,25	9,58	(5,54)	(8,92)	3,59	(5,04)	(12,56)
Impor Luar Negeri	14,85	(18,70)	(2,76)	36,90	(17,25)	(11,71)	(7,29)	16,05	(21,64)
PDRB	0,02	4,47	2,47	(1,85)	0,16	4,65	2,25	(1,53)	(0,02)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 1.3. Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)**

Sumber : Bank Indonesia, diolah

120,33. Kondisi tersebut juga tercermin pada 2 (dua) indikator penyusun IKE, yakni indeks penghasilan saat ini dan indeks ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing tercatat sebesar 119,43 dan 125,11 (Grafik1-3).

#### Dukungan pada kinerja konsumsi rumah tangga tetap terjaga, meskipun penyaluran kredit rumah tinggal dan flat/apartemen sedikit melandai pada triwulan laporan.

Adapun penyaluran kredit rumah tinggal yang disalurkan perbankan di Wilayah Sumatera Selatan tercatat tumbuh sebesar 9,92% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,40% (yoy). Selanjutnya, penyesuaian juga terjadi pada penyaluran kredit flat/apartemen. Kredit tersebut tercatat tumbuh sebesar 11,74% (yoy) pada triwulan I 2026 atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,19%. Adanya sedikit tren penurunan kinerja penyaluran kredit rumah tinggal dan flat/apartemen tersebut terjadi di tengah adanya normalisasi atas higher based effect yang terjadi pada triwulan I 2025, dimana program 3 juta rumah dimulai secara masif oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

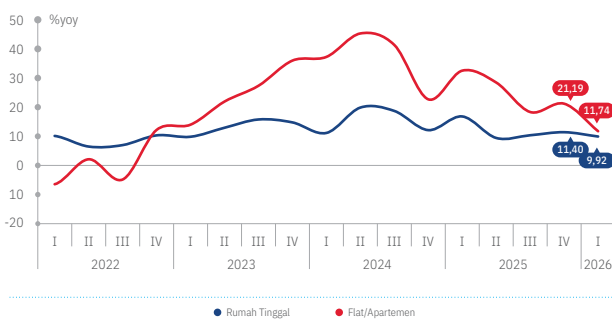
**Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan yang akseleratif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan I 2026, kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 14,15% (yoy), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,15% (yoy). Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah secara triwulanan pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 32,83% (qtq), menurun signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 42,22% (qtq). Perkembangan ini sejalan dengan pola historisnya, dimana pertumbuhan pada triwulan I secara triwulanan tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.

Secara umum, tetap kuatnya pertumbuhan secara tahunan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan utamanya didorong oleh percepatan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumatera Selatan. Belanja APBD Pemda se-Sumatera Selatan tercatat tumbuh sebesar 111,53% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp4,73 triliun, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp2,24 triliun. Akselerasi kiinerja APBD tersebut didorong oleh faktor percepatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah pada triwulan I 2026 di tengah adanya *lower based effect* seiring kebijakan blokir anggaran yang diterapkan pada Januari – Mei 2025.

Secara spesifik, peningkatan belanja tertinggi pada APBD terjadi pada belanja operasi. Realisasi belanja operasi pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp4,36 triliun (15,58% dari pagu). Kondisi tersebut tumbuh sebesar 112,25% (yoy) dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp2,05 triliun (6,16% dari pagu). Peningkatan realisasi belanja operasi utamanya berasal dari akselerasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp3,61 triliun atau tercatat tumbuh sebesar 104,95% (yoy), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan triwulan I 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp1,76 triliun. Pertumbuhan yang sangat kuat pada belanja pegawai utamanya didorong oleh penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan adanya penambahan 5.990 PPPK Paruh Waktu di Sumatera Selatan yang mendorong kinerja belanja operasi APBD. Selanjutnya, belanja barang dan jasa pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp736,25 miliar atau tumbuh sebesar 169,16% (yoy). Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2025 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp273,54 miliar. Perbaikan belanja barang dan jasa dipengaruhi oleh pengadaan dan perawatan barang dan jasa yang lebih masif pada triwulan I 2026.

Selanjutnya, akselerasi belanja juga terjadi pada komponen belanja daerah lainnya, diantaranya adalah belanja transfer, belanja modal, dan belanja tidak terduga (Grafik 1-6). Belanja transfer pada triwulan I 2026 mencatatkan realisasi sebesar

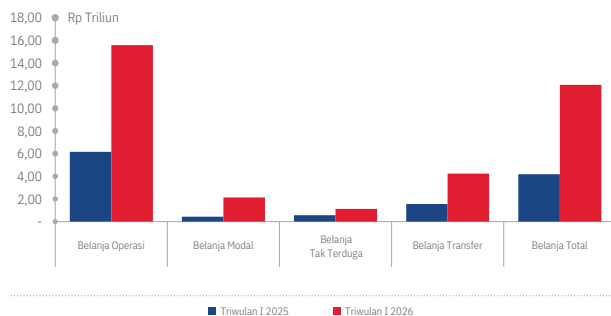
**Grafik 1.4. Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan**

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

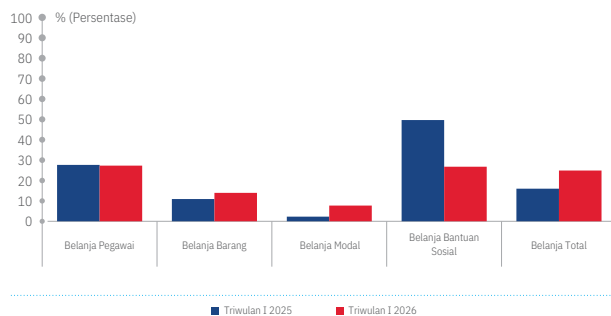
Rp273,80 miliar atau tumbuh sebesar 108,89% (yoy). Capaian tersebut tumbuh akseleratif dibandingkan realisasi triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp131,08 miliar. Kemudian, pada belanja modal, realisasi pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp98,31 miliar atau meningkat Rp46,63 miliar dibandingkan triwulan I 2025. Realisasi tersebut mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 90,22% (yoy). Terakhir, peningkatan pertumbuhan juga terjadi pada belanja tidak terduga. Adapun pertumbuhan komponen belanja tersebut tercatat tumbuh sebesar 64,01% (yoy) atau mencatatkan realisasi sebesar Rp1,45 miliar (Kanwil DJPb Sumatera Selatan, 2026).

Percepatan realisasi belanja pemerintah di Sumatera Selatan juga didukung oleh belanja berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan (Grafik 1-7). Program tersebut di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, sekolah rakyat, dan program strategis lainnya. Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus turut serta dalam mendukung percepatan realisasi belanja pemerintah melalui digitalisasi ekonomi keuangan di daerah pada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta perluasan *merchant* QRIS terutama UMKM.

**Grafik 1.5. Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan**



**Grafik 1.6. Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan**



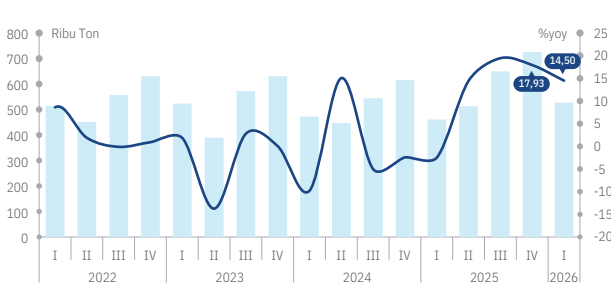
## 1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi

**Kinerja investasi pada triwulan I 2026 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Kinerja investasi pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 4,20% (yoy), atau tumbuh akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,08% (yoy). Faktor yang menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan kinerja investasi pada triwulan I 2026 adalah realisasi belanja modal APBN dan APBD di Sumatera Selatan yang tumbuh kuat seiring dengan adanya kebijakan blokir anggaran pada tahun 2025. Selanjutnya, dukungan terhadap kinerja PMTB juga berasal dari adanya pembangunan SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan secara masif pada triwulan I 2026. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan pertumbuhan triwulanan, kinerja investasi terkontraksi sebesar 0,61% (qtq) sepanjang triwulan I 2026 atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,41% (qtq). Jika ditinjau berdasarkan tren triwulanan, terdapat persamaan tren pertumbuhan PMTB pada tahun 2026 dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 dan 2025, terjadi perlambatan aktivitas investasi pada triwulan I. Selanjutnya, akselerasi pertumbuhan secara triwulanan akan terjadi pada triwulan II.

Jika ditinjau berdasarkan sub komponennya, faktor pendorong kinerja investasi pada triwulan I 2026 utamanya berasal dari subkomponen investasi bangunan. Sub komponen investasi tersebut tercatat tumbuh sebesar 4,79% (yoy), atau tumbuh lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,39% (yoy). Pertumbuhan kinerja investasi tersebut juga tercermin pada tingkat penjualan semen di Sumatera Selatan yang tercatat masih tumbuh akseleratif pada triwulan I 2026, yakni sebesar 14,50% (yoy) (Grafik 1-7).

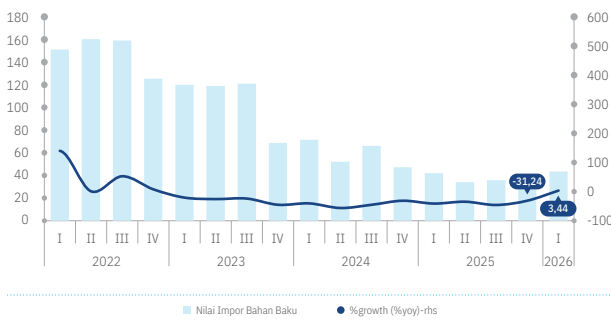
Selanjutnya, subsektor investasi non bangunan juga tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Subsektor investasi tersebut tercatat tumbuh sebesar 0,60% (yoy) pada triwulan I 2026 atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 12,15% (yoy). Hal tersebut tercermin dari realisasi impor barang modal, impor bahan baku, dan impor barang konsumsi yang seluruhnya berada pada tren peningkatan pada triwulan I 2026 (Grafik 1-8-10).

**Grafik 1.7. Volume Penjualan Semen di Sumatera Selatan**



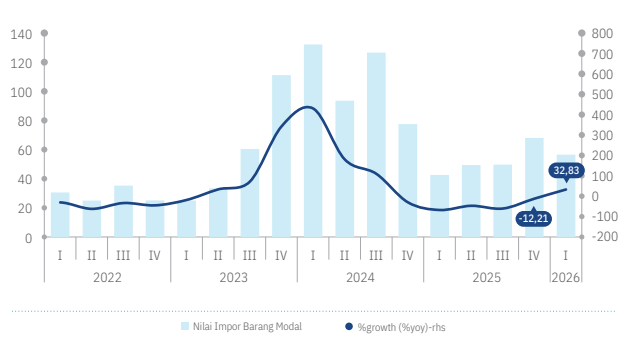
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

**Grafik 1.9. Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan**



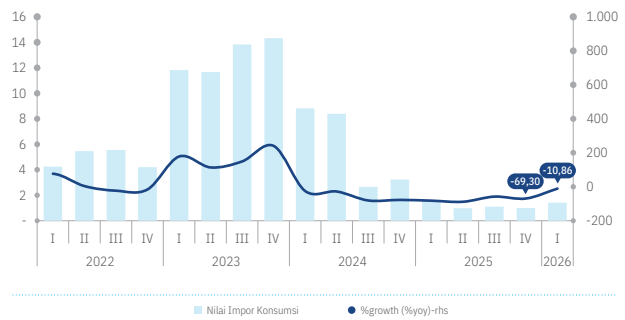
Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

**Grafik 1.8. Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan**



Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

**Grafik 1.10. Nilai Impor Barang Konsumsi Sumatera Selatan**



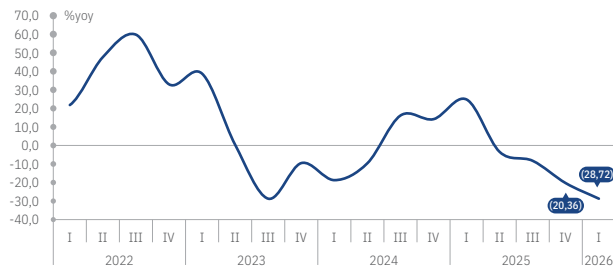
Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

### 1.2.3. Ekspor Luar Negeri

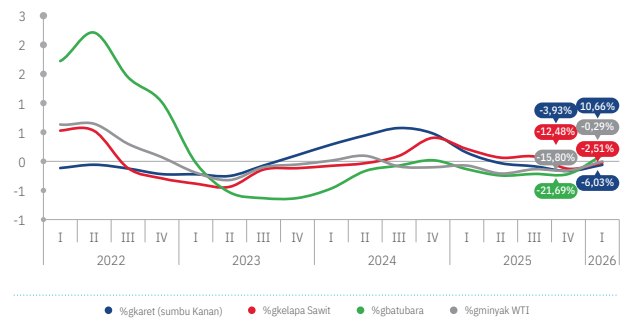
Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 mengalami perlambatan dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat terkontraksi sebesar 28,72% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 20,36% (yoy) (Grafik 1-11). Kinerja ekspor yang terkontraksi pada triwulan I 2026 disebabkan oleh harga komoditas unggulan Sumatera Selatan yang berada pada tren penurunan. Perlambatan kinerja ekspor Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 utamanya berasal dari deselerasi produksi batu bara Sumatera Selatan akibat adanya pembatasan produksi pada tahun 2026 seiring dengan penyesuaian RKAB oleh Kementerian ESDM. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan juga menerbitkan Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 tentang Penggunaan Jalan Khusus Pertambangan Bagi Kendaraan Angkutan Batu Bara di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa mulai 1 Januari 2026 seluruh perusahaan batu bara dilarang menggunakan jalan umum. Sehubungan dengan penerbitan aturan tersebut, masih banyak perusahaan pertambangan batu bara di Sumatera Selatan yang tidak mampu memenuhinya dan berdampak pada pengurangan produksi hingga tidak melakukan aktivitas produksi. Kondisi ini juga tercermin pada pangsa ekspor komoditas Sumatera Selatan, dimana catatan historis pangsa ekspor batu bara

Sumatera Selatan yang pada umumnya berada pada kisaran 40%, pada triwulan I 2026 turun menjadi 27,03%. Kondisi yang terjadi pada ekspor Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 juga tercermin pada kinerja nilai dan volume ekspor yang juga turut mengalami kontraksi yang dapat dilihat pada Grafik 1-13.

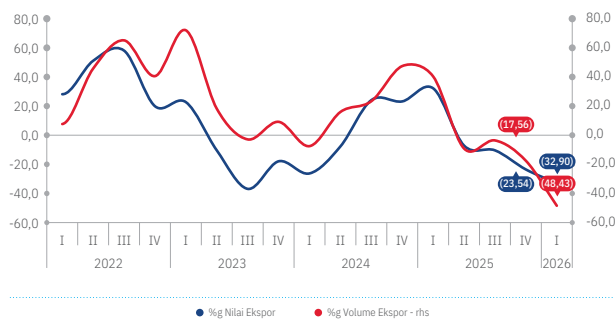
Namun demikian Perlambatan kinerja batu bara sebagai komoditas unggulan ekspor Sumatera Selatan tertahan oleh harga yang mengalami perbaikan pada triwulan I 2026. Perbaikan harga terjadi pada komoditas batu bara, karet, CPO, dan minyak. Pada komoditas batu bara, harga mengalami ekspansi sebesar 10,66% (yoy) pada triwulan I 2026 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 21,69% (yoy). Selanjutnya, perbaikan harga juga terjadi pada komoditas karet yang mengalami perbaikan harga dari USD2,03/Kg pada triwulan IV 2025 menjadi USD2,24/Kg pada triwulan I 2026. Kemudian, harga CPO pada triwulan I 2026 juga mengalami perbaikan dengan catatan harga sebesar USD1.041,57/MT atau terkontraksi sebesar 2,51% (yoy). Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 12,48% (yoy) atau tercatat sebesar USD1.002,30/MT. Terakhir, perbaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak yang tercatat terkontraksi sebesar 0,29% (yoy) pada triwulan I 2026 dengan realisasi harga sebesar

**Grafik 1.11. Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan**

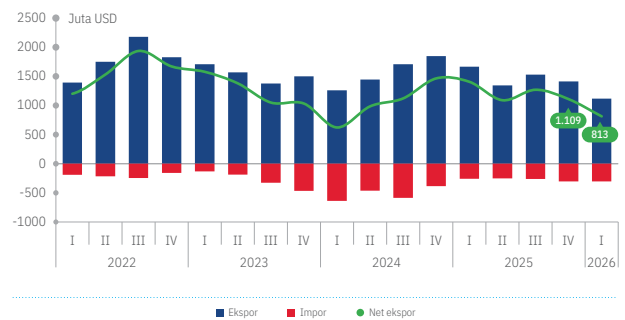
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 1.12. Perkembangan Harga Komoditas Internasional**

Sumber: Bloomberg, diolah

**Grafik 1.13. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan**

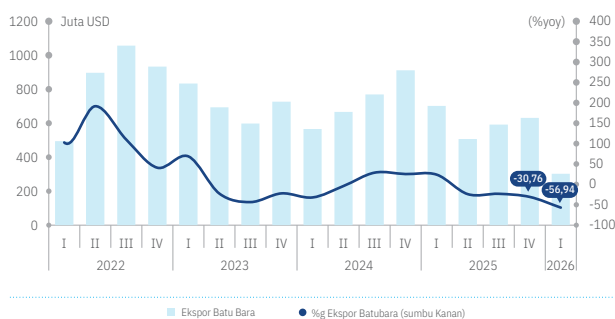
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.14. Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

USD71,22/bbl. Kondisi tersebut berkontraksi lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat berkontraksi sebesar 15,80% (yoy) (Grafik 1-12).

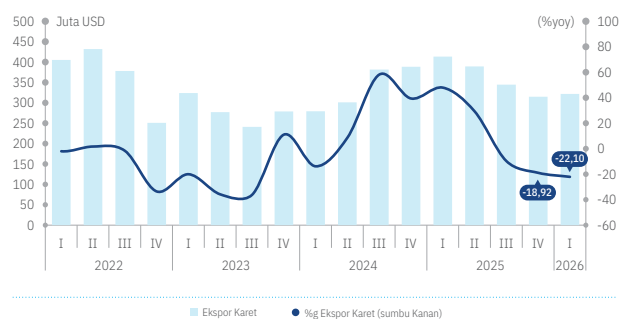
Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar USD1,11 miliar atau tercatat mengalami kontraksi sebesar 32,90% (yoy). Kondisi tersebut mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 23,54% (yoy). Kontribusi ekspor terbesar pada triwulan I 2026 adalah komoditas karet yang mencapai USD321,47 juta (pangsa 28,77%), diikuti oleh komoditas batu bara yang mencapai USD302,05 juta (pangsa 27,03%), kemudian komoditas *pulp and paper* yang mencapai

**Grafik 1.15. Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan**

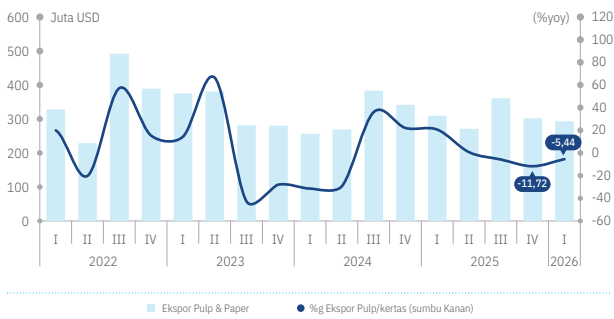
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

USD292,96 juta (pangsa 26,22%), dan komoditas kelapa sawit dengan nilai sebesar USD34,30 juta (pangsa 3,07%) (Grafik 1-17).

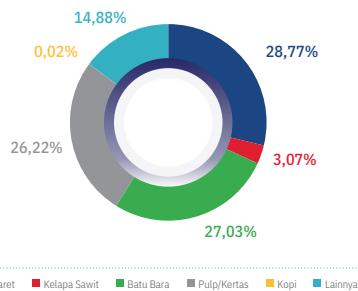
Berbeda dengan triwulan sebelumnya, pangsa ekspor komoditas terbesar di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 bergeser dari batu bara menjadi karet. Pada triwulan laporan, dominasi batu bara pada ekspor Sumatera Selatan digeser oleh karet akibat adanya kendala produksi. Namun demikian, kinerja ekspor karet tercatat masih mengalami kontraksi pertumbuhan (Grafik 1-16). Ekspor karet pada triwulan laporan tercatat USD321,89 juta atau berkontraksi sebesar 22,10% (yoy), atau berkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya

**Grafik 1.16. Perkembangan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.17. Perkembangan Nilai Ekspor Pulp & Paper Sumatera Selatan**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

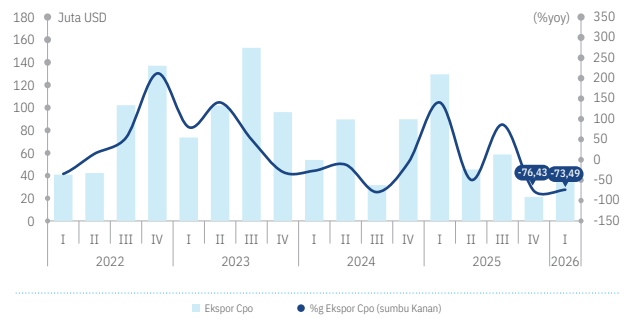
**Grafik 1.19. Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

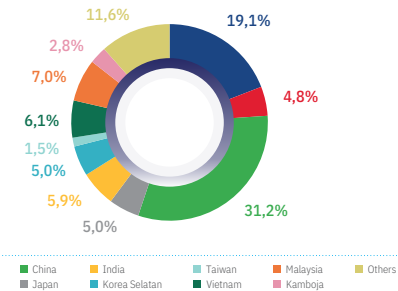
yang tercatat terkontraksi sebesar 18,92% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor karet pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh terbatasnya peningkatan produksi pada karet dengan jenis *crumb rubber*, sir 10, dan sir 20 pada triwulan I 2026 dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Perlambatan produksi pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh adanya fenomena curah hujan menengah – tinggi pada triwulan I 2026 yang berdampak pada terganggunya aktivitas panen.

Nilai ekspor batu bara pada triwulan I 2026 juga tercatat mengalami kontraksi. Pertumbuhan nilai ekspor karet mengalami kontraksi sebesar 56,94% (yoy) setelah pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 30,76% (yoy) (Grafik 1-15). Perlambatan kinerja ekspor terjadi seiring dengan adanya pembatasan produksi oleh RKAB yang ditentukan pemerintah pusat dan kendala logistik di Sumatera Selatan. Selain itu, meningkatnya risiko geopolitik akibat kebijakan perang tarif dagang Amerika Serikat serta perlambatan perekonomian mitra dagang utama, khususnya Tiongkok, turut menekan permintaan ekspor.

Di sisi lain, kinerja ekspor *pulp & paper* tercatat mengalami perbaikan pertumbuhan pada triwulan I 2026. Kinerja ekspor *pulp & paper* pada triwulan I 2026 tercatat terkontraksi sebesar 5,44% (yoy). Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang terkontraksi sebesar

**Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.20. Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

11,72% (yoy). Kondisi tersebut utamanya didorong oleh dukungan harga yang lebih baik dan permintaan eksternal yang lebih tinggi terhadap produksi *pulp & paper* Sumatera Selatan seiring dengan adanya pengurangan produksi *pulp & paper* dari Sumatera Utara akibat adanya keputusan penutupan perusahaan oleh pemerintah.

**Terakhir, kinerja ekspor kelapa sawit Sumatera Selatan juga tercatat kembali mengalami perbaikan pada triwulan I 2026.**

Kinerja ekspor kelapa sawit pada triwulan laporan tercatat tumbuh terkontraksi sebesar 73,49% (yoy) atau mencatatkan realisasi sebesar USD34,30 juta. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 76,43% (yoy) (Grafik 1-16). Perbaikan kinerja ekspor kelapa sawit tersebut dipengaruhi oleh harga yang berada tren peningkatan, permintaan global yang tetap tinggi, dan penurunan produksi Malaysia mendorong peralihan permintaan ke Indonesia serta adanya faktor *based effect*.

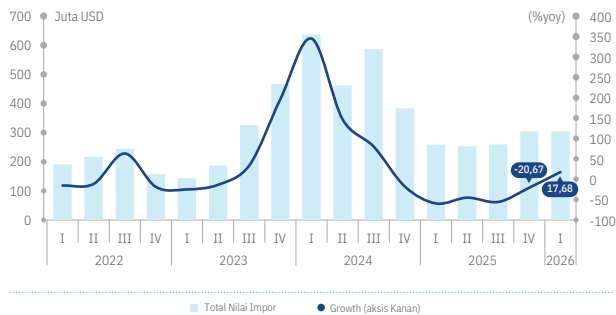
#### 1.2.4. Impor Luar Negeri

Impor luar negeri Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen impor luar negeri pada periode laporan tercatat mengalami ekspansi sebesar 17,68% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 20,67% (yoy). Kenaikan permintaan akan

**Tabel 1.4. Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)**

Nilai	2024				2025				2026	Pangsa (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Total Nilai Impor	637,2	461,8	586,1	383,6	258,4	253,0	259,8	304,3	304,1	99,94
Peralatan Elektrik	16,5	23,6	34,5	11,5	14,3	4,8	1,6	7,4	9,1	3,00
Besi dan Baja	24,5	7,6	14,2	8,8	2,3	7,4	3,1	5,1	2,2	0,73
Peralatan industri	157,6	110,1	118,7	74,9	48,9	27,6	39,0	86,9	87,2	28,66
Gandum	24,9	23,1	5,7	7,8	2,7	0,0	9,3	0,0	0,0	-
Peralatan Khusus Industri	122,7	108,8	210,0	122,6	74,0	80,3	77,7	92,6	64,3	21,14

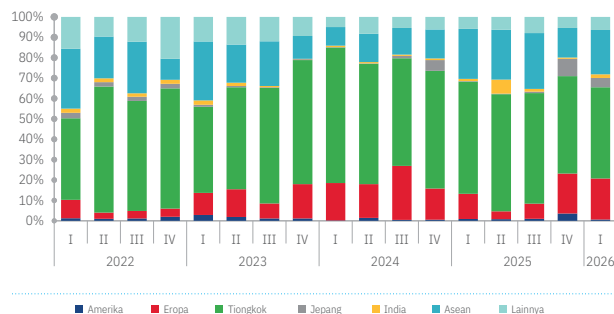
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.21. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan**

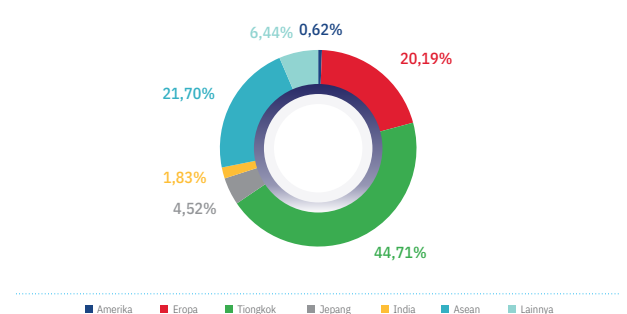
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.22. Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.23. Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.24. Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal**

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

komponen impor utamanya berasal dari peralatan industri (pangsa 28,66%).

Secara khusus, naiknya permintaan peralatan industri didorong oleh peningkatan kebutuhan industri pada berbagai pembangunan pabrik dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang terus berlanjut pada triwulan I 2025. Jika ditinjau berdasarkan negara asalnya, impor di triwulan I 2026 didominasi berasal dari Tiongkok dengan pangsa sebesar 44,71%, selanjutnya disusul oleh ASEAN (21,70%), India (1,83%), Uni Eropa (20,19%), Amerika Serikat (0,62%), Jepang (4,52%), dan negara lainnya (6,44%) (Grafik 1-22).

Kemudian, pertumbuhan impor berdasarkan kategorinya di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 ditopang oleh impor

barang modal dan impor barang baku. Impor barang modal pada triwulan I 2026 tercatat terkontraksi sebesar 32,83% (yoy) atau mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 12,21% (yoy). Selanjutnya, perbaikan kinerja juga terjadi pada impor barang baku yang tercatat terkontraksi sebesar 3,44% yoy pada triwulan laporan. Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 31,24% (yoy). Kemudian, catatan kinerja positif juga terjadi pada kelompok impor barang konsumsi. Kelompok tersebut tercatat terkontraksi sebesar 10,86% (yoy) pada triwulan I 2026, atau lebih baik dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 69,30% (yoy).

### 1.3. Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 bersumber dari empat lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian (pangsa 21,58%), LU Industri Pengolahan (pangsa 19,07%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 14,93%), serta LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (pangsa 14,18%) (BPS Sumatera Selatan, 2026). Kinerja LU utama tersebut tercatat tetap tumbuh positif, sehingga menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan laporan (Tabel 1-5). Secara kumulatif keempat LU memberikan kontribusi sebesar 69,76% terhadap struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan utamanya berasal dari peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan. Adapun yang menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan adalah LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tercatat tumbuh menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan utamanya bersumber

dari Industri Non Migas, diantaranya Industri Makanan dan Minuman serta Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Adapun kinerja subsektor industri makanan dan minuman didorong oleh faktor meningkatnya produksi kelapa sawit di tengah dukungan adanya peningkatan permintaan dari mitra dagang utama. Selanjutnya, pada subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik, terdapat perbaikan harga pada triwulan I 2026.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh penurunan tingkat produksi batu bara akibat adanya penyesuaian regulasi di tengah adanya dukungan perbaikan harga.

Selanjutnya, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan laporan tercatat tumbuh terbatas. Terbatasnya kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Kondisi tersebut terjadi di tengah tingginya tingkat produksi yang telah terjadi sepanjang 2025 seiring dengan implemetasi program swasembada pangan, sehingga menimbulkan adanya *higher based effect*.

**Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)**

Sektor	2024					2025					2026
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	3,38	2,66	2,39	2,59	5,15	2,17	7,85	7,24	5,60	3,58
Pertambangan dan Penggalian	4,19	0,94	3,51	4,71	3,33	3,98	5,93	0,52	3,97	3,47	-0,16
Industri Pengolahan	4,64	4,84	4,04	3,91	4,39	3,58	5,54	5,20	3,94	4,67	7,04
Pengadaan Listrik, Gas	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,04	5,76	6,88	4,71
Pengadaan Air	2,52	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15	4,25
Konstruksi	6,89	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,12	4,96	6,03	5,95
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	7,72	7,33	7,88	7,42	8,36	8,85	8,52	8,48	8,47	9,85
Transportasi dan Pergudangan	2,72	3,74	3,85	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03	4,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66	12,3
Informasi dan Komunikasi	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10	8,92
Jasa Keuangan	10,17	8,08	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94	11,19	4,45	6,23
Real Estate	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79	8,54
Jasa Perusahaan	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11	7,65
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02	4,47	3,40	6,59
Jasa Pendidikan	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28	9,87
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79	6,86
Jasa lainnya	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11	3,67
PDRB	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35	5,34

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)**

Sektor	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,43	4,58	2,20	-12,54	12,36	1,73	7,83	-13,03	8,56
Pertambangan dan Penggalian	-5,64	8,01	8,30	-5,15	-6,26	10,04	2,84	-1,89	-10,1
Industri Pengolahan	0,67	1,48	0,51	1,36	0,35	3,22	0,13	0,14	3,68
Pengadaan Listrik, Gas	-2,87	6,91	3,28	0,64	0,23	0,48	4,62	0,39	-0,77
Pengadaan Air	-0,53	-0,88	1,01	2,86	-3,73	1,24	1,72	2,26	-1,01
Konstruksi	0,16	0,35	0,64	2,97	-1,03	5,41	0,63	-0,04	-0,10
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,04	2,97	2,54	2,18	0,40	3,47	2,29	2,14	1,40
Transportasi dan Pergudangan	-3,08	5,75	-1,07	1,85	0,09	3,97	0,03	-1,34	1,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,32	7,93	0,05	5,54	-4,61	9,49	1,22	2,22	-0,86
Informasi dan Komunikasi	2,43	3,34	0,15	2,98	2,13	-0,34	0,55	2,89	5,64
Jasa Keuangan	3,60	-0,18	4,78	-7,61	5,84	0,27	3,96	0,78	1,12
Real Estate	2,11	1,92	1,29	3,32	0,61	2,32	1,52	3,42	1,03
Jasa Perusahaan	-1,02	1,19	2,29	3,69	-2,20	2,67	2,16	3,89	-1,21
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,94	22,78	-9,88	2,34	-2,11	9,94	-9,31	6,94	-0,02
Jasa Pendidikan	-6,93	6,86	0,05	9,98	-8,23	-0,98	4,93	9,68	-3,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,17	3,76	0,16	9,52	-7,17	4,06	-0,05	9,59	-6,25
Jasa lainnya	-3,82	1,26	1,26	1,35	-0,02	1,46	1,86	0,35	-0,04
<b>PDRB</b>	<b>0,02</b>	<b>4,47</b>	<b>2,47</b>	<b>-1,85</b>	<b>0,16</b>	<b>4,65</b>	<b>2,25</b>	<b>-1,53</b>	<b>2,25</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

### 1.3.1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

**Pertumbuhan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi.** Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,16% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2025 yang mampu tumbuh hingga 3,97% (yoy). Hal yang sama juga terjadi pada tingkat pertumbuhan triwulanan, dimana terjadi terkontraksi sebesar 10,15% (qtq) atau mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,89% (qtq).

Perlambatan kinerja pada triwulan I 2026 utamanya terjadi pada subsektor pertambangan batu bara dan lignit. Kinerja subsektor pertambangan batu bara dan lignit tercatat mengalami penurunan dari 6,52% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi -2,28% (yoy) pada triwulan I 2026. Perlambatan kinerja subsektor pertambangan batu bara dan lignit disebabkan oleh penurunan tingkat produksi batu bara akibat adanya penyesuaian regulasi di tengah adanya dukungan perbaikan harga. Kemudian, perlambatan kinerja juga terjadi pada subsektor pertambangan dan penggalian lainnya yang tumbuh sebesar 2,91% (yoy) pada triwulan I 2026, atau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor peningkatan kebutuhan hasil galian C, khususnya pembangunan perumahan dan proyek strategis pemerintah di Sumatera

Selatan. Di sisi lain, perbaikan pertumbuhan terjadi pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Capaian subsektor tersebut tercatat tumbuh sebesar 0,58% (yoy) pada triwulan I 2026, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,04% (yoy). Kondisi tersebut terjadi didorong optimalisasi pencarian sumur minyak baru yang terus berlanjut dan upaya *Development Drilling Program* (DDP) yang terus ditingkatkan pada triwulan I 2026 untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

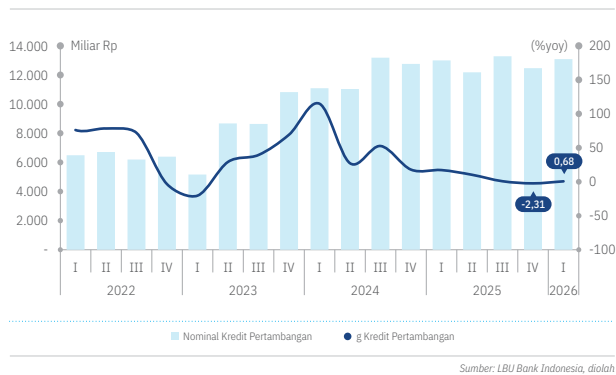
**Selanjutnya, ekspor batu bara juga tercatat terkontraksi lebih dalam pada triwulan I 2026.** Pertumbuhan nilai ekspor batu bara Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat terkontraksi sebesar 56,94% (yoy), atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 30,76% (yoy). Terbatasnya kinerja ekspor sejalan dengan terbatasnya produksi batu bara pada triwulan I 2026, meningkatnya risiko geopolitik, serta perlambatan perekonomian mitra dagang utama, khususnya Tiongkok.

**Di tengah terbatasnya kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2026, terjadi peningkatan harga batu bara dan minyak mentah.** Harga batu bara internasional pada triwulan laporan tercatat sebesar USD121,55/MT atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar USD109,83/MT. Kondisi pada periode pelaporan mengalami

kenaikan sebesar 10,66% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, perbaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak yang tercatat berkontraksi sebesar 0,29% (yoy) pada triwulan I 2026 dengan realisasi harga sebesar USD71,22/bbl. Kondisi tersebut mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat berkontraksi sebesar 15,80% (yoy).

Selain itu, perlambatan kinerja LU Pertambangan juga tertahan oleh tingkat penyaluran kredit yang mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Kredit pertambangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 13,08 triliun atau terapresiasi sebesar 0,68% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,31% (yoy).

**Grafik 1.25. Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian Sumatera Selatan**



### 1.3.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan I 2026, pertumbuhan LU Industri Pengolahan tercatat mengalami akselerasi pertumbuhan. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 7,03% (yoy), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,94% (yoy). Capaian ini menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada LU Industri Pengolahan setelah sebelumnya mencapai pertumbuhan 7% pada tahun 2016. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan triwulanan tercatat tumbuh sebesar 3,67% (qtq), mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,14% (qtq).

Peningkatan kinerja tahunan LU Industri Pengolahan terutama bersumber dari Industri Non Migas, diantaranya Industri Makanan dan Minuman serta Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Adapun subsektor industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 11,69% (yoy) pada triwulan I 2026, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 6,42% (yoy). Peningkatan kinerja subsektor industri makanan dan

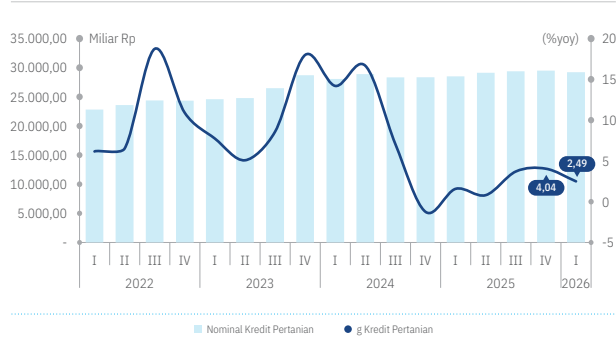
minuman didorong oleh faktor meningkatnya produksi kelapa sawit di tengah dukungan adanya peningkatan permintaan dari mitra dagang utama terutama India dan Tiongkok yang memiliki pangsa terbesar, seiring harga CPO yang lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya. Harga CPO pada triwulan I 2026 tercatat sebesar USD1.041,57/MT atau berkontraksi sebesar 2,51% (yoy). Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 12,48% (yoy) atau tercatat sebesar USD1.002,30/MT. Selanjutnya, perbaikan kinerja juga terjadi pada subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik. Subsektor tersebut tercatat tumbuh sebesar 5,07% (yoy) pada triwulan I 2026 atau berbalik arah setelah mengalami kontraksi sebesar 1,64% (yoy) pada triwulan IV 2025. Di tengah terbatasnya produksi karet akibat musim gugur daun yang berlanjut, terdapat perbaikan harga pada triwulan I 2026. Harga pada komoditas karet yang mengalami perbaikan dari USD2,03/Kg pada triwulan IV 2025 menjadi USD2,24/Kg pada triwulan I 2026.

### 1.3.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

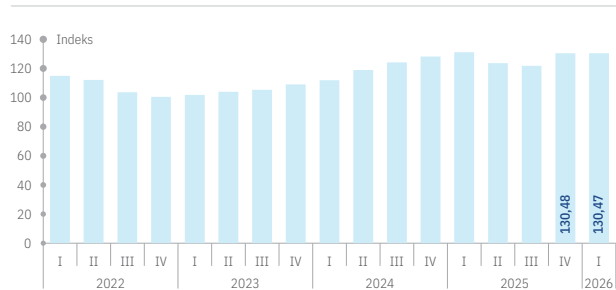
Pada triwulan I 2026, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan yang tetap lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh sebesar 3,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,24% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan triwulanan tercatat meningkat sebesar 8,56% (qtq), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 13,03% (qtq).

Terbatasnya kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Luas lahan padi Sumatera Selatan tumbuh terbatas sebesar 2,00% (yoy) pada triwulan I 2026. Hal tersebut juga sejalan dengan tingkat produksi yang tumbuh terbatas 0,23% (yoy) pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut terjadi di tengah tingginya tingkat produksi yang telah terjadi sepanjang 2025 seiring dengan implemptasi program swasembada pangan, sehingga menimbulkan adanya *higher based effect*.

Selanjutnya, terbatasnya pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung sepanjang triwulan I 2026. Pada beberapa daerah sentra di Sumatera Selatan, terjadi curah hujan dengan intensitas menengah – tinggi. Hal tersebut berimplikasi pada adanya panen yang kurang optimal pada periode panen raya. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terus

**Grafik 1.26. Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.27. Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan**

Sumber: BPS, diolah

memperkuat dukungan kebijakan peningkatan peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

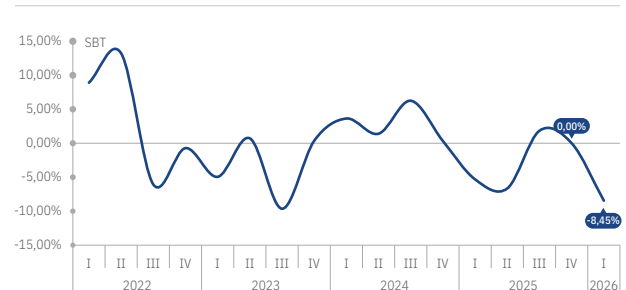
**Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terbatas sejalan dengan kinerja penyaluran kredit yang mengalami perlambatan.** Kredit pertanian pada triwulan I 2025 tercatat bertumbuh sebesar 2,49% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,04% (yoy). Namun demikian, risiko kredit pertanian yang dilihat dari NPL tetap berada dalam batas aman atau senilai 2,18%, berada di batas bawah (*threshold*) yang ditetapkan sebesar 5,00%.

**Perlambatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan juga tercermin pada penurunan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP).** Indeks NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 130,47 sedikit menurun dibandingkan indeks pada triwulan sebelumnya sebesar 130,48. Penurunan tingkat NTP tersebut utamanya berasal dari adanya penurunan penerimaan pendapatan yang diterima oleh para petani tanaman pangan dan petani holtikultura. Kondisi tersebut tercermin pada indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) yang mengalami penurunan dari 102,67 pada triwulan IV 2025 menjadi 101,14 pada triwulan I 2026. Hal yang sama juga terjadi pada indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Holtikultura (NTPH) yang mengalami penurunan dari 99,62 pada triwulan IV 2025 menjadi 98,00 pada triwulan I 2026.

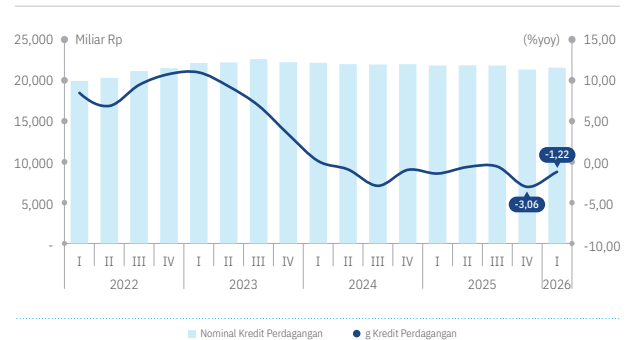
### 1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

**Pada Triwulan I 2026, kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik.** Secara tahunan, lapangan usaha ini tumbuh sebesar 9,85% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,48% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan secara triwulanan mengalami sedikit perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 1,4% (qtq), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh lebih baik sebesar 2,14% (qtq).

**Pertumbuhan tahunan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terutama didorong oleh penguatan kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran.** Adapun subsektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 11,55% (yoy), tumbuh akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,55% (yoy). Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit di sektor perdagangan yang tercatat terkontraksi sebesar 1,22% (yoy) pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,06% (yoy).

**Grafik 1.28. Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan**

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.29. Penyaluran Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran tumbuh berkontraksi. Adapun subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya mencatatkan kontraksi sebesar 0,10% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,82% (yoy). Subsektor ini memberikan kontribusi dominan terhadap keseluruhan kinerja lapangan usaha seiring dengan tingkat penjualan mobil yang juga turut mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I 2026. Hal tersebut tercermin pada tingkat penjualan kendaraan bermotor pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh sebesar 0,42% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,28% (yoy). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan dari 3,31% pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar 0,70% pada triwulan I 2026. Hal tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian kinerja pelaku usaha di subsektor perdagangan besar dan eceran.

### 1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

Pada triwulan I 2026, LU Konstruksi mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 5,95% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy). Dukungan pertumbuhan pada LU Konstruksi berasal dari adanya pembangunan SPPG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan secara masif, serta akselerasi pembangunan berbagai proyek swasta di Sumatera

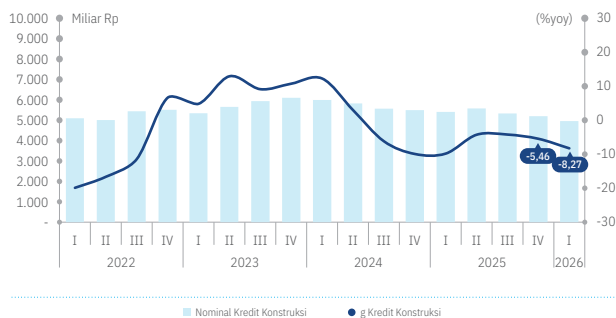
Selatan (pabrik, *fly over*, dan *underpass*). Secara triwulanan, LU Konstruksi tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (qtq), cenderung stabil dengan yang terjadi pada triwulan sebelumnya masih mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04% (qtq).

Namun demikian, kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2026 tertahan oleh tingkat kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Pada triwulan I 2026, kredit yang disalurkan oleh perbankan pada LU konstruksi tercatat berkontraksi sebesar 8,27% (yoy). Kontraksi tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,46% (yoy).

Kondisi juga tercermin pada kinerja LU Konstruksi yang tumbuh melambat sejalan dengan realisasi penjualan semen di Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2026. Tingkat penjualan semen pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 14,50% (yoy), atau mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,88% (yoy) (Grafik 1-8).

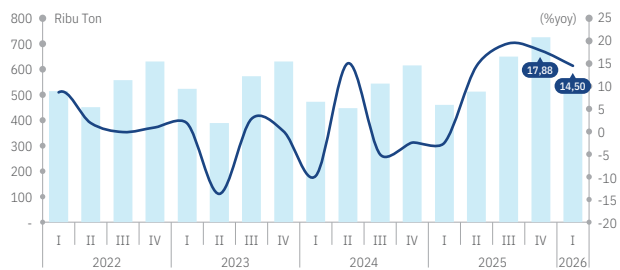
Selanjutnya, kinerja sektor konstruksi tertahan oleh mundurnya target penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan menjadi lebih dari tahun 2026. Sejumlah pengerjaan PSN yang mendukung sektor pertanian dan penyelesaiannya mundur diantaranya yakni Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang, dan Jaringan Irigasi Lempuing.

Grafik 1.30. Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.31. Realisasi Penjualan Semen di Sumatera Selatan



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

BOKS 1 :

## The 3<sup>rd</sup> Sriwijaya Economic Forum: Policy Talks

Dalam rangka memperkuat budaya riset ekonomi di Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Palembang menyelenggarakan kegiatan *The 3rd Sriwijaya Economic Forum (SEF): Policy Talks* pada 22 April 2026 bertempat di Universitas Sriwijaya, Palembang. Kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Mendorong Ketahanan Pangan dan Energi Nasional Melalui Hilirisasi di Sumatera Selatan” tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi *advisory* Bank Indonesia dalam mendukung transformasi ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi sektor unggulan berbasis sumber daya alam.

Penyelenggaraan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tantangan global yang ditandai dengan ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta risiko perubahan iklim yang berdampak terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Dalam konteks tersebut, hilirisasi dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat struktur industri, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, serta menjaga ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Secara regional, Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumatera Selatan tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,54% (yoy), namun tetap menempatkan Sumatera Selatan

sebagai pertumbuhan tertinggi ketiga di regional Sumatera, di mana pertumbuhan ekonomi Sumatera secara keseluruhan tercatat sebesar 5,13% (yoy). Kinerja tersebut didukung oleh akselerasi LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Akomodasi dan Makan Minum, LU Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan LU Konstruksi, meski sektor Pertambangan mengalami kontraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk memperkuat transformasi ekonomi melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan secara lebih terintegrasi.

Kegiatan *Policy Talks* dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, pengamat ekonomi, serta mitra strategis lainnya. Ketua ISEI Cabang Palembang, Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan hilirisasi pangan dan energi di Sumatera Selatan sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas pembangunan nasional Asta Cita. Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu motor penggerak hilirisasi nasional melalui optimalisasi potensi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyampaikan *policy brief* terkait perkembangan ekonomi daerah, dinamika inflasi, serta prospek perekonomian Sumatera Selatan ke depan. Dalam paparannya disampaikan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi



Gambar 1. Pemaparan *Policy Brief* oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

besar pada sektor batu bara dan kelapa sawit yang didukung oleh ketersediaan sumber daya dan cadangan yang melimpah. Oleh karena itu, hilirisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan, memperkuat daya saing industri domestik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.

Rangkaian diskusi menghadirkan narasumber lintas sektor yang memberikan perspektif strategis terkait pengembangan hilirisasi di Sumatera Selatan. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr., menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian melalui penerapan inovasi dan teknologi guna meningkatkan produktivitas serta memperluas hilirisasi komoditas pangan unggulan daerah. Sementara itu, Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung hilirisasi sektor pangan dan energi, termasuk penguatan infrastruktur, investasi, dan sinergi antar sektor.

Selanjutnya, *Head Investor Relations Department* PT Bukit Asam Tbk, Aldy Pratama, menyampaikan perkembangan dan prospek sektor batu bara di tengah isu keberlanjutan global serta strategi perusahaan dalam mendorong hilirisasi energi guna mendukung ketahanan energi nasional. Diskusi tersebut dimoderatori oleh anggota ISEI Cabang Palembang dan berlangsung secara interaktif dengan menyoroti tantangan implementasi hilirisasi, mulai dari aspek regulasi, teknologi, investasi, hingga penguatan rantai pasok industri.

Dalam rangka menjaring ide dan gagasan inovatif bagi pengembangan ekonomi daerah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan *The 3<sup>rd</sup> SEF 2026*, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan membuka kompetisi penulisan *Call for Applicative Essay* yang terbuka bagi kategori sivitas akademika dan umum dengan tema “Sinergi Hilirisasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi Sumatera Selatan”. Informasi lebih lanjut mengenai kompetisi tersebut dapat diakses melalui kanal informasi resmi Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui penyelenggaraan *The 3<sup>rd</sup> SEF 2026*, Bank Indonesia berharap forum ini dapat menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi daerah. Selain itu, forum ini diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi Sumatera Selatan melalui hilirisasi yang bernilai tambah, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.

## BOKS 2 :

**LIKE IT 2026 Series #1: Dari Literasi Menuju Investasi**

Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (*LIKE IT*) Tahun 2026 *Series #1* di Graha Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, Palembang, pada hari Kamis 16 April 2026 sebagai wujud komitmen peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan *LIKE IT* saecara nasional di Tahun 2026 dengan mengusung tema “Dari Literasi Menuju Investasi, Bangun Masa Depan Mulai Hari Ini”. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam upaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi generasi muda sebagai penggerak ekonomi masa depan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi yang prominent di bidangnya, antara lain:

1. Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia – Bapak Iwan Chandra
2. Analis Kebijakan Pengembangan Pasar Keuangan, Kementerian Keuangan - Bapak Dewa Ekayana
3. Kepala Divisi Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan - Bapak Handika Rahman
4. Asisten Direktur Divisi Pelaksanaan Edukasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan - Ibu Grani Ayuningtyas Harmani
5. *Financial Literacy & Inclusion Specialist* - Ibu Ayu Sara Herlia-Hinch.



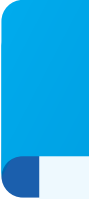
Gambar 1. Narasumber dan Moderator Kegiatan LIKE IT Tahun 2026

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sekitar 500 peserta, yang tidak hanya dari kalangan mahasiswa namun juga calon pekerja migran Indonesia, serta komunitas literasi Sumatera Selatan. Antusiasme peserta yang hadir menunjukkan tingginya kebutuhan generasi muda terhadap edukasi keuangan yang relevan, aplikatif, dan sesuai perkembangan zaman. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa 54% investor di pasar modal merupakan generasi muda berusia di bawah 30 tahun yang mencerminkan bahwa anak muda saat ini bukan lagi calon pelaku pasar, melainkan telah menjadi pelaku utama.

Oleh karenanya, kualitas pemahaman investasi tetap perlu diperkuat agar generasi muda tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga matang dalam secara literasi keuangan dan mampu mengelola terhadap risiko secara baik. Tingkat inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 80,51% perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan yang saat ini masih berada pada kisaran 66,46%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah banyak menggunakan produk keuangan, tetapi belum seluruhnya memahami manfaat, risiko, dan cara penggunaannya secara optimal.



Gambar 2. Ambience Peserta Kegiatan LIKE IT Tahun 2026



Bank Indonesia berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi *trigger point* perubahan perilaku keuangan generasi muda agar lebih produktif, terencana, dan berorientasi masa depan yang terwujud dalam keputusan investasi yang bijak dan terukur. Selain itu para peserta yang hadir diharapkan menjadi agen perubahan yang menularkan perilaku keuangan sehat di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat sekitar.





## 02

# Perkembangan Inflasi Daerah



Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat meningkat pada triwulan I 2026 dipengaruhi oleh volatilitas harga emas.

- Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,09% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,91% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan tren peningkatan harga emas global. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan pokok dan hortikultura, seperti cabai merah dan beras, yang dipicu oleh peningkatan permintaan masyarakat selama momentum Ramadan dan perayaan Idulfitri.
- Tekanan inflasi pada Triwulan II 2026 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan normalisasi pola konsumsi masyarakat setelah periode puncak permintaan pada Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
- Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$  dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

## 2.1. Inflasi Secara Umum

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,09% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 2,91%(yoy). Inflasi Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48%. Secara spasial, realisasi inflasi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 berada pada urutan keempat terendah di regional Sumatera. Terdapat 6 dari 10 provinsi di regional Sumatera mencatatkan inflasi yang di bawah sasaran inflasi nasional, yakni  $2,5\pm 1\%$  (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi motor utama inflasi dengan andil mencapai 1,55% (yoy), disusul oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil kontribusi sebesar 0,83% (yoy) (Tabel 2-1).

Meningkatnya tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 terutama didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap tinggi selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek dan Idulfitri. Tekanan inflasi didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, serta minyak goreng seiring meningkatnya aktivitas konsumsi

rumah tangga dan tradisi perayaan keagamaan. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan di tengah ketidakpastian global dan masih tingginya harga komoditas internasional turut memberikan tekanan pada inflasi inti.

Di sisi lain, Inflasi juga tertahan oleh relatif terkendalinya tarif angkutan udara dan darat melalui kebijakan diskon tarif selama periode mudik Idulfitri.

**Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi pada triwulan I 2026, antara lain emas perhiasan, tarif Listrik, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras (Tabel 2-2).** Peningkatan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berlanjutnya kenaikan harga emas global di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Sementara itu, kenaikan tarif listrik terutama dipengaruhi oleh berakhirnya program diskon tarif listrik pada awal tahun. Di sisi lain, meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri turut mendorong kenaikan harga komoditas pangan strategis, khususnya daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras, di tengah meningkatnya konsumsi rumah tangga serta distribusi pasokan yang belum sepenuhnya merata di beberapa wilayah.

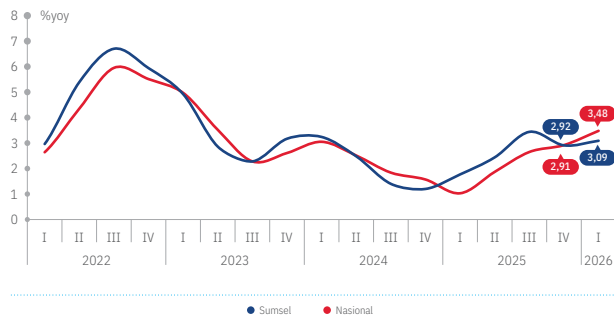
**Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	IV 2025	JAN	FEB	MAR	IV 2025	JAN	FEB	MAR
UMUM	2,91	3,33	4,36	3,09	2,91	3,33	4,36	3,09
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,50	0,05	1,97	1,60	1,07	0,03	0,62	0,51
Pakaian dan Alas Kaki	-0,24	0,08	0,13	-0,2	-0,01	0,00	0,01	-0,01
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,11	10,42	14,53	6,35	0,15	1,33	1,80	0,83
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,17	0,19	-0,02	0,14	0,01	0,01	0,00	0,01
Kesehatan	0,75	0,77	0,70	0,57	0,02	0,02	0,02	0,01
Transportasi	0,82	0,24	-0,48	0,32	0,11	0,03	-0,06	0,04
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,43	-0,37	-0,28	-0,18	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,46	1,00	0,74	0,71	0,03	0,02	0,01	0,01
Pendidikan	0,82	0,98	0,98	0,98	0,05	0,05	0,05	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,28	1,08	1,09	1,17	0,11	0,09	0,09	0,1
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	18,23	22,86	22,93	19,24	1,39	1,77	1,83	1,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026**

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	1,48	Cabai Merah	-
Tarif Listrik	0,79	Cabai Rawit	-
Daging Ayam Ras	0,24	Bawang Merah	-
Beras	0,16	Bawang Putih	-
Telur Ayam Ras	0,08	Bensin	0,04

**Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Inflasi lebih lanjut ditahan oleh deflasi beberapa komoditas, diantaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, bensin, dan kentang (Tabel 2-2). Deflasi pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih terjadi didorong oleh meningkatnya pasokan seiring membaiknya masa panen di sejumlah sentra produksi serta kelancaran distribusi antarwilayah.

## 2.2. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi, tekanan pada triwulan laporan bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 19,24% (yoy), disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,60% (yoy), dan penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 1,17% (yoy) (Tabel 2-1). Adapun andil masing-masing kelompok tersebut terhadap inflasi sebesar 1,55% (yoy); 0,51% (yoy); dan 0,10% (yoy).

### 2.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

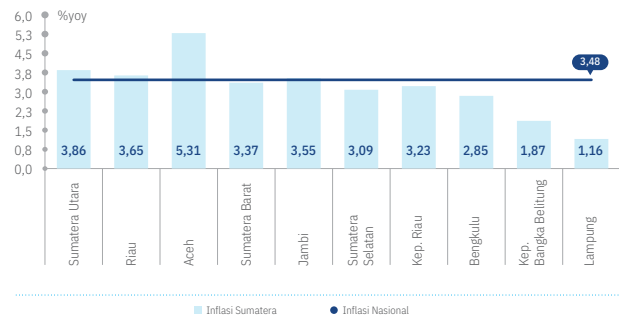
**Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan I 2026 mengalami inflasi sebesar 1,60% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,51% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,50% (yoy) dengan andil 1,07% (yoy).**

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan (%yoy) tertinggi, diantaranya daging ayam ras sebesar 0,24% (yoy); beras sebesar 0,16% (yoy); telur ayam ras sebesar 0,08% (yoy); tomat sebesar 0,07% (yoy); dan ikan patin sebesar

**Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	3,50	0,05	1,97	1,60	1,07	0,03	0,62	0,51

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

**Grafik 2.2. Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan I 2026**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

0,06% (yoy). Kenaikan harga daging ayam ras dan beras pada Triwulan I 2026 di Sumatera Selatan terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, aktivitas sosial-keagamaan masyarakat, serta kecenderungan masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah lebih besar menjelang HBKN. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras turut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pakan dan distribusi. Sementara itu, kenaikan harga beras didorong oleh masih tingginya permintaan di tengah proses distribusi dan penyerapan gabah yang masih berlangsung pada awal masa panen.

### 2.2.2. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

**Pada triwulan I 2026, kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami deflasi sebesar 0,20% (yoy) dengan andil sebesar 0,01% (yoy).** Tekanan deflasi pada kelompok ini tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,24% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan mulai melemahnya permintaan masyarakat setelah berakhirnya periode puncak konsumsi dan promosi musiman pada akhir tahun.

Subkelompok yang mengalami deflasi tahunan tertinggi, yaitu subkelompok alas kaki sebesar 0,91% (yoy) dan subkelompok pakaian sebesar 0,01% (yoy). Namun tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan secara signifikan.

**Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	-0,24	0,08	0,13	-0,2	-0,01	0,00	0,01	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 2.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga

**Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi pada triwulan I 2026.** Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 6,35% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,11% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,15% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan, yaitu tarif listrik 0,79% (yoy), kontrak rumah sebesar 0,03% (yoy), dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01% (yoy). Sementara tidak ada komoditas yang memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap deflasi tahunan.

Hal ini didorong oleh kenaikan pada tarif listrik seiring berakhirnya kebijakan diskon atau stimulus tarif listrik yang sebelumnya menahan laju harga pada periode triwulan sebelumnya, sehingga terjadi penyesuaian pada awal tahun 2026. Kondisi tersebut menjadikan tarif listrik sebagai komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini. Selain itu, inflasi pada kontrak rumah mencerminkan masih terbatasnya penyesuaian harga sewa hunian di tengah meningkatnya biaya pemeliharaan properti dan tingginya permintaan hunian di kawasan perkotaan. Sementara itu, kenaikan pada bahan bakar rumah tangga turut dipengaruhi oleh penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang mengikuti perkembangan harga energi global serta biaya distribusi yang masih relatif tinggi.

**Tabel 2.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	1,11	10,42	14,53	6,35	0,15	1,33	1,80	0,83

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022-100), diolah

### 2.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

**Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada triwulan I 2026 tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy).** Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Hal ini disebabkan oleh relatif stabilnya

**Tabel 2.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	0,17	0,19	-0,02	0,14	0,01	0,01	0,00	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022-100), diolah

harga berbagai perlengkapan dan peralatan rumah tangga di tengah pasokan yang memadai serta permintaan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan signifikan pada triwulan laporan.

### 2.2.5. Kelompok Kesehatan

**Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan I 2026 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Tekanan inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,57% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,01% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,75% (yoy) dengan andil 0,02% (yoy). Kelompok ini pada triwulan laporan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan sebesar 0,01%, dan tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan secara signifikan. Melandainya inflasi kelompok kesehatan menunjukkan bahwa kenaikan harga pada berbagai komoditas dan jasa kesehatan berlangsung lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh terjaganya pasokan obat-obatan, vitamin, dan perlengkapan kesehatan di tengah kelancaran distribusi serta stabilnya harga bahan baku farmasi. Selain itu, tidak terdapat kebijakan penyesuaian tarif layanan kesehatan maupun kenaikan harga yang signifikan pada jasa kesehatan rawat jalan, jasa laboratorium, dan layanan kesehatan lainnya selama periode laporan.

**Tabel 2.7. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	0,75	0,77	0,70	0,57	0,02	0,02	0,02	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022-100), diolah

### 2.2.6. Kelompok Transportasi

**Pada periode triwulan I 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,32% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,04% (yoy),** menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,82% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,11% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan ialah angkutan udara sebesar 0,04% (yoy); tarif kendaraan travel dan tarif kendaraan roda empat online masing-masing sebesar 0,02% (yoy); serta pelumas/oli mesin sebesar 0,01% (yoy). Kenaikan harga angkutan udara didorong oleh meningkatnya permintaan perjalanan masyarakat selama periode HBKN, khususnya pada rute-rute domestik. Sementara itu, kenaikan tarif kendaraan travel dan kendaraan roda empat online dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perjalanan antarkota dan dalam kota selama Ramadan dan Idulfitri, yang mendorong peningkatan permintaan jasa transportasi penumpang.

**Tabel 2.8. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	0,82	0,24	-0,48	0,32	0,11	0,03	-0,06	0,04

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 2.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 mencatatkan deflasi sebesar 0,18% (yoy) dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,01% (yoy), menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,43% (yoy) dengan andil sebesar 0,02% (yoy). Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi tahunan, 1 subkelompok mengalami inflasi tahunan dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi tahunan, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,77%. Subkelompok yang mengalami inflasi tahunan, yaitu subkelompok subkelompok jasa keuangan sebesar 0,22%.

**Deflasi pada kelompok ini dipengaruhi tren penurunan harga peralatan komunikasi yang masih berlanjut.** Kondisi ini mencerminkan berlanjutnya koreksi harga perangkat komunikasi seiring penurunan harga semikonduktor global yang menjadi komponen utama, di tengah dinamika industri teknologi yang sangat cepat (*fast moving product*). Persaingan ketat antarprodusen, khususnya melalui kanal *e-commerce* yang memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan toko fisik, semakin menekan harga jual. Selain itu, inovasi teknologi yang masif mendorong peluncuran produk baru dengan spesifikasi lebih tinggi namun harga lebih kompetitif, sehingga mempercepat depresiasi nilai produk lama.

Efisiensi rantai pasok dan skala produksi massal juga berperan dalam menurunkan biaya produksi, yang pada akhirnya menekan harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, meskipun subkelompok jasa keuangan mencatat inflasi tipis akibat kenaikan biaya layanan tertentu, kontribusinya tidak cukup untuk mengimbangi deflasi pada peralatan komunikasi. Kondisi harga berbagai perlengkapan dan peralatan rumah tangga di tengah pasokan yang memadai serta permintaan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan signifikan pada triwulan laporan.

**Tabel 2.9. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	-0,43	-0,37	-0,28	-0,18	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 2.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Inflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,71% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,01%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,46% (yoy) dengan andil yang turut meningkat menjadi sebesar 0,03% (yoy).

**Tabel 2.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	1,46	1,00	0,74	0,71	0,03	0,02	0,01	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 2.2.9. Kelompok Pendidikan

Pada triwulan I 2026, tekanan inflasi pada kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,98% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% (yoy). meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,82% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% (yoy). Permintaan terhadap jasa bimbingan belajar dan taman kanak-kanak terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sejak usia dini dan persaingan akademik yang semakin ketat membuat permintaan terhadap layanan bimbingan belajar dan TK berkualitas terus naik. Hal ini mendorong penyedia layanan untuk menaikkan tarif demi meningkatkan fasilitas, kualitas pengajar, dan metode pembelajaran yang lebih modern dan efektif.

**Tabel 2.11. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	0,82	0,98	0,98	0,98	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 2.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 mencatatkan inflasi sebesar 1,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy) terpantau menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,28% (yoy) dengan andil yang relatif stabil sebesar 0,11% (yoy).

Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi tahunan (% yoy) pada kelompok ini, yaitu ayam goreng sebesar 0,02%. Ayam goreng sebagai salah satu menu favorit cepat saji, tidak hanya diminati oleh konsumen individu tetapi juga menjadi pilihan utama dalam bisnis catering untuk memenuhi kebutuhan acara keluarga maupun wisata, terlebih saat periode HBKN Idul Fitri.

Tren gaya hidup yang semakin mengedepankan makanan praktis dan makan di luar rumah, baik untuk keperluan harian maupun rekreasi, turut memperkuat tekanan harga. Selain faktor permintaan, penyesuaian harga bahan baku seperti ayam ras dan tepung terigu juga mendorong kenaikan harga jual di restoran, kafe, dan layanan catering, sehingga mempertegas pengaruh kombinasi konsumsi domestik dan wisata terhadap inflasi kelompok ini.

**Tabel 2.12. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	1,28	1,08	1,09	1,17	0,11	0,09	0,09	0,1

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### 2.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan I 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 19,24% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,55% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 18,23% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,39% (yoy). Tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang andil sebesar 1,48% (yoy), lalu disusul oleh pasta gigi dan sikat gigi dengan andil masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Emas perhiasan memiliki peran penting dalam upacara adat, pernikahan, dan pemberian hadiah sebagai simbol status sosial dan keberuntungan. Tradisi ini membuat masyarakat cenderung membeli emas dengan kadar tinggi dan desain tradisional, yang harganya relatif lebih mahal. Emas juga merupakan alternatif diversifikasi penempatan dana, sehingga dapat menjadi pilihan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian pasar. Selain itu, terdapat tren kenaikan literasi keuangan di masyarakat, yang semakin mendorong pemahaman akan pentingnya diversifikasi investasi termasuk emas.

Di sisi lain, tekanan harga pasta gigi dan sikat tercatat meningkat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, fluktuasi harga bahan baku seperti fluorida, sorbitol, dan bahan kimia aktif lainnya di pasar global memicu produsen untuk menyesuaikan harga jual demi menjaga margin keuntungan. Kedua, biaya distribusi dan logistik meningkat, terutama akibat penyesuaian tarif transportasi dan energi, yang berdampak langsung pada harga akhir produk di tingkat konsumen. Ketiga, produsen juga menyesuaikan harga seiring peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk perawatan pribadi, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan kebersihan gigi dan kesehatan mulut. Terakhir, terdapat tren peralihan ke merek lokal atau membeli dalam jumlah besar untuk menghemat biaya sehingga menunjukkan adanya perubahan perilaku belanja akibat tekanan harga ini.

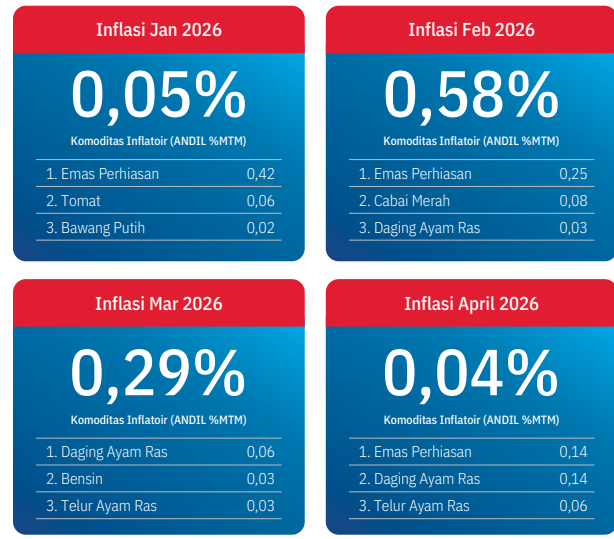
**Tabel 2.13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Des	Jan	Feb	Mar	Des	Jan	Feb	Mar
Inflasi Kelompok	18,23	22,86	22,93	19,24	1,39	1,77	1,83	1,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

## 2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tracking Inflasi Triwulan II 2026

**Gambar 2.1. Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

### Inflasi pada Januari 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari mencatatkan inflasi sebesar 0,05% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,49% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 4,81% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,42% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Januari 2026 mencatatkan inflasi sebesar 3,49% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,33% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 3,33% (ytd) dan berada pada batas tengah kisaran target inflasi 2,5±1% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l emas perhiasan (0,42%), tomat, bawang putih, dan kacang panjang (<0,01%). Harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian ekonomi global yang menyebabkan pergeseran aliran modal ke aset *safe haven*. Selanjutnya, peningkatan harga pangan hortikultura disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat menjelang bulan ramadan dan Idulfitri.

**Gambar 2.2. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Januari 2026**

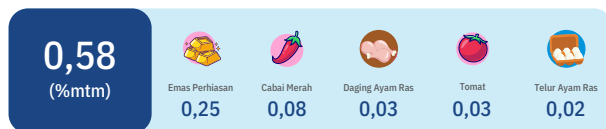
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Tekanan inflasi lebih lanjut pada bulan laporan ditahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,14% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,35% (mtm). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi bulanan, antara lain cabai merah sebesar 0,34% (mtm), bawang merah sebesar 0,05% (mtm), telur ayam ras sebesar 0,02% (mtm), dan wortel sebesar 0,01% (mtm).

### Inflasi pada Februari 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari mencatatkan inflasi sebesar 0,58% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,05% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya yang tercatat sebesar 2,76% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,25% (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) antara lain; emas perhiasan sebesar 0,25% (mtm); cabai merah sebesar 0,08% (mtm); dan daging ayam ras sebesar 0,03% (mtm). Peningkatan harga cabai merah dan daging ayam ras sejalan dengan terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang mengalami penurunan produksi akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian geopolitik.

**Gambar 2.3. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Februari 2026**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi yang lebih dalam pada bulan Februari 2026 ditahan oleh deflasi komoditas Transportasi sebesar 0,21% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,03% (mtm). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan, yaitu bensin sebesar 0,03% (mtm).

### Inflasi pada bulan Maret 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Maret mencatatkan inflasi sebesar 0,29% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh Pakaian dan Alas Kaki yang tercatat sebesar

1,11% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,04% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Maret 2026 mencatatkan inflasi sebesar 3,09% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,36% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l daging ayam ras sebesar 0,06% (mtm), bensin sebesar 0,07% (mtm), telur ayam ras sebesar 0,03% (mtm), angkutan antar kota dan tarif kendaraan travel masing-masing sebesar 0,02% (mtm). Tingginya permintaan masyarakat untuk komoditas daging ayam ras di tengah terbatasnya bibit ayam dan peningkatan harga pakan jagung mendorong tekanan harga komoditas daging ayam ras menjadi lebih tinggi. Diperlukan diversifikasi sumber protein di masyarakat agar mengutamakan sumber pangan lokal yang melimpah, terutama aneka ikan.

**Gambar 2.4. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Maret 2026**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi yang lebih dalam pada bulan Maret 2026 ditahan oleh deflasi kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,07% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,10. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan yaitu emas perhiasan 0,11% (mtm), cabai merah, ketimun, dan tarif kendaraan roda dua *online*.

### Inflasi Berlanjut pada April 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan April mencatatkan deflasi sebesar 0,04% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,29% (mtm). Tekanan deflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 1,40% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,13% (mtm). Secara tahunan, IHK April 2026 mencatatkan inflasi sebesar 1,63% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,09% (yoy).

Tekanan deflasi lebih lanjut pada bulan laporan ditahan oleh inflasi pada kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,58% (mtm) dan memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,01% (mtm).

**Gambar 2.5. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada April 2026**

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

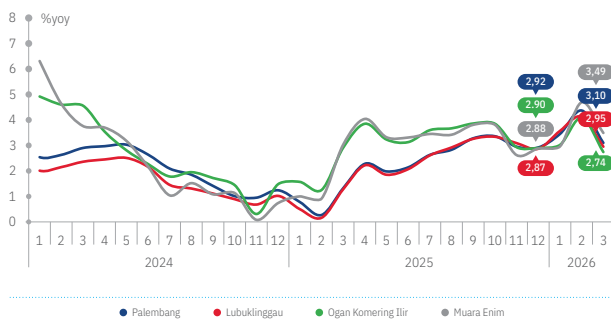
## Inflasi Triwulan II 2026 Diperkirakan Menurun

Dengan perkembangan inflasi di bulan April 2026 dan perkembangan harga komoditas sampai dengan Mei 2026, tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan akan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi didorong oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca periode Ramadan dan HBKN Idul Fitri. Namun demikian, tekanan inflasi pada triwulan II 2026 dapat didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara yang disebabkan adanya peningkatan harga avtur akibat gejolak harga minyak global. Kemudian, konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan minyak mentah dan mendorong kenaikan biaya bahan baku plastik seperti polietilena dan polipropilena. Selanjutnya, musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan akan berlangsung pada bulan Mei sehingga perlu diantisipasi guna memitigasi risiko gangguan produksi.

### 2.4. Analisis Inflasi Spasial

Berdasarkan Grafik 2-3, tingkat inflasi tahunan seluruh kabupaten/kota menunjukkan pergerakan yang searah. Tekanan inflasi tercatat mengalami tren menurun sejak Februari 2026 sampai dengan Maret 2026. Dari empat kab/kota sampel perhitungan IHK, 2 diantaranya mencatatkan inflasi tahunan yang di atas level inflasi provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 3,09% (yoy), yaitu Kota Palembang sebesar 3,10% (yoy) dan Kabupaten Muara Enim sebesar 3,49% (yoy).

Grafik 2.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

#### 2.4.1. Kota Palembang

Pada triwulan I 2026, inflasi Kota Palembang tercatat sebesar 3,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,92% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil tertinggi pada inflasi Kota Palembang, dengan inflasi sebesar 17,57% (yoy) dan andil 1,42% (yoy). Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang

terbesar pada kelompok ini dengan andil 1,48% (yoy) mengikuti perkembangan harga emas global dimana terjadi pergeseran aliran modal ke aset *safe haven*. Selain faktor global, dimensi budaya dan sosial memainkan peran penting dalam tingginya permintaan emas perhiasan di Palembang. Emas perhiasan menjadi simbol status dan tradisi bagi masyarakat. Dalam budaya lokal, emas sering menjadi bagian dari prosesi pernikahan, acara adat, dan momen perayaan, sehingga permintaan tetap kuat meskipun harga meningkat.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi kota Palembang yang mencatatkan inflasi sebesar 5,04% (yoy) dengan andil 0,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,85% (yoy) dengan andil 0,14% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas tarif listrik dengan andil sebesar 0,75% (yoy) serta kontrak rumah sebesar 0,04% (yoy).

Disisi lain, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga terhadap inflasi Kota Palembang, yang mencatatkan inflasi sebesar 2,34% (yoy) dengan andil 0,63% (yoy), turun signifikan dibandingkan triwulan IV yang sebesar 4,25% (yoy) dengan andil 0,12% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain daging ayam ras sebesar 0,20% (yoy); beras sebesar 0,15% (yoy); ikan patin dan mi kering instan masing-masing sebesar 0,07% (yoy); telur ayam ras sebesar 0,06% (yoy); jeruk dan tomat masing-masing sebesar 0,05% (yoy); sigaret kretek mesin (SKM) dan pisang masing masing sebesar 0,04% (yoy); ikan salam, pepaya, makanan ringan/snack, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, dan minyak goreng masing-masing sebesar 0,03% (yoy); ikan dencis, ikan sarden segar, taughe/kecambah, sigaret kretek tangan (SKT), dan apel masing-masing sebesar 0,02% (yoy); serta kol putih/kubis sebesar 0,01% (yoy).

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Palembang pada triwulan laporan adalah emas perhiasan sebesar 1,39% (yoy), tarif listrik sebesar 0,75% (yoy), daging ayam ras sebesar 0,20% (yoy), beras sebesar 0,15% (yoy), dan ikan patin sebesar 0,07% (yoy). Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan, diantaranya cabai merah sebesar 0,11% (yoy), cabai rawit sebesar 0,08% (yoy), bawang merah sebesar 0,08% (yoy), bawang putih sebesar 0,06% (yoy), dan tarif kendaraan roda 2 *online* sebesar 0,05% (yoy).

**Tabel 2.14. Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	IV 2025	Jan	Feb	Mar	IV 2025	Jan	Feb	Mar
UMUM	2,92	3,45	4,37	3,1	2,92	3,45	4,37	3,1
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,25	0,43	2,59	2,34	1,12	0,11	0,68	0,63
Pakaian dan Alas Kaki	0,06	0,19	0,10	0,79	0,00	0,01	0,01	0,04
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,85	9,33	12,65	5,04	0,14	1,38	1,82	0,77
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,10	0,07	-0,15	0,06	0,01	0,00	-0,01	0,00
Kesehatan	0,82	0,80	0,70	0,53	0,02	0,02	0,02	0,01
Transportasi	0,98	0,35	-0,39	0,43	0,14	0,05	-0,06	0,06
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,51	-0,51	-0,38	-0,26	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,95	0,91	0,60	0,54	0,02	0,02	0,01	0,01
Pendidikan	0,77	0,96	0,96	0,96	0,05	0,07	0,07	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,42	1,33	1,30	1,32	0,12	0,11	0,11	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	17,40	21,96	21,65	17,57	1,33	1,71	1,74	1,42

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.15. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kota Palembang**

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	1,39	Cabai Merah	0,11
Tarif Listrik	0,75	Cabai Rawit	0,08
Daging Ayam Ras	0,20	Bawang Merah	0,08
Beras	0,15	Bawang Putih	0,06
Ikan Patin	0,07	Tarif Kendaraan Roda 2 Online	0,05

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

## 2.4.2. Kota Lubuklinggau

Pada triwulan I 2026, inflasi Kota Lubuklinggau tercatat sebesar 2,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,87% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mencatat inflasi sebesar 16,16% (yoy) dengan andil 1,29% (yoy), naik dibandingkan triwulan IV yang sebesar 15,84% (yoy) dengan andil 1,22% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain emas perhiasan (1,16%), tarif gunting rambut anak (0,02%), sabun mandi (0,02%), pasta gigi (0,01%), dan tarif gunting rambut wanita (0,01%). Komoditas emas perhiasan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi di kelompok ini dengan andil sebesar 1,16% (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan di Lubuklinggau dipengaruhi oleh tren harga emas global yang cenderung meningkat serta permintaan masyarakat yang tetap kuat meskipun terdapat fluktuasi harga di pasar internasional. Namun, intensitas kenaikan harga di Lubuklinggau relatif lebih moderat dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Palembang.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang andil tertinggi kedua dengan inflasi sebesar 7,50% (yoy) dan andil 1,03% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,41% (yoy) dengan andil 0,21% (yoy). Berlanjutnya tekanan harga pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik dengan andil 0,13% (yoy), sewa rumah 0,03% (yoy), kontrak rumah sebesar 0,03% (yoy), dan semen 0,01% (yoy).

Selanjutnya, kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi Kota Lubuklinggau, dengan inflasi sebesar 2,34% (yoy) dan andil 0,05% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,51% (yoy) dengan andil 0,05% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain buku tulis bergaris sebesar 0,03% (yoy), dan tas sekolah sebesar 0,01% (yoy).

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Lubuklinggau pada triwulan laporan adalah emas perhiasan (1,16%), tarif listrik (0,97%), daging ayam ras (0,16%), sigaret kretek mesin (SKM) (0,08%), sigaret kretek

**Tabel 2.16. Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	IV 2025	Jan	Feb	Mar	IV 2025	Jan	Feb	Mar
UMUM	2,87	3,57	4,13	2,95	2,87	3,57	4,13	2,95
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,05	0,56	0,49	0,26	0,92	0,18	0,15	0,08
Pakaian dan Alas Kaki	1,06	1,06	1,09	1,96	0,06	0,06	0,06	0,11
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,41	10,99	15,71	7,5	0,21	1,48	2,03	1,03
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,84	1,46	0,75	1,01	0,14	0,11	0,06	0,08
Kesehatan	1,88	1,45	1,43	1,45	0,05	0,04	0,04	0,04
Transportasi	0,50	0,34	-0,08	0,51	0,06	0,04	-0,01	0,06
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,51	-0,43	-0,30	-0,20	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,51	2,36	2,34	2,34	0,05	0,05	0,05	0,05
Pendidikan	1,51	1,51	1,51	1,51	0,08	0,08	0,08	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,41	1,57	1,77	1,87	0,11	0,12	0,13	0,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,84	18,35	19,40	16,16	1,22	1,43	1,55	1,29

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.17. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kota Lubuklinggau**

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	1,16	Cabai Merah	0,27
Tarif Listrik	0,97	Bawang Merah	0,16
Daging Ayam Ras	0,16	Bawang Putih	0,12
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,08	Cabai Rawit	0,11
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,08	Kentang	0,04

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

tangan (0,08%). Sementara itu, lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah cabai merah (0,27%), bawang merah (0,16%), bawang putih (0,12%), cabai rawit (0,11%), dan kentang (0,04%).

### 2.4.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

**Inflasi Kab. OKI pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 2,74% (yoy), menurun dibandingkan Triwulan III yang sebesar 2,90% (yoy).** Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang tercatat sebesar 21,97% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,63% (yoy), naik dibandingkan Triwulan IV yang sebesar 19,38% (yoy) dengan andil 1,39% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini tetap emas perhiasan, dengan andil sebesar 1,47% (yoy). Tingginya andil inflasi komoditas tersebut sejalan dengan tren kenaikan harga emas global yang mendorong peningkatan harga emas di tingkat domestik. Selain dipengaruhi faktor harga global, permintaan masyarakat terhadap emas perhiasan juga tetap kuat karena emas masih dipandang sebagai instrumen penyimpanan nilai (*store of value*) yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), emas perhiasan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga

menjadi salah satu bentuk tabungan masyarakat yang mudah dicairkan. Karakteristik emas yang memiliki nilai relatif stabil, likuiditas tinggi, serta dapat diperjualbelikan dengan cepat menjadikannya pilihan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, maupun keperluan sosial dan adat. Kondisi tersebut turut menopang tingginya permintaan emas perhiasan dan mendorong peningkatan harganya pada periode laporan.

Selanjutnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi, dengan inflasi sebesar 10,97% (yoy) dan andil tahunan sebesar 0,89% (yoy), meningkat drastis dibandingkan Triwulan IV yang sebesar 2,87% (yoy) dengan andil 0,25% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini (andil % yoy) adalah bahan bakar rumah tarif listrik sebesar 0,87% (yoy).

Kelompok dengan andil tertinggi ketiga adalah Rekreasi, Olahraga dan Budaya yang tercatat sebesar 3,22% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 0,05% (yoy), turun dibandingkan Triwulan IV yang sebesar 3,64% (yoy) dengan andil 0,06% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tertinggi tahunan di kelompok ini adalah tas sekolah.

**Tabel 2.18. Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	IV 2025	Jan	Feb	Mar	IV 2025	Jan	Feb	Mar
UMUM	2,90	3,02	4,09	2,74	2,90	3,02	4,09	2,74
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,63	-0,25	0,99	0,81	1,11	-0,11	0,44	0,35
Pakaian dan Alas Kaki	-2,02	-0,63	-0,44	-4,95	-0,12	-0,04	-0,03	-0,29
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,87	16,66	23,56	10,97	0,25	1,3	1,74	0,89
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	0,09	0,1	0,20	0,00	0,01	0,01	0,01
Kesehatan	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportasi	0,31	-0,12	-0,76	-0,23	0,03	-0,01	-0,08	-0,02
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,08	-0,21	-0,21	-0,16	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	3,64	3,64	3,22	3,22	0,06	0,06	0,05	0,05
Pendidikan	1,42	1,42	1,42	1,42	0,03	0,03	0,03	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,58	0,7	0,79	1,04	0,15	0,07	0,08	0,1
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	19,38	23,81	25,13	21,97	1,39	1,72	1,86	1,63

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.19. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kab. OKI**

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	1,47
Tarif Listrik	0,87
Daging Ayam Ras	0,33
Beras	0,23
Tomat	0,10

Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Cabai Rawit	0,29
Ikan Sepat Siam	0,2
Bawang Putih	0,16
Bawang Merah	0,15
Cabai Merah	0,10

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan (% yoy) di Kab. OKI pada Triwulan I 2026 adalah emas perhiasan sebesar 1,47% (yoy), tarif listrik sebesar 0,87% (yoy), daging ayam ras sebesar 0,33% (yoy), beras sebesar 0,23% (yoy), dan tomat sebesar 0,10% (yoy). Sedangkan lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah cabai rawit sebesar 0,24% (yoy), ikan sepat siam sebesar 0,20% (yoy), bawang putih sebesar 0,16% (yoy), bawang merah sebesar 0,15% (yoy), dan cabai merah sebesar 0,10% (yoy).

#### 2.4.4. Kabupaten Muara Enim

**Inflasi Kab. Muara Enim pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,49% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang sebesar 2,88% (yoy).** Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 25,89% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 2,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 22,06% (yoy) dengan andil 1,77% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini tetap emas perhiasan dengan andil sebesar 2,13% (yoy) mengikuti tren kenaikan harga emas global dan permintaan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen tabungan.

Kelompok dengan andil inflasi tertinggi kedua di Kab. Muara Enim adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, yang mencatat inflasi 12,35% (yoy) dengan andil tahunan 1,04% (yoy), turun signifikan dari Triwulan IV yang sebesar 1,19% (yoy) dengan andil 0,11% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini adalah tarif listrik sebesar 0,80% (yoy), bahan bakar rumah tangga 0,21% (yoy), sewa rumah 0,03% (yoy) dan semen 0,01% (yoy).

Selanjutnya, kelompok Kesehatan memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi, dengan inflasi 0,11% (yoy) dan andil tahunan 0,02% (yoy), menurun tipis dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 0,84% (yoy) dengan andil 0,02% (yoy). Tekanan harga di kelompok ini terutama disumbang oleh tarif dokter umum sebesar 0,01% (yoy). Kenaikan tarif dokter umum pada periode Triwulan I 2026 terutama dipengaruhi oleh penyesuaian biaya operasional layanan kesehatan, termasuk peningkatan biaya praktik, biaya tenaga kesehatan pendukung, serta biaya pemeliharaan fasilitas layanan. Meningkatnya permintaan layanan kesehatan primer terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan turut memberikan ruang bagi penyesuaian tarif di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.20. Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2026 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	IV 2025	Jan	Feb	Mar	IV 2025	Jan	Feb	Mar
UMUM	2,88	2,96	4,69	3,49	2,88	2,96	4,69	3,49
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,25	-0,99	1,62	0,50	0,93	-0,41	0,69	0,21
Pakaian dan Alas Kaki	0,00	0,00	0,55	0,52	0,00	0,00	0,03	0,03
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,19	12,98	21,16	12,35	0,11	1,09	1,68	1,04
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,16	0,22	0,08	-0,04	-0,01	0,01	0,00	0,00
Kesehatan	0,84	1,34	1,31	1,11	0,02	0,03	0,02	0,02
Transportasi	0,40	-0,21	-1,01	-0,02	0,04	-0,02	-0,11	0,00
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,33	0,20	0,20	0,20	-0,02	0,01	0,01	0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,00	-1,98	-1,98	-1,98	0,02	-0,04	-0,04	-0,04
Pendidikan	0,42	0,42	0,42	0,42	0,01	0,01	0,01	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,16	0,16	0,19	0,31	0,01	0,01	0,02	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	22,06	28,14	28,44	25,89	1,77	2,27	2,38	2,18

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

**Tabel 2.21. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan I 2026 Kab. Muara Enim**

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	2,13	Cabai Merah	0,37
Tarif Listrik	0,80	Bawang Putih	0,27
Daging Ayam Ras	0,35	Bawang Merah	0,21
Beras	0,21	Cabai Rawit	0,10
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,21	Bensin	-

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan (% yoy) di Kab. Muara Enim pada triwulan IV adalah emas perhiasan (2,13%), tarif listrik (0,80%), daging ayam ras (0,35%), beras (0,21%), dan bahan bakar rumah tangga (0,21%). Sedangkan lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah cabai merah (0,37%), bawang putih (0,27%), bawang merah (0,21%), cabai rawit (0,10%), dan bensin (tidak disebutkan dalam BRS).

## 2.5. Upaya Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Selatan terus melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian Inflasi 4K<sup>1</sup>. Upaya yang telah dilakukan sepanjang periode laporan, diantaranya sebagai berikut:

Pilar Pengendalian Inflasi	Upaya Yang Dilakukan
<b>Keterjangkauan Harga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan 299 OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP se-Sumatera Selatan sejak awal tahun 2026 hingga bulan Maret 2026. Salah satunya adalah pelaksanaan Pasar Murah Provinsi Sumatera Selatan yang turut bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menjelang HBKN Idul Fitri 2026;</li> <li>2. Penjualan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau melalui 1.075 Rumah Pangan Kita (RPK) yang bekerja sama dengan Bulog;</li> <li>3. Pemasangan spanduk Minyak Kita dan HET di berbagai titik dan distributor</li> </ol>
<b>Ketersediaan Pasokan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring rutin dan sidak pasar sebanyak 36 kali hingga Maret 2026 terhadap produsen dan distributor untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok;</li> <li>2. Panen raya jagung kuartal 1 dengan luas lahan sebesar +270 Ha dengan estimasi total panen sebanyak 1080 ton.</li> <li>3. <i>Business Matching</i> KUR Alsintan kepada Poktan di Sumatera Selatan oleh Perbankan dengan total nominal sebanyak 1,29 Miliar Rupiah.</li> </ol>
<b>Kelancaran Distribusi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian subsidi ongkos angkutan (termasuk melalui Fasilitas Distribusi Pangan/FDP), dan subsidi operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan OPM di seluruh wilayah Sumatera Selatan sebanyak 77 kali dengan total berat komoditas sebanyak 47,92 ton.</li> <li>2. Realisasi KAD melalui pengiriman 22,67 Ton Komoditas Bawang Merah dari Sumatera Barat.</li> </ol>

1. Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif

Pilar Pengendalian Inflasi	Upaya Yang Dilakukan
Komunikasi Efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilis infografis dan siaran pers inflasi secara berkala;</li> <li>2. Publikasi informasi jadwal OPM/GPM serta jaringan penyalur SPHP melalui media sosial dan kanal informasi lainnya;</li> <li>3. Launching Program GPIPS 2026.</li> <li>4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin TPID setiap awal minggu;</li> <li>5. <i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID se-Sumatera Selatan dalam rangka HBKN Idul Fitri 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan;</li> <li>6. <i>Capacity building</i> dan rapat koordinasi mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Fitri 2026</li> <li>7. Rakor Pengamanan SPHP Menjelang HBKN Idul Fitri</li> <li>8. Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera 2026</li> <li>9. Rakor Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se Prov. Sumsel</li> <li>10. HLM &amp; Rakor TPID Kab Ogan Ilir</li> </ol>

Sumber: Rekap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Selatan

Evaluasi program pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, serta langkah penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2026 dapat dirangkum sebagai berikut:

#### A. Keterjangkauan harga

Hingga Triwulan I 2026, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah tercatat sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali, meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 109 kali. Peningkatan ini dikarenakan gencarnya upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi utamanya pada triwulan I yang terdapat tren peningkatan konsumsi dampak HBKN Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri.

Selain melalui OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP, TPID Sumatera Selatan selalu memastikan keterjangkauan harga komoditas melalui 1.075 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Palembang, Lubuk Linggau, Lahat, dan OKU. RPK yang merupakan mitra Bulog sehingga memperoleh pasokan komoditas langsung dari Bulog dengan harga lebih terjangkau. Jumlah RPK ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1003 RPK.

Selain itu, distribusi pangan dengan harga terjangkau juga didukung melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok) milik Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov. Sumatera Selatan, Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya, serta OKI-Mart dan OKI-Jek milik Pemerintah Daerah Kab. OKI dan BUMD Bande Seguguk.

Kombinasi intervensi melalui OPM/GPM/Pasar Murah, RPK Bulog, dan jaringan lainnya, terbukti mampu menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas penyumbang inflasi. Sepanjang Triwulan I 2026, beberapa komoditas strategis bahkan menunjukkan penurunan harga dibandingkan Triwulan IV 2025, antara lain cabai merah dan minyak goreng, seperti yang terlihat pada Tabel 2-23.

#### B. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan pada akhir periode Triwulan I 2026 tercatat mengalami kenaikan untuk komoditas cabai merah dan bawang merah, namun mengalami penurunan untuk komoditas beras dibandingkan dengan akhir periode Triwulan IV 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2-24.

Di sisi lain, TPID Provinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti panen raya jagung triwulan I secara serentak yang turut membantu

Komoditas	Harga Rata-Rata Tw II 2025	Harga Rata-Rata Tw III 2025	Harga Rata-Rata Tw IV 2025	Harga Rata-Rata Tw I 2026	Growth Tw I 2026 dibanding Tw IV 2025
Cabai Merah	Rp 52,100	Rp 42,016	Rp 65,683	Rp 49,700	-24.33%
Minyak Goreng	Rp 20,617	Rp 20,867	Rp 20,900	Rp 20,867	-0.16%

Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah

Komoditas	Ketersediaan Pasokan Pada Akhir TW IV 2025	Ketersediaan Pasokan Pada Akhir TW I 2026	Growth
Beras	511.424,99 Ton	252.374,09 Ton	-102,65%
Bawang Merah	689,22 Ton	2.864,12 Ton	75,94%
Cabai	2.748,35 Ton	4.048,67 Ton	32,12%

menahan laju inflasi harga jagung yang merupakan salah satu bahan baku pakan ternak ayam serta harga telur ayam yang cenderung naik seiring peningkatan konsumsi pada momen HBKN Idul Fitri. Selain itu telah dilakukan pula *Business Matching* untuk Kredit Usaha Rakyat Alat dan Mesin Pertanian yang harapannya dapat mendukung ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi pangan.

### C. Kelancaran Distribusi

Berdasarkan data perkembangan margin distribusi harga pada triwulan I 2026, terlihat adanya perbedaan (disparitas) harga yang cukup bervariasi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pasar untuk 9 komoditas utama penyumbang inflasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2-25.

Komoditas / Margin Distribusi Harga		2025			2026		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Beras	Produsen	Rp12.250,00	Rp12.150,00	Rp12.100,00	Rp12.100,00	Rp12.500,00	Rp12.250,00
	Pasar	Rp15.500,00	Rp15.500,00	Rp15.500,00	Rp15.500,00	Rp15.500,00	Rp15.650,00
	Selisih Harga	Rp3.250,00	Rp3.350,00	Rp3.400,00	Rp3.400,00	Rp3.000,00	Rp3.400,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.333,33			Rp3.266,67
Daging Ayam	Produsen	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp34.000,00	Rp36.000,00	Rp36.000,00	Rp38.000,00
	Pasar	Rp38.000,00	Rp35.750,00	Rp37.150,00	Rp38.500,00	Rp38.000,00	Rp38.000,00
	Selisih Harga	Rp3.000,00	Rp750,00	Rp3.150,00	Rp2.500,00	Rp2.000,00	Rp0,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp2.300,00			Rp1.500,00
Daging Sapi	Produsen	Rp130.000,00	Rp127.500,00	Rp127.500,00	Rp120.000,00	Rp127.500,00	Rp140.000,00
	Pasar	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp145.000,00	Rp140.000,00	Rp142.500,00
	Selisih Harga	Rp10.000,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00	Rp25.000,00	Rp12.500,00	Rp2.500,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp11.666,67			Rp13.333,33
Telur Ayam	Produsen	Rp24.500,00	Rp26.650,00	Rp25.200,00	Rp26.750,00	Rp24.750,00	Rp26.500,00
	Pasar	Rp27.960,00	Rp29.200,00	Rp28.950,00	Rp30.400,00	Rp29.400,00	Rp29.500,00
	Selisih Harga	Rp3.450,00	Rp2.550,00	Rp3.750,00	Rp3.650,00	Rp4.650,00	Rp3.000,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.250,00			Rp3.766,67
Bawang Merah	Produsen	Rp41.650,00	Rp41.650,00	Rp36.650,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
	Pasar	Rp37.000,00	Rp36.500,00	Rp41.250,00	Rp45.750,00	Rp43.900,00	Rp41.500,00
	Selisih Harga	-Rp4.650,00	-Rp5.150,00	Rp4.600,00	Rp5.750,00	Rp3.900,00	Rp1.500,00
	Rata-Rata Selisih Harga			-Rp1.733,33			Rp3.716,67
Cabai Merah	Produsen	Rp48.350,00	Rp28.200,00	Rp41.500,00	Rp66.700,00	Rp22.500,00	Rp27.500,00
	Pasar	Rp63.750,00	Rp61.100,00	Rp72.200,00	Rp55.200,00	Rp47.900,00	Rp46.000,00
	Selisih Harga	Rp15.400,00	Rp32.900,00	Rp30.700,00	-Rp11.500,00	Rp25.400,00	Rp18.500,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp26.333,33			Rp10.800,00
Cabai Rawit	Produsen	Rp30.700,00	Rp14.500,00	Rp27.500,00	Rp65.000,00	Rp45.700,00	Rp47.500,00
	Pasar	Rp45.750,00	Rp39.600,00	Rp56.400,00	Rp77.150,00	Rp63.100,00	Rp60.700,00
	Selisih Harga	Rp15.050,00	Rp25.100,00	Rp28.900,00	Rp12.150,00	Rp16.400,00	Rp13.200,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp23.016,67			Rp13.916,67
Minyak Goreng	Produsen	Rp17.250,00	Rp17.300,00	Rp17.200,00	Rp17.200,00	Rp17.300,00	Rp17.700,00
	Pasar	Rp20.900,00	Rp20.900,00	Rp20.900,00	Rp20.800,00	Rp20.900,00	Rp20.900,00
	Selisih Harga	Rp3.650,00	Rp3.600,00	Rp3.700,00	Rp3.600,00	Rp3.600,00	Rp3.200,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.650,00			Rp3.466,67
Gula Pasir	Produsen	Rp14.600,00	Rp14.600,00	Rp14.800,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp16.500,00
	Pasar	Rp18.250,00	Rp18.250,00	Rp18.250,00	Rp18.250,00	Rp18.400,00	Rp18.250,00
	Selisih Harga	Rp3.650,00	Rp3.650,00	Rp3.450,00	Rp3.250,00	Rp3.400,00	Rp1.750,00
	Rata-Rata Selisih Harga			Rp3.583,33			Rp2.800,00

Pada Triwulan I 2026, margin disparitas harga di Sumatera Selatan menunjukkan pola yang relatif terkendali dan menunjukkan tren yang relatif mengecil namun masih terdapat kenaikan disparitas pada komoditas telur ayam, daging sapi, dan bawang merah bila dibandingkan Tw IV 2025. Selain Margin pada ketiga komoditas tersebut, komoditas lainnya menunjukkan penurunan gap yang cukup signifikan, sehingga mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen. Kondisi ini umumnya sejalan dengan pengaruh peningkatan permintaan pada ketiga komoditas tersebut pada momen HBKN Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri yang keseluruhannya berada pada Tw I 2026.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui strategi kelancaran distribusi, TPID Sumatera Selatan turut berperan melalui pemberian subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. Dukungan ini ditujukan untuk menekan biaya transportasi dan distribusi pangan, memperlancar alur distribusi dari produsen ke konsumen, serta menjaga keterjangkauan harga di pasar.

Selain itu, telah dilakukan realisasi atas Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat, Pemerintah Kab. Tanah Datar, dan Pemerintah Kab. Solok melalui pengiriman komoditas bawang merah sebanyak 22,67 ton. Melalui langkah-langkah kolaboratif tersebut, diharapkan disparitas harga dapat semakin diminimalkan, sehingga stabilitas harga pangan strategis di Sumatera Selatan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

#### D. Komunikasi Efektif

Upaya pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi kelembagaan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, *high level meeting* (HLM), maupun *capacity building* TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat. Pada Triwulan I 2026, TPID Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas perkembangan inflasi terkini serta langkah-langkah pengendaliannya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sepanjang periode laporan, TPID se-Sumatera Selatan telah melaksanakan HLM, *capacity building*, dan rapat koordinasi TPID antara lain melalui:

- *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Sumatera Selatan dalam rangka HBKN Idul Fitri 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- *Capacity Building* dan rapat koordinasi mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Fitri 2026.
- Rakor Pengamanan SPHP Menjelang HBKN Idul Fitri.

- *Launching* Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 yang merupakan penguatan dari Program GNPIP.
- Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera 2026.
- Rakor Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se Prov. Sumsel
- HLM & Rakor TPID Kab Ogan Ilir Tahun 2026

Lebih lanjut, TPID Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi terkait inflasi maupun upaya pengendalian inflasi, termasuk di dalamnya mengenai bijak belanja, melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain siaran pers di media cetak dan online, konten media sosial, pelaksanaan podcast, hingga sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, TPID Sumatera Selatan juga secara rutin menginformasikan rencana pelaksanaan operasi pasar murah dan jaringan penyalur SPHP setiap bulan melalui media cetak maupun media sosial sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga ekspektasi masyarakat.

BOKS 3 :

## InkuBI Sultan Muda 2026: Kolaborasi Strategis Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mendorong UMKM Go Digital

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan secara resmi membuka program InkuBI Sultan Muda Sumatera Selatan 2026 pada 24 April 2026. Pembukaan INKUBI Sultan Muda dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono, Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin Susanto, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Selatan Hengky Putrawan, Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan M Taufiq, Kepala Dinas Perdagangan Luar Negeri Henny Yulianti, dan Pengawas Tim UMKM dari DJPb Suntari.

InkuBI Sultan Muda 2026 merupakan langkah strategis untuk membekali UMKM tentang penguatan dasar bisnis hingga mampu mandiri dalam memasarkan produk dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama pemasaran. Program ini diikuti oleh 150 pelaku UMKM terpilih dari total 604 UMKM pendaftar yang telah melewati seleksi ketat oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kewirausahaan muda yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan.

Peserta InkuBI Sultan Muda 2026 mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman (55%) disusul sektor fashion (15%), jasa (11%), dan craft (9%). Komposisi ini menunjukkan sektor konsumsi merupakan sektor yang diminati oleh pelaku UMKM dan juga memiliki potensi pasar yang luas di Sumatera Selatan. Melalui program ini, peserta didorong untuk memanfaatkan media sosial sebagai etalase pemasaran, dan marketplace sebagai kanal

penjualan. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini, antara lain UMKM mampu melakukan pemasaran produk lokal tidak lagi terbatas pada lingkungan sekitar, melainkan memanfaatkan digitalisasi untuk menembus jangkauan yang lebih luas. Selain itu, peserta juga diberikan pelatihan tentang manajemen keuangan dan pemanfaatan kanal transaksi pembayaran digital untuk meningkatkan peluang mendapatkan akses pembiayaan.

Pada rangkaian kegiatan INKUBI Sultan Muda, peserta akan mengikuti pembekalan secara intensif selama 4 (empat) hari, yang kemudian dilanjutkan dengan proses kurasi berdasarkan tingkat kemandirian usahanya. Bagi peserta terpilih akan mendapatkan pendampingan lebih lanjut secara intensif selama 2 (dua bulan).

Gubernur Herman Deru, dalam arahannya, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak wirausahawan muda yang inovatif, tangguh, dan berkomitmen dalam menghadapi dinamika dunia usaha. Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Selatan, Bambang Pramono menegaskan bahwa InkuBI Sultan Muda dirancang sebagai wadah pengembangan kapasitas UMKM muda secara menyeluruh. Tidak hanya fokus pada pemasaran digital, program ini juga menyentuh aspek penting lain seperti legalitas, perizinan, hingga akses pembiayaan.



Gambar Boks C.1. Pembukaan InkuBI Sultan Muda 2026



Gambar Boks C.2. Pembekalan InkuBI Sultan Muda tentang Panduan Praktis Manajemen Keuangan UMKM Terpadu

Pelaksanaan program ini turut melibatkan akademisi dan praktisi sebagai pendamping dan pengarah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausahawan muda yang selama ini belum tergarap maksimal. Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, adalah kunci untuk melahirkan pelaku usaha yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing.



Gambar Boks C.3. Penutupan InkuBI Sultan Muda 2026

BOKS 4 :

## Memperkuat Ekosistem Digital Daerah: Sinergi TP2DD Sumatera Selatan dan SIGUNTANG



Gambar 1. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dalam kegiatan *Capacity Building* dan *Coaching Clinic* Pengisian Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan, serta launching SIGUNTANG

Upaya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Selatan kembali menunjukkan langkah maju yang signifikan. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan kegiatan *Capacity Building* dan *Coaching Clinic* Pengisian Evaluasi Kinerja (*Championship*) TP2DD se-Sumatera Selatan yang dirangkaikan dengan peluncuran inovasi terbaru, yaitu Sistem Informasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG), pada 7 April 2026 di Palembang.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan daerah. Kehadiran berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, kementerian, aparat penegak hukum, hingga perbankan daerah, mencerminkan komitmen kolektif dalam mendukung agenda digitalisasi yang berkelanjutan.

### Capaian Membanggakan dan Tantangan ke Depan

Sumatera Selatan patut berbangga atas capaian yang diraih pada tahun sebelumnya. Dalam ajang *Championship* TP2DD 2025, provinsi ini berhasil meraih predikat sebagai TP2DD Terbaik I di wilayah Sumatera. Prestasi ini menjadi indikator kuat bahwa implementasi ETPD di Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, baik dari sisi adopsi kanal digital maupun dari aspek tata Kelola.



Gambar 2. Sinergi TP2DD Provinsi Sumatera Selatan bersama Forkopimda dan instansi vertikal dalam memperkuat percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Namun demikian, capaian tersebut bukanlah titik akhir. Justru, keberhasilan ini menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Tantangan ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas transaksi digital, tetapi juga pada kualitas implementasi, integrasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan.

Dalam konteks ini, kegiatan *capacity building* dan *coaching clinic* menjadi sangat relevan. Tidak sekadar memberikan pemahaman teknis terkait pengisian evaluasi kinerja TP2DD, kegiatan ini juga mendorong adanya standardisasi pelaporan yang lebih akurat, komprehensif, dan mencerminkan kondisi riil di masing-masing daerah.



Gambar 3. Peluncuran inovasi SIGUNTANG menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi TP2DD Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat melalui percepatan digitalisasi transaksi daerah.

## Peran Strategis TP2DD dalam Transformasi Digital

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memiliki peran sentral sebagai motor penggerak implementasi ETPD. Di tingkat nasional, program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sementara di tingkat daerah diketuai langsung oleh kepala daerah.

Struktur ini menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar program teknis, melainkan bagian dari agenda strategis nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat serta kolaborasi lintas sektor.

Melalui TP2DD, berbagai inisiatif digitalisasi dapat diorkestrasi secara lebih terarah, mulai dari elektronifikasi pendapatan daerah (seperti pajak dan retribusi) hingga belanja pemerintah. Lebih dari itu, TP2DD juga berfungsi sebagai forum koordinasi yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah, regulator, dan industri keuangan.

## SIGUNTANG: Inovasi Lokal dengan Dampak Nyata

Salah satu highlight utama dalam kegiatan ini adalah peluncuran SIGUNTANG, sebuah inovasi yang menjadi bukti nyata komitmen Sumatera Selatan dalam menghadirkan solusi digital yang relevan dan berdampak langsung.

SIGUNTANG merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung proses penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara terintegrasi. Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya untuk menelusuri objek pajak dengan tunggakan secara mandiri, cepat, dan akurat. Dengan pendekatan yang ramah pengguna, SIGUNTANG diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penagihan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat.

Keunikan SIGUNTANG dibandingkan dengan praktik di daerah lain terletak pada integrasi data dan pendekatan proaktif dalam penagihan. Sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis, memungkinkan

identifikasi potensi penerimaan daerah yang sebelumnya belum tergarap secara optimal.

Selain itu, SIGUNTANG juga membuka peluang pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan

Keberhasilan implementasi ETPD dan inovasi seperti SIGUNTANG tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi yang erat antar berbagai pihak. Pemerintah daerah sebagai pengampu utama memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Di sisi lain, Bank Indonesia berperan sebagai katalisator yang mendorong adopsi sistem pembayaran digital.

Kementerian dan lembaga terkait turut memberikan penguatan dari sisi kebijakan dan koordinasi nasional, sementara perbankan daerah menjadi mitra strategis dalam penyediaan infrastruktur dan layanan keuangan.

Sinergi ini menjadi semakin penting di tengah dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Tanpa koordinasi yang baik, upaya digitalisasi berpotensi berjalan parsial dan tidak optimal.

## Meningkatkan Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam kegiatan ini adalah pentingnya meningkatkan kualitas implementasi ETPD. Selama ini, indikator keberhasilan seringkali diukur dari jumlah transaksi atau nilai nominal yang terdigitalisasi. Namun ke depan, fokus perlu bergeser pada aspek yang lebih substansial, seperti integrasi sistem, keamanan data, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam hal ini, pengisian evaluasi kinerja TP2DD menjadi instrumen penting. Data yang akurat dan komprehensif tidak hanya diperlukan untuk keperluan penilaian, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi ke depan.

Melalui *coaching clinic*, peserta diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai indikator penilaian, metodologi pengisian, serta best practices dari daerah lain. Dengan demikian, diharapkan kualitas laporan yang dihasilkan dapat meningkat secara signifikan.

### Dampak Jangka Panjang bagi Perekonomian Daerah

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi tata kelola keuangan, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah melalui sistem seperti SIGUNTANG dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan kanal digital juga dapat mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara non-tunai, ekosistem ekonomi digital di daerah pun akan semakin berkembang.

### Menatap Masa Depan Digital Sumatera Selatan

Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, Sumatera Selatan berada pada posisi yang strategis untuk menjadi salah satu pelopor digitalisasi daerah di Indonesia. Namun, perjalanan ini tentu masih panjang.

Diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pihak untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. SIGUNTANG menjadi contoh bahwa inovasi lokal yang dikembangkan dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan.

Ke depan, diharapkan semakin banyak inisiatif serupa yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa depan.

### Penutup

Kegiatan *capacity building* dan peluncuran SIGUNTANG menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi gerakan bersama yang terus berkembang. Dengan sinergi yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk terus mencetak prestasi dan menjadi role model bagi daerah lain.

Momentum ini perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga transformasi digital yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.





# 03

## Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Secara umum, kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian. Hal ini tercermin melalui terjaganya pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan. Di lain sisi, pertumbuhan kinerja intermediasi turut disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

- Kinerja pertumbuhan aset perbankan pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 6,12% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,60% (yoy). Kinerja aset perbankan disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 7,45% (yoy). Berdasarkan golongan debitur, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh 9,73% (yoy) dan penyaluran kredit korporasi tumbuh 11,05% (yoy).
- Di lain sisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 5,98% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar 10,05% (yoy). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro (28,89% (yoy)) dan Tabungan (5,47%(yoy)) serta ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-3,69% (yoy)).
- Kredit UMKM triwulan I 2026 mencatatkan kinerja positif dicatatkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 1,99% (yoy) yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 6,71% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar terkontraksi sebesar -1,12% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

### 3.1. Kondisi Umum Sumatera Selatan

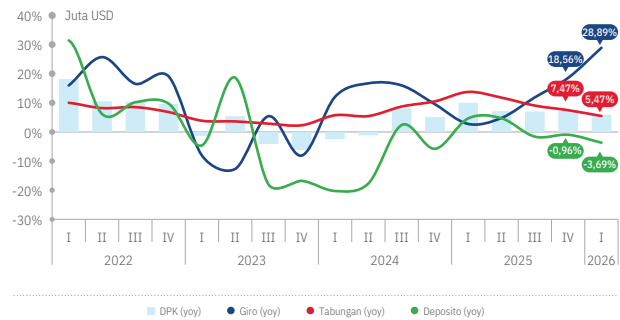
Pada triwulan I 2026, kinerja perbankan Provinsi Sumatera Selatan secara umum meningkat. Kondisi ini tercermin melalui indikator kinerja utama perbankan yaitu nilai aset serta penyaluran kredit.

Aset perbankan pada periode laporan tercatat tumbuh sebesar 6,12% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,60% (yoy). Kinerja aset perbankan ini utamanya disumbang oleh kinerja penyaluran kredit perbankan yang turut mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 7,45% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,20% (yoy).

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat melambat menjadi sebesar 5,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,05% (yoy) (Grafik 3-1). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan instrumen tabungan dan deposito. Instrumen tabungan tumbuh sebesar 5,47% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,74% (yoy), sementara instrumen deposito berkontraksi sebesar -3,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Penurunan instrumen tabungan dan deposito pada Triwulan I 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan likuiditas masyarakat dan korporasi pada awal tahun, seiring meningkatnya aktivitas Bank konsumsi, pembayaran kewajiban usaha, serta realisasi operasional dan proyek. Selain itu, tingginya harga emas pada awal tahun 2026 turut mendorong pergeseran penempatan dana masyarakat dari instrumen simpanan ke aset investasi emas.

Di sisi lain, instrumen giro menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari sebesar 2,75% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 28,89% (yoy) pada Triwulan I 2026. Peningkatan giro terutama didorong oleh meningkatnya operasional keuangan Pemerintah sejalan dengan stimulus fiskal dan ekspansi moneter. Selain itu, stabilnya BI-Rate pada

Grafik 3.2. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan

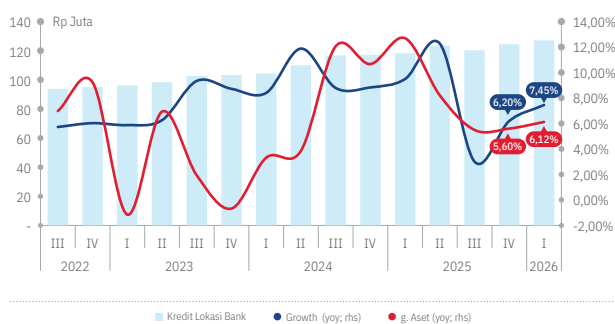


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

level 4,75% selama Triwulan I 2026 serta percepatan realisasi belanja APBN dan APBD turut mendorong peningkatan penempatan dana pada instrumen giro.

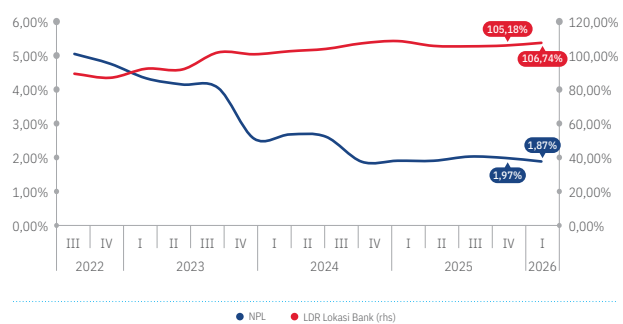
Nominal pada DPK perbankan di triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp119,46 triliun, angka ini tercatat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp116,49 triliun (Tabel 3-1). Secara kuartalan, peningkatan DPK utamanya disumbang oleh instrumen giro yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 28,89% (yoy) pada triwulan I 2026, dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 18,56% (yoy). Peningkatan instrumen giro pada Triwulan I 2026 turut dipengaruhi oleh meningkatnya operasional keuangan Pemerintah sejalan dengan stimulus fiskal dan ekspansi moneter, hingga implementasi paket stimulus ekonomi pemerintah pada triwulan I 2026 yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat, khususnya pada sektor transportasi, perdagangan, dan jasa menjelang Ramadan dan Idulfitri. Momentum Ramadan dan Idulfitri, termasuk pembayaran THR, turut mendorong peningkatan kebutuhan dana likuid pada korporasi dan dunia usaha sehingga mendukung pertumbuhan instrumen giro pada Triwulan I 2026. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan likuiditas pelaku usaha dan pemerintah dalam mendukung aktivitas operasional dan transaksi harian.

Grafik 3.1. Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3. Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Tabel 3.1. Perkembangan Pertumbuhan DPK di Sumatera Selatan**

	2024		2025				2026
	III	IV	I	II	III	IV	I
Giro	21.611.558	17.271.564	19.926.747	20.368.761	24.181.525	20.477.039	25.683.340
Tabungan	56.522.762	60.304.881	60.536.239	61.539.481	61.636.907	64.807.597	63.848.898
Deposito	31.514.077	31.070.646	32.249.031	32.255.972	31.539.759	31.211.827	29.925.321
DPK	109.648.397,42	108.647.090,99	112.712.017,44	114.164.214,27	117.358.191,77	116.496.463,64	119.457.558,67

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Lebih lanjut, kinerja pembiayaan perbankan pada periode laporan tercermin pada tingkat *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) perbankan Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat sebesar 106,40%, sedikit menurun dibandingkan Triwulan IV 2025 sebesar 106,74%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Sumatera Selatan masih relatif tinggi, tercermin dari posisi LDR yang berada di atas *threshold* ideal sebesar 80%–92%. Meskipun mengalami sedikit perbaikan, kondisi tersebut menunjukkan likuiditas perbankan yang masih perlu dijaga secara prudent di tengah pertumbuhan kredit yang tetap kuat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada periode laporan tercatat sebesar 1,94%, sedikit meningkat dibandingkan Triwulan I 2025 yang sebesar 1,89%. Meskipun mengalami kenaikan, rasio NPL masih berada di bawah *threshold* 5%, sehingga mencerminkan risiko kredit perbankan yang tetap terjaga. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kualitas penyaluran kredit di Sumatera Selatan masih berada pada level yang cukup baik di tengah upaya perbankan mendorong pertumbuhan pembiayaan sejalan dengan kebijakan pelonggaran makroprudensial.

Di sisi lain, perbankan tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan giro yang sehat, perbankan terus memperkuat ekosistem pembayaran digital, menjaga stabilitas dan keamanan sistem pembayaran, serta menyalurkan kredit secara prudent dengan tetap memperhatikan indikator risiko seperti NPL, CAR, dan LDR. Selain itu, perbankan juga terus mendorong optimalisasi penyaluran dana ke sektor-sektor prioritas dan unggulan di Sumatera Selatan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dengan demikian, peningkatan giro tidak hanya memperkuat basis likuiditas perbankan, tetapi juga mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3.2. Pembiayaan Daerah

**Kondisi pembiayaan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2026 menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif.** Pertumbuhan kredit modal kerja pada triwulan laporan

tercatat sebesar 4,72% (yoy), meningkat dibandingkan capaian pada periode sebelumnya sebesar 1,24% (yoy). Sementara itu, kredit investasi tetap tumbuh tinggi sebesar 19,84% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 21,33% (yoy) (Grafik 3-10). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas pembiayaan usaha di Sumatera Selatan masih terjaga, baik untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi usaha jangka panjang.

Pertumbuhan penyaluran kredit di Sumatera Selatan pada triwulan laporan mencerminkan tetap terjaganya optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian ke depan. Kondisi tersebut antara lain didorong oleh membaiknya permintaan domestik, stabilitas harga komoditas utama, keyakinan terhadap kondisi makroekonomi yang kondusif, serta dukungan belanja prioritas pemerintah. Hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2026 juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai meningkatkan pemanfaatan pembiayaan perbankan, khususnya untuk mendukung ekspansi usaha dan penambahan modal kerja.

Selain itu, stabilitas sistem keuangan, implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), transmisi suku bunga yang semakin membaik, serta percepatan belanja pemerintah turut mendukung pertumbuhan kredit pada periode laporan. Kondisi tersebut menjadi indikasi positif bahwa dunia usaha mulai meningkatkan aktivitas usaha dan investasi secara bertahap di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil liaison pada Triwulan I 2026, pelaku usaha di Sumatera Selatan juga menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan ke depan masih berpotensi meningkat, seiring prospek aktivitas usaha yang tetap positif. Namun demikian, keputusan penambahan pembiayaan tetap akan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, permintaan pasar, serta prospek usaha ke depan. Dengan demikian, penguatan intermediasi perbankan diharapkan tetap berlangsung secara sehat dan prudent guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2.1. Perkembangan Pembiayaan Korporasi

Pertumbuhan pembiayaan korporasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 11,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 9,70% (yoy) (Grafik 3-5). Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit modal kerja yang tercatat sebesar 4,72% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,24% (yoy). Secara nominal, outstanding kredit modal kerja korporasi di Sumatera Selatan pada triwulan laporan mencapai Rp74,19 triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha masih terjaga serta mencerminkan optimisme pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

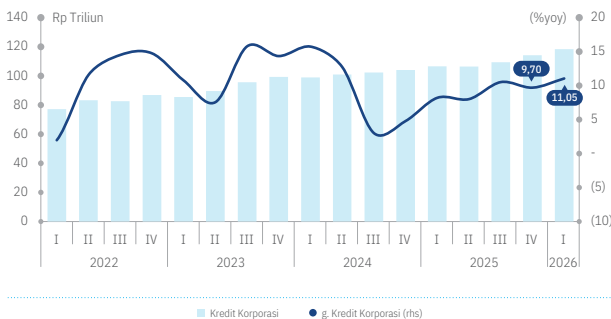
Peningkatan pembiayaan korporasi pada triwulan laporan didorong oleh kebutuhan pembiayaan yang tetap tinggi, baik untuk mendukung kegiatan operasional maupun ekspansi usaha. Hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai meningkatkan pemanfaatan pembiayaan perbankan seiring membaiknya prospek usaha dan permintaan domestik. Meskipun perkembangan usaha relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya, sebagian pelaku usaha mulai menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan investasi secara bertahap sebagai bagian dari strategi ekspansi usaha ke depan.

Komitmen perbankan dalam mendukung pembiayaan korporasi juga tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan pada Triwulan I 2026 yang berada pada level 56 (zona optimis). Optimisme tersebut didukung oleh ekspektasi perbankan terhadap kemampuan pengelolaan risiko yang tetap terjaga, serta prospek pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang masih positif.

Optimisme tersebut sejalan dengan hasil liaison kepada berbagai pelaku usaha di Sumatera Selatan yang menunjukkan sentimen positif terhadap produktivitas usaha dan prospek peningkatan margin perusahaan. Hal tersebut tercermin dari hasil Likert Scale margin pada Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 0,50, meningkat dibandingkan Triwulan IV 2025 sebesar 0,09 (Grafik 3-6). Peningkatan tersebut mengindikasikan prospek kinerja usaha yang masih terjaga ke depan.

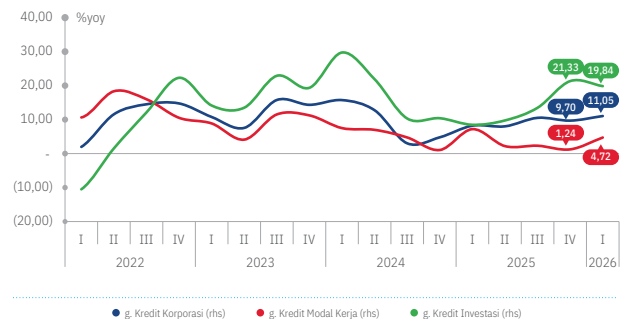
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit korporasi di Sumatera Selatan pada Triwulan I 2026 terutama ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 35,21% (yoy), serta Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 0,68% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor utama perekonomian Sumatera Selatan masih menjadi motor penggerak pertumbuhan pembiayaan korporasi.

Grafik 3.4. Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan



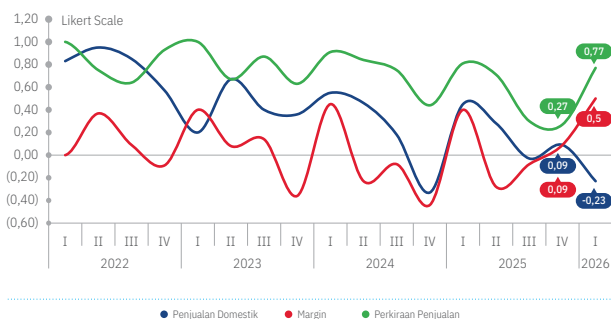
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5. Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan



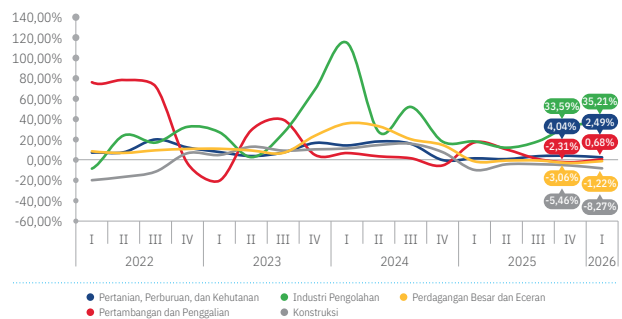
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6. Likert Scale Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan

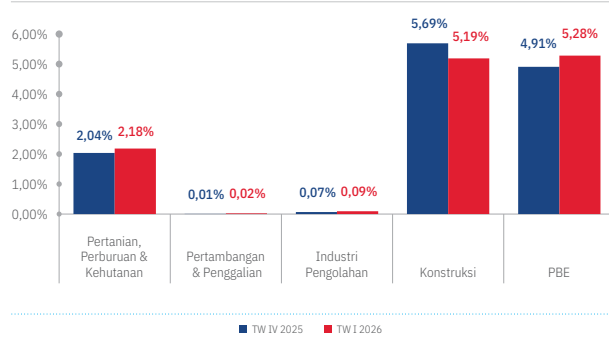


Sumber: Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan diolah

Grafik 3.7. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 3.8. NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan**

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

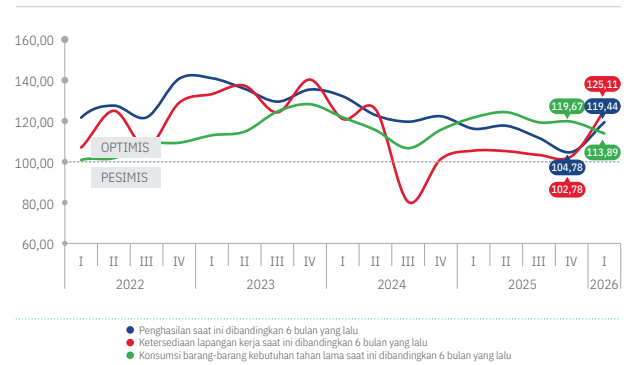
Kinerja kualitas kredit korporasi di Sumatera Selatan pada Triwulan I 2026 mengalami sedikit perlambatan. Hal tersebut tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi yang meningkat menjadi 1,94%, dibandingkan Triwulan IV 2025 sebesar 1,87% (Grafik 3-8). Meskipun meningkat, rasio NPL tersebut masih berada jauh di bawah *threshold* 5%, sehingga risiko kredit korporasi secara umum masih terjaga. Peningkatan NPL secara terbatas tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit korporasi yang masih kuat pada periode laporan.

Ditinjau berdasarkan jenis penggunaan kredit, peningkatan NPL terutama bersumber dari kredit investasi yang meningkat menjadi 1,17% dari sebelumnya 1,15%, serta kredit modal kerja yang meningkat menjadi 2,34% dari sebelumnya 2,30%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan risiko kredit secara terbatas pada kedua jenis kredit tersebut, meskipun masih berada pada level yang relatif rendah.

Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, perbaikan kualitas kredit terjadi pada Lapangan Usaha (LU) Konstruksi yang tercermin dari penurunan NPL menjadi 5,19% dibandingkan 5,69% pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, kualitas kredit pada beberapa lapangan usaha utama mengalami sedikit penurunan, antara lain LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan yang meningkat dari 2,04% menjadi 2,18%, LU Pertambangan dan Penggalian dari 0,01% menjadi 0,02%, LU Industri Pengolahan dari 0,07% menjadi 0,09%, serta LU Pengadaan Listrik dan Gas (PBE) dari 4,91% menjadi 5,28%. Kondisi tersebut perlu terus dicermati sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit di tengah pertumbuhan pembiayaan korporasi yang masih positif.

### 3.2.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

Komponen konsumsi rumah tangga (RT) memegang peranan strategis sebagai motor penggerak utama permintaan dalam perekonomian, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Konsumsi oleh rumah tangga tidak hanya menjadi pendorong

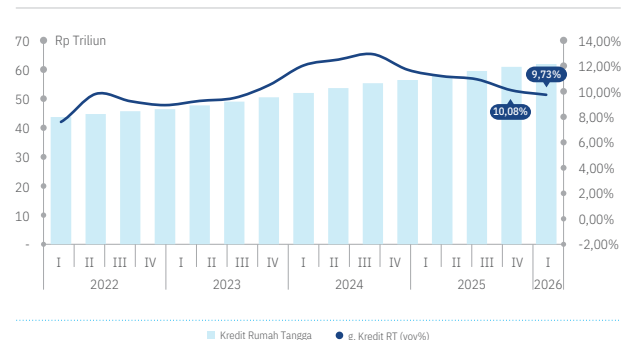
**Grafik 3.9. Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan**

Sumber: Survei Konsumen BI Sumatera Selatan, diolah

langsung bagi aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang saling terhubung.

Kinerja rumah tangga Provinsi Sumatera Selatan tetap tumbuh sejalan dengan meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian pada Triwulan I 2026. Pada periode laporan, konsumsi rumah tangga pada PDRB Sumatera Selatan tumbuh sebesar 4,97% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2025 yang sebesar 4,91% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen KPwBI Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa tingkat optimisme masyarakat tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang meningkat menjadi 127,48 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 110,70.

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga juga tetap tumbuh positif sebesar 9,73% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan Triwulan IV 2025 sebesar 10,08% (yoy) dan Triwulan I 2025 sebesar 11,70% (yoy). Pertumbuhan kredit rumah tangga terutama ditopang oleh kredit multiguna dengan pangsa sebesar 36,13%, diikuti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 34,48%, dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 7,09%.

**Grafik 3.10. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan**

Sumber: LBU BI Sumatera Selatan, diolah

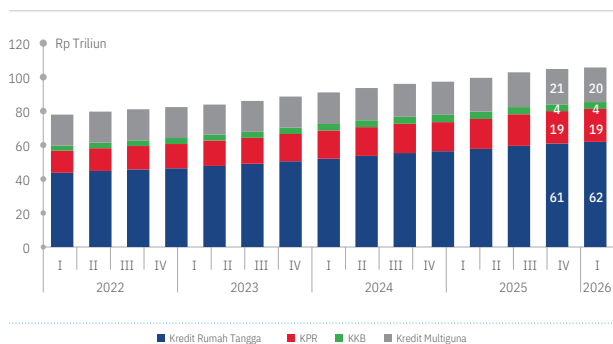
Berdasarkan jenis kreditnya, KPR mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,23% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,83% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pembiayaan rumah tinggal tipe 22–70, rumah tinggal di atas tipe 70, serta apartemen tipe 22–70. Kondisi tersebut sejalan dengan stabilnya BI-Rate pada Triwulan I 2026 serta mengindikasikan masih terjaganya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

Di sisi lain, kredit multiguna tumbuh sebesar 4,17% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,85% (yoy). Perlambatan tersebut mengindikasikan masyarakat cenderung lebih selektif dalam memanfaatkan pembiayaan konsumtif di tengah dinamika perekonomian yang masih berkembang.

Sementara itu, KKB tumbuh sebesar 7,09% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,17% (yoy). Meskipun mengalami perlambatan terbatas, pertumbuhan KKB tetap menunjukkan permintaan kendaraan bermotor yang relatif terjaga.

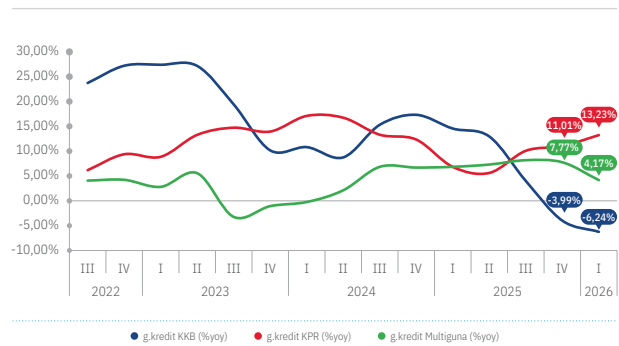
Sejalan dengan perkembangan kredit rumah tangga, indikator risiko kredit masih berada pada level yang terkendali. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit rumah tangga tercatat sebesar 2,21%, meningkat dibandingkan Triwulan IV 2025 yang sebesar 2,08%. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari NPL KPR yang meningkat menjadi 3,14% dari sebelumnya 3,00% serta NPL KKB yang meningkat menjadi 3,35% dari sebelumnya 3,04%. Sementara itu, kualitas kredit multiguna menunjukkan perbaikan dengan NPL yang menurun dari 1,41% menjadi 1,32% (Grafik 3-13). Meskipun mengalami peningkatan, rasio NPL rumah tangga masih berada di bawah *threshold* 5%, sehingga risiko kredit rumah tangga secara umum tetap terjaga. Momentum Ramadan dan Idulfitri, termasuk pembayaran THR serta stimulus ekonomi pemerintah, turut mendukung terjaganya konsumsi rumah tangga dan optimisme konsumen pada periode laporan.

**Grafik 3.11. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan**



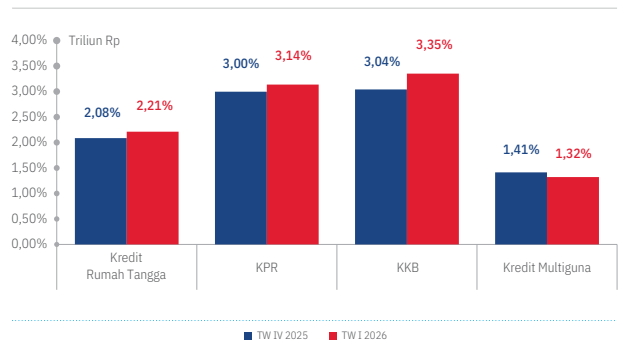
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

**Grafik 3.12. Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan**



Sumber: LBU BI Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 3.13. NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan**

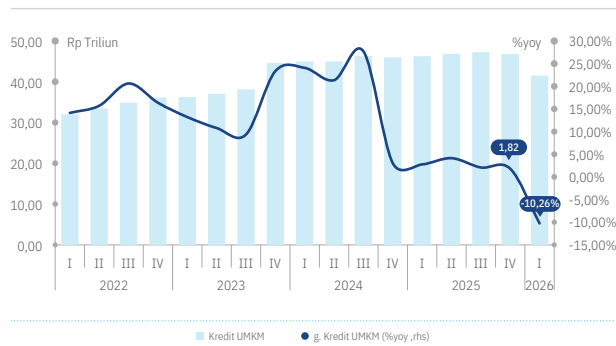


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

### 3.3. Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM

Pada triwulan I 2026, total penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan tetap mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat. Secara umum, kredit yang disalurkan ke sektor UMKM pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan positif yang tercatat sebesar 1,99% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp41,50 triliun. Namun demikian, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,02% (yoy).

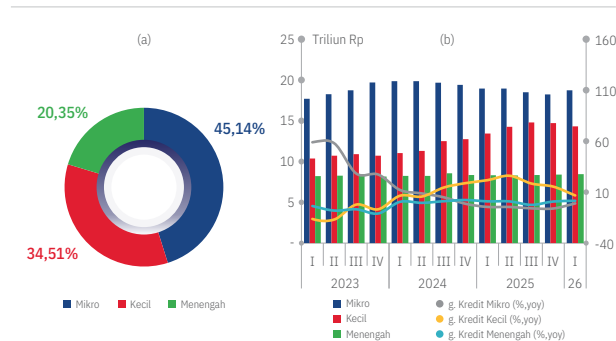
Berdasarkan skala usahanya, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM Sumatera Selatan disumbang oleh penyaluran kredit UMKM skala mikro. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil mencatatkan kinerja yang tetap tumbuh 6,71% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,38%. Di lain sisi, penyaluran kredit UMKM skala mikro mengalami pemulihan, meskipun tetap berkontraksi sebesar 1,12% (yoy), melanjutkan tren kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 6,06%. Sementara itu, UMKM skala menengah turut mengalami pemulihan tumbuh positif sebesar 1,46% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,76%. Dari sisi pangsa, penyaluran kredit UMKM pada skala mikro, kecil dan menengah masing-masing sebesar 45,14%, 34,51% dan 20,35%.

**Grafik 3.14. Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp Triliun)**

Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

Realisasi penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 juga masih didominasi dengan penyaluran dalam bentuk kredit modal kerja. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM utamanya disalurkan dalam bentuk modal kerja dengan pangsa sebesar 61,04% diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 38,96%. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kebutuhan UMKM di wilayah Sumatera Selatan masih berpusat pada operasional harian daripada akuisisi maupun penambahan aset jangka menengah hingga panjang guna ekspansi usaha. Secara nominal, kredit modal kerja UMKM pada periode laporan mencapai sebesar Rp25,33 triliun atau melambat sebesar 20,96% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,87%. Sementara itu, kredit investasi mencapai sebesar Rp16,17 triliun dengan pertumbuhan sebesar 3,54% (yoy) lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai sebesar Rp17,17 triliun dengan pertumbuhan 9,83%.

Berdasarkan lapangan usahanya, penyaluran kredit UMKM di Sumatera Selatan masih terfokus pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan. Pangsa penyaluran kredit pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 40,12%, diikuti oleh LU perdagangan sebesar 33,99%, LU konstruksi sebesar 5,03%, LU industri pengolahan sebesar 3,61%, dan LU

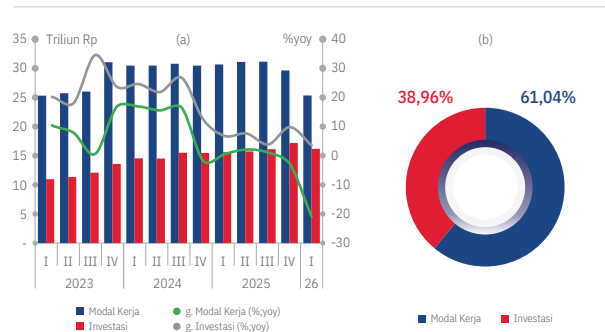
**Grafik 3.15. Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)**

Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

pertambahan sebesar 0,56%. Dominasi LU Pertanian Perburuan, dan Kehutanan serta LU Perdagangan menunjukkan fundamental UMKM sebagai perekonomian daerah cukup robust dalam mendukung pertumbuhan daerah secara berkelanjutan melalui penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan konsumsi masyarakat.

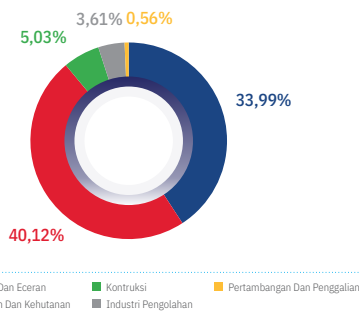
**Kinerja penyaluran kredit pada LU strategis yang positif turut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit UMKM.** Pada periode laporan, kinerja penyaluran kredit pada LU pertanian tumbuh melambat sebesar 5,81% (yoy) dengan *outstanding* Rp 16,65 triliun sejalan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,00% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp16,43 triliun. Sementara, LU konstruksi dan LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh kuat masih-masing sebesar 22,04% dan 54,77% dengan *outstanding* sebesar Rp2,08 triliun dan Rp234 miliar, jika dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 16,48% dan 50,63%. Hal ini didorong oleh lebih banyaknya proyek pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan anggaran tahun 2025 pada LU konstruksi serta peningkatan volume produksi LU Pertambangan dan penggalian. Sejalan dengan LU Konstruksi dan LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan tumbuh menguat sebesar 8,11%, setelah terkontraksi sebesar 5,81% dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, LU Pedagangan Besar dan Eceran melanjutkan tren terkontraksi masing-masing sebesar 4,46% dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 4,33%.

**Secara agregat, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM turut disertai dengan kualitas kredit yang tetap terjaga pada periode laporan.** Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan berjalan tercatat sebesar 4,25% atau berada di bawah *threshold* rasio kredit bermasalah. Kinerja NPL tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 3,98%. Berdasarkan kategori penerima, kualitas kredit UMKM kategori Mikro, Kecil, dan Menengah mengalami penurunan, secara berurut masing-masing menjadi 3,83%, 1,31% dan 1,20% dari triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 4,32%, 3,96% dan 3,30%.

**Grafik 3.16. Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM**

Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

**Grafik 3.17. Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan**



Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

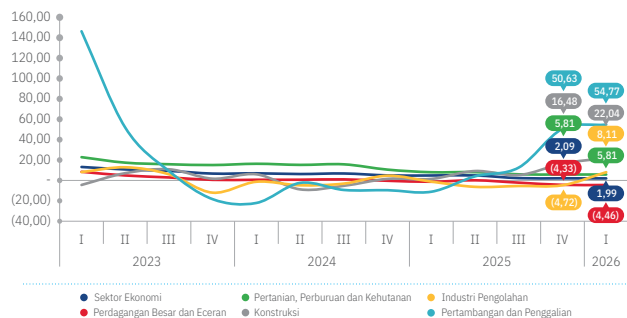
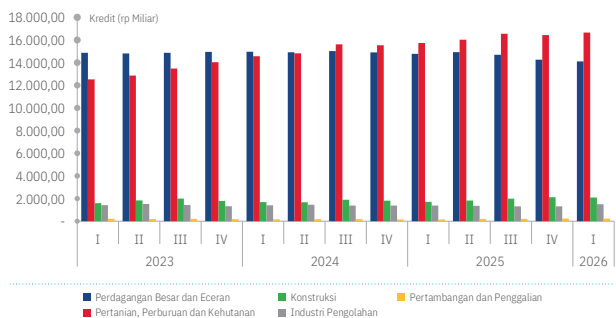
Berdasarkan lapangan usaha, NPL penyaluran kredit UMKM masih disumbang utamanya oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dengan rasio 5,28%. Selanjutnya, NPL pada LU Konstruksi sebesar 5,19%, LU pertanian sebesar 2,15%, LU Pengolahan sebesar 0,09%, dan LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,02% mempunyai NPL di tingkat yang aman. Tingginya NPL pada Lapangan Usaha Konstruksi dipengaruhi oleh karakteristik proses bisnisnya yang memiliki siklus pengembalian modal relatif panjang. Kondisi tersebut meningkatkan eksposur terhadap berbagai risiko inheren yang berpotensi meningkatkan rasio NPL. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM yang tersebar di LU sektor strategis secara umum

mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang cukup baik.

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM ramah muslim, Kantor Perwakilan Bank Indonesia melakukan rangkaian seleksi calon anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) pada 27 Februari - 5 Maret 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 338 UMKM dari sektor makanan dan minuman halal, dan modest fashion berbasis wastra dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Sebagai rangkaian kegiatan kurasi UMKM calon anggota IKRA, dilakukan capacity building untuk 50 UMKM potensial tentang ekspansi pasar dan penguatan branding melalui pengembangan pengemasan produk. Selanjutnya, sebanyak 2 UMKM masing-masing dari sektor makanan dan minuman, serta modest fashion terpilih menjadi anggota IKRA yang kemudian akan mendapatkan pendampingan intensif serta fasilitasi promosi perdagangan domestik dan internasional.

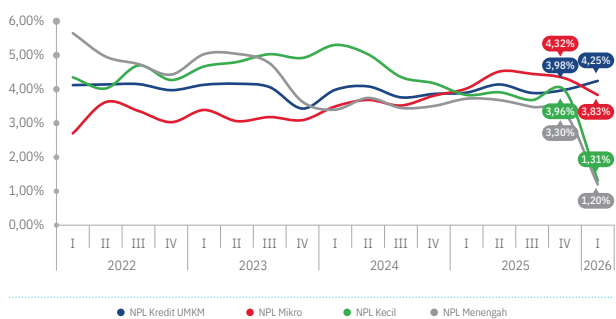
Selain itu, pada dukungan terhadap pengembangan UMKM dilakukan melalui program INKUBI (Inkubator Bisnis Bank Indonesia). Program INKUBI bertujuan untuk memberikan pembekalan intensif selama 2 bulan kepada UMKM potensial yang terkurasi dari 604 UMKM pendaftar menjadi 100 UMKM. Materi pembekalan beragam dari pemanfaatan marketplace sebagai media pemasaran terkini, pengelolaan keuangan usaha, hingga perluasan akses pasar penjualan dan pembiayaan.

**Grafik 3.18. Pertumbuhan Sektoral Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan I 2026**



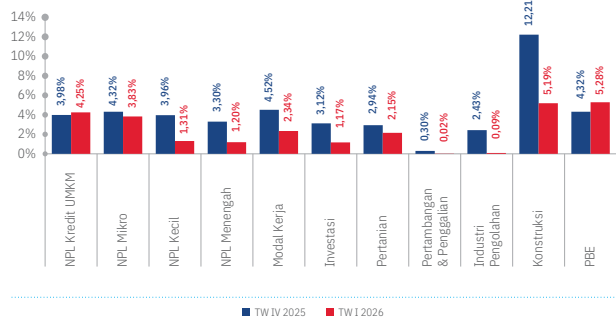
Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

**Grafik 3.19. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan**



Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

**Grafik 3.20. Perkembangan NPL Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan**



Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

Dari sisi perluasan akses pembiayaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia melakukan fasilitasi business matching pembiayaan kepada 2 gabungan kelompok tani dan 2 kelompok tani guna investasi alat mesin pertanian. Hal tersebut selaras dengan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berfokus untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi.



17:14

.... 1111



Hold Near Reader

# 04

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Kinerja sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, baik pada transaksi tunai maupun nontunai, mendukung terjaganya keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026.

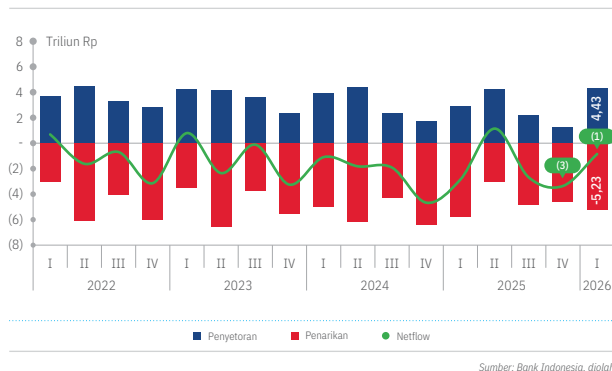
- Sesuai dengan pola historis tahunan, aliran transaksi uang kartal mengalami *net outflow* pada triwulan I 2026.
- Tingginya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan berbasis tunai di sektor-sektor tertentu seperti perdagangan, perkebunan (karet, sawit, kopi), dan UMKM.
- Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah serta kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H memicu peningkatan kebutuhan uang tunai, sehingga mendorong terjadinya *net outflow* pada triwulan I 2026.
- Di sisi lain, kinerja sistem pembayaran nontunai pada triwulan I 2026 terus menunjukkan akselerasi, sejalan dengan meningkatnya adopsi instrumen digital di berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

#### 4.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan I 2026, peredaran uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan *net outflow* yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat dikarenakan data historis dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yaitu Hari Raya Idul Fitri. Triwulan I laporan mencatatkan peredaran uang kartal di Sumatera Selatan mengalami net outflow sebesar Rp. 804 miliar. Realisasi *net outflow* tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp3,35 triliun (Grafik 4-1), hal ini dikarenakan pada triwulan I 2026 diimbangi dengan arus balik uang kartal pasca momen Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Transaksi penarikan uang kartal tercatat sebesar Rp5,23 triliun dengan penurunan sebesar 9,07 % (yoy), sementara transaksi penyetoran uang kartal pada periode yang sama tercatat sebesar Rp4,43 triliun dengan peningkatan sebesar 52,69% (yoy).

Pelaksanaan kegiatan program edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) secara masif pada triwulan I 2026 turut membangun kesadaran masyarakat dan perbankan terhadap pelaporan uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia. Adapun jumlah yang Rupiah tidak asli yang dilaporkan pada periode berjalan sejumlah 1.583 lembar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 511 lembar. Adapun kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan secara konsisten yang ditujukan kepada berbagai pihak,

Grafik 4.1. Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.1. Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan	2024				2025				2026
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
RTGS dari Provinsi Sumsel									
Nilai (Rp Triliun)	34,20	46,85	49,35	64,23	50,86	46,82	65,23	63,42	40,75
Volume	15.419	15.567	17.133	19.367	16.523	13.982	16.726	19.005	14.358

Sumber: Bank Indonesia, diolah

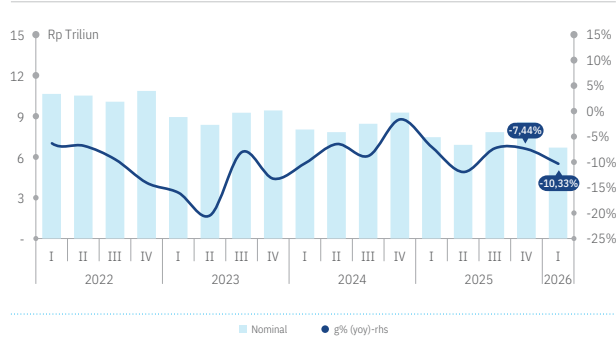
termasuk di dalamnya instansi perbankan, pendidikan, aparatur negara, pers, komunitas dan sosial media di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan program ini, diharapkan pemahaman masyarakat dan *stakeholders* di Sumatera Selatan dalam mengenali dan merawat uang Rupiah dapat terus meningkat, sehingga uang Rupiah yang beredar dimasyarakat dalam kondisi layak edar dan terhindar dari peredaran uang palsu.

#### 4.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

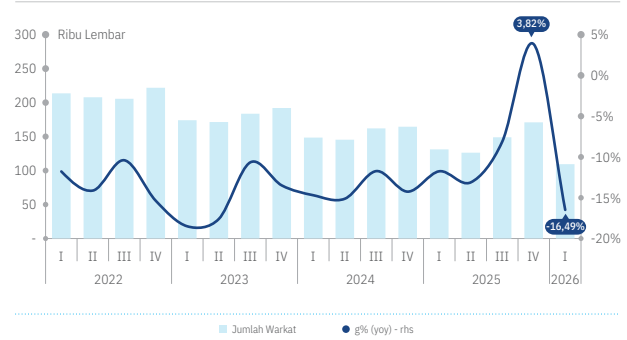
##### 4.2.1. Transaksi SKNBI dan BI-RTGS

Perkembangan transaksi pembayaran ritel pada Triwulan I 2026 mengindikasikan berlanjutnya akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menekankan aspek interoperabilitas, efisiensi, serta inklusivitas layanan pembayaran. Kondisi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya penggunaan kanal pembayaran digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi. Di tengah tren digitalisasi yang terus menguat tersebut, kinerja transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Triwulan I 2026 masih mengalami perlambatan secara tahunan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Secara nominal, nilai transaksi perputaran kliring tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau terkontraksi 10,33% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada Triwulan IV 2025 sebesar 7,44% (yoy) (Grafik 4-2). Dari sisi volume, jumlah warkat tercatat sebanyak 109,47 ribu warkat atau terkontraksi 16,49% (yoy) (Grafik 4-3). Perkembangan tersebut mencerminkan masih terbatasnya perbaikan aktivitas transaksi melalui SKNBI, seiring dengan berlanjutnya pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha menuju instrumen pembayaran digital non-kliring, khususnya BI-FAST dan QRIS. BI-FAST dan QRIS semakin menjadi pilihan utama masyarakat karena didukung layanan transfer dana secara real time selama 24 jam, biaya transaksi yang relatif rendah, serta proses transaksi yang cepat dan andal.

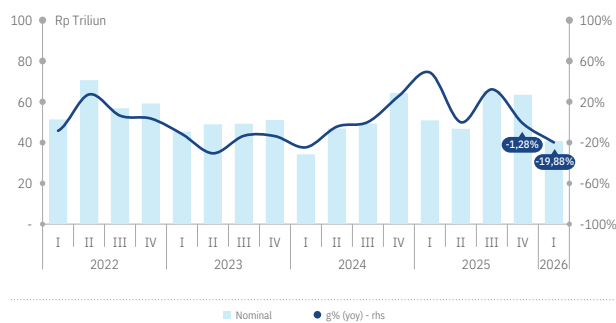
Aktivitas transaksi melalui BI-RTGS pada triwulan I 2026 tercatat mengalami moderasi, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi (Tabel 4-1). Dari sisi nominal, total transaksi RTGS mencapai Rp40,75 triliun (Grafik 4-4), atau terkontraksi sebesar 19,88% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 1,28% (yoy).

**Grafik 4.2. Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan**

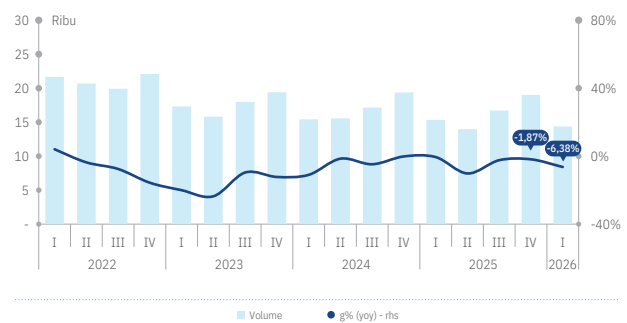
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.3. Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.4. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.5. Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi volume, jumlah transaksi tercatat sebanyak 14.358 transaksi, menurun 6,38% (yoy), setelah pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 1,87% (yoy). Perlambatan pada transaksi RTGS tersebut mengindikasikan adanya normalisasi aktivitas transaksi bernilai besar di wilayah Sumatera Selatan setelah peningkatan yang relatif tinggi pada periode sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh moderasi aktivitas transaksi korporasi, penyelesaian kewajiban antarbank, serta penyesuaian aktivitas pasar keuangan dan realisasi belanja pemerintah maupun korporasi skala besar pada awal tahun.

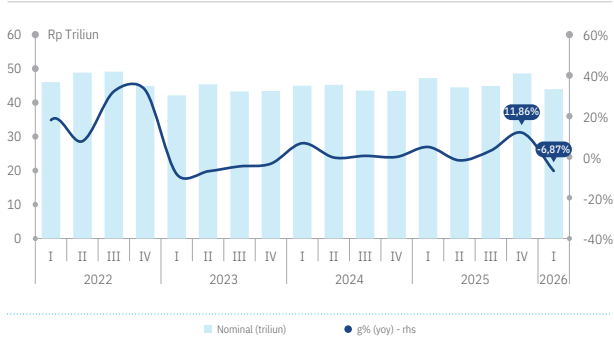
Di sisi lain, perlambatan transaksi BI-RTGS perlu dicermati dalam konteks transformasi sistem pembayaran nasional sebagaimana arah kebijakan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Penurunan transaksi RTGS tidak semata merefleksikan pelemahan aktivitas ekonomi, namun juga dapat mengindikasikan pergeseran preferensi dan efisiensi transaksi menuju instrumen pembayaran yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis digital, termasuk pemanfaatan BI-FAST pada segmen tertentu. Ke depan, penguatan interoperabilitas sistem pembayaran, digitalisasi transaksi korporasi dan pemerintah, serta peningkatan integrasi ekosistem pembayaran wholesale–retail menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi, resilien, dan inklusivitas sistem pembayaran daerah.

#### 4.2.2. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Transformasi sistem pembayaran nasional sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 menempatkan digitalisasi dan integrasi layanan pembayaran sebagai pendorong utama terciptanya ekosistem transaksi yang semakin *seamless*, cepat, dan efisien. Tren pembayaran *cashless*, *cardless*, dan *contactless* diperkirakan terus berkembang, terutama pada kanal *front-end* yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Meski demikian, dinamika transaksi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa instrumen berbasis kartu fisik masih memegang peranan penting, khususnya dalam mendukung kebutuhan transaksi tunai dan perpindahan dana melalui kanal perbankan konvensional.

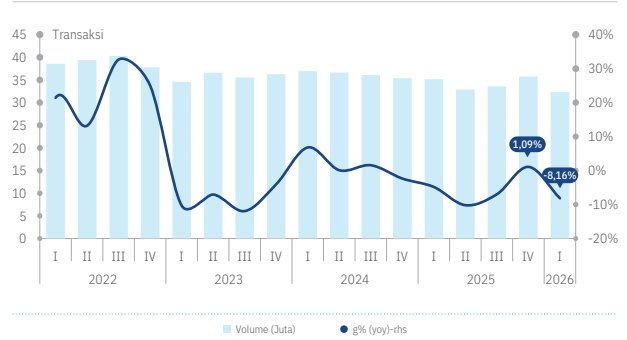
Pada triwulan I 2026, kinerja transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM/Debit, tercatat mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nominal, transaksi kartu ATM/Debit tercatat sebesar Rp43,95 triliun (Grafik 4-6), atau terkontraksi sebesar 6,87% (yoy), berbalik dari triwulan IV 2025 yang masih tumbuh sebesar 3,13% (yoy) dengan nominal Rp48,55 triliun. Sejalan dengan itu, dari sisi volume, transaksi tercatat sebanyak 32,30 juta transaksi (Grafik 4-7), atau menurun sebesar

**Grafik 4.6. Nilai Nominal Transaksi Kartu ATM/D**



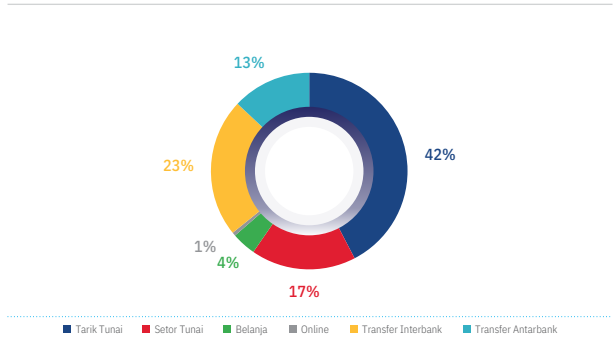
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.7. Volume Transaksi Kartu ATM/D**



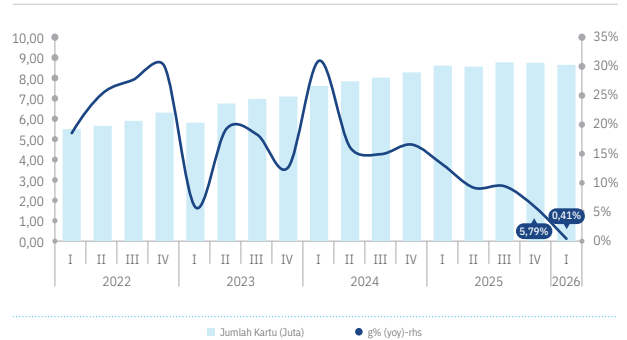
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.8. Pangsa Transaksi ATM/D**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.9. Jumlah Kartu ATM/D**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

8,16% (yoy), setelah pada periode sebelumnya masih mencatat pertumbuhan sebesar 1,09% (yoy) dengan volume mencapai 35,79 juta transaksi. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian aktivitas transaksi masyarakat pasca peningkatan konsumsi dan mobilitas pada akhir tahun sebelumnya, di tengah semakin luasnya pemanfaatan instrumen pembayaran digital berbasis transfer dan QR.

Berdasarkan pangsa transaksi, penggunaan kartu ATM/Debit di Sumatera Selatan masih didominasi oleh transaksi tarik tunai yang mencapai Rp18,61 triliun atau sekitar 42% dari total nominal transaksi. Selanjutnya, transaksi transfer intrabank tercatat sebesar Rp10,01 triliun (23%), setor tunai sebesar Rp7,58 triliun (17%), transfer antarbank sebesar Rp5,71 triliun (13%), transaksi belanja sebesar Rp1,75 triliun (4%), dan transaksi online sebesar Rp258,24 miliar (1%) (Grafik 4-8). Struktur tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama kartu ATM/Debit di Sumatera Selatan masih berorientasi sebagai instrumen akses likuiditas dan perpindahan dana, sementara pemanfaatannya sebagai instrumen pembayaran digital dan *e-commerce* relatif terbatas.

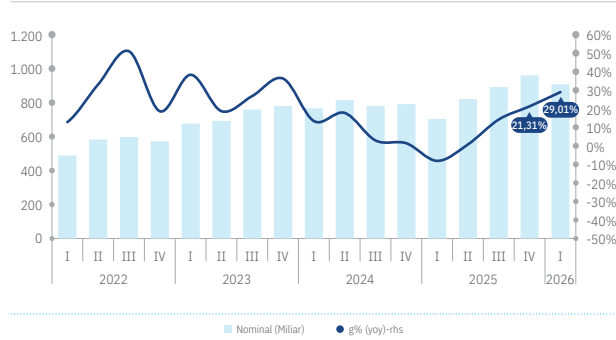
Ke depan, kondisi tersebut menjadi ruang penguatan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di daerah, khususnya melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, peningkatan literasi transaksi non-tunai, serta integrasi layanan pembayaran ritel yang lebih interoperabel.

Jumlah kartu ATM/Debit yang beredar di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tercatat tetap meningkat, meskipun dengan laju yang terbatas. Total kartu ATM/Debit yang beredar mencapai 8,64 juta (Grafik 4-9), atau tumbuh sebesar 0,41% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,79% (yoy).

Pertumbuhan jumlah kartu yang tetap positif di tengah perlambatan transaksi mengindikasikan bahwa kepemilikan kartu ATM/Debit masih menjadi bagian penting dari akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun demikian, fungsi kartu cenderung semakin bergeser dari instrumen utama pembayaran menuju instrumen pendukung akses rekening dan likuiditas, seiring meningkatnya penggunaan kanal pembayaran digital berbasis aplikasi dan transfer *real-time*.

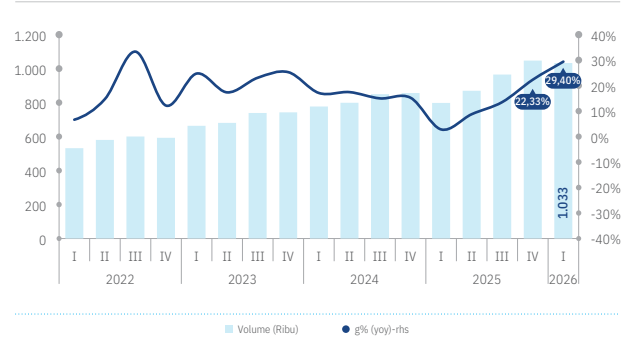
**Kinerja transaksi kartu kredit di Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 menunjukkan akselerasi yang cukup kuat, sejalan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada segmen pembayaran berbasis kredit.** Dari sisi nominal, transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp892,12 miliar (Grafik 4-10), atau tumbuh 29,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 21,31% (yoy). Sejalan dengan itu, volume transaksi meningkat menjadi 1,03 juta transaksi (Grafik 4-11), atau tumbuh sebesar 29,40% (yoy), menguat dibandingkan pertumbuhan 22,33% (yoy) pada

Grafik 4.10. Nominal Transaksi Kartu Kredit



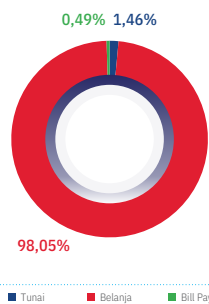
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11. Volume Transaksi Kartu Kredit



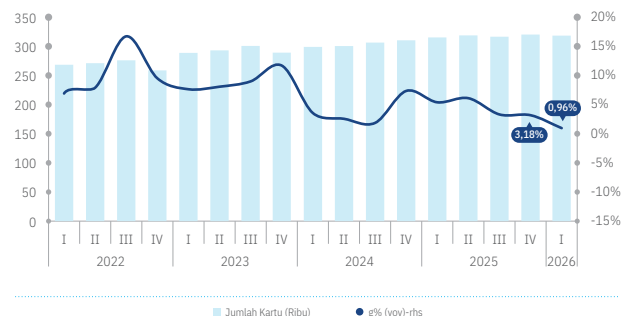
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Pangsa Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13. Jumlah Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

periode sebelumnya. Penguatan tersebut mengindikasikan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran yang menawarkan fleksibilitas transaksi, kemudahan akses, serta integrasi dengan ekosistem digital dan *lifestyle commerce*.

Berdasarkan struktur penggunaannya, transaksi kartu kredit masih didominasi oleh aktivitas belanja yang mencapai Rp890,31 miliar atau sekitar 98,05% dari total transaksi (Grafik 4-12). Sementara itu, transaksi tarik tunai tercatat sebesar Rp13,23 miliar (1,46%) dan pembayaran tagihan (bill payment) sebesar Rp4,49 miliar (0,49%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kartu kredit di Sumatera Selatan utamanya dimanfaatkan sebagai instrumen konsumsi ritel dan pembayaran *merchant*, dengan penggunaan untuk kebutuhan likuiditas tunai yang relatif terbatas. Di sisi lain, jumlah kartu kredit yang beredar juga terus meningkat dan mencapai 318 ribu kartu pada triwulan I 2026 (Grafik 4-13), atau tumbuh sebesar 1,66% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan bahwa penetrasi instrumen pembayaran berbasis kredit masih terus berkembang, meskipun secara lebih gradual dibandingkan pertumbuhan transaksi.

Meskipun ekosistem pembayaran digital berbasis transfer dan QR terus berkembang, kartu kredit masih mempertahankan perannya pada segmen konsumsi tertentu yang membutuhkan fleksibilitas pembayaran dan berbagai fitur nilai tambah, seperti

cicilan, *reward*, dan integrasi dengan platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem pembayaran tidak sepenuhnya menggantikan instrumen berbasis kartu, melainkan mendorong terbentuknya pola pembayaran yang semakin terdiversifikasi sesuai kebutuhan pengguna.

### 4.3. Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce

Sejalan dengan akselerasi transformasi digital dan perluasan ekosistem pembayaran nontunai, kinerja uang elektronik (UE) di Sumatera Selatan terus menunjukkan penguatan yang solid. Perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya adopsi instrumen pembayaran digital oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan transaksi ritel maupun transfer dana, yang sekaligus memperkuat efisiensi sistem pembayaran daerah.

Pada triwulan I 2026, nilai transaksi UE di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp3,94 triliun atau tumbuh 29,68% (yoy). Dari sisi volume, transaksi UE mencapai 37,12 juta transaksi, meningkat 24,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29,88 juta transaksi.

Dari sisi *outstanding*, jumlah uang elektronik yang beredar meningkat signifikan menjadi 8,77 juta instrumen pada triwulan laporan, tumbuh tinggi sebesar 169,10% (yoy) (Grafik 4-14). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan peningkatan

**Tabel 4.2. Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan**

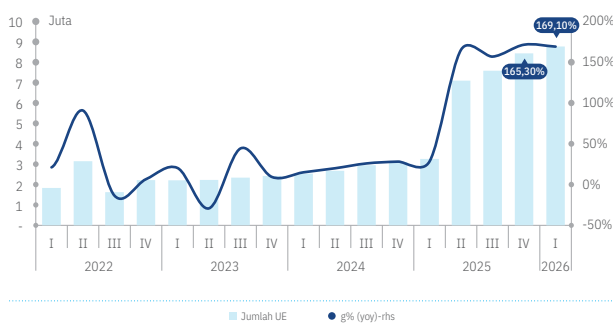
Transaksi	I 2025		II 2025		III 2025		IV 2025		I 2026	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Belanja	26.162	2.018	27.312	2.036	29.019	2.222	32.323	2.612	32.497	2.617
Transfer	3.389	770	3.200	768	3.437	864,7	3.836	1.215	4.240	1.190
Tarik Tunai	255	89	274	82	339	104	367	126	383	136
<b>TOTAL</b>	<b>29.806</b>	<b>3.646</b>	<b>30.786</b>	<b>2.887</b>	<b>30.786</b>	<b>3.191</b>	<b>36.526</b>	<b>3.952</b>	<b>37.120</b>	<b>3.942</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital yang praktis dan efisien, sekaligus mencerminkan masih kuatnya ekspansi basis pengguna oleh penyelenggara jasa pembayaran melalui berbagai strategi akuisisi, promosi, dan integrasi layanan digital.

**Penguatan ekosistem UE turut didukung oleh peningkatan infrastruktur pembayaran digital.** Jumlah reader UE di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 3.548 unit atau tumbuh 8,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut menunjukkan berlanjutnya perluasan titik akseptasi pembayaran nontunai, khususnya pada sektor perdagangan ritel, SPBU, parkir, serta sektor jasa lainnya. Namun demikian, pertumbuhan reader yang relatif lebih moderat dibandingkan pertumbuhan jumlah instrumen dan transaksi mengindikasikan bahwa optimalisasi utilisasi infrastruktur eksisting masih menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan transaksi UE di daerah.

**Berdasarkan struktur penggunaannya, transaksi belanja masih mendominasi dengan pangsa sebesar 66,39% atau senilai Rp2,61 triliun.** Selanjutnya, transaksi transfer tercatat sebesar Rp1,18 triliun dengan pangsa 30,17%, sementara transaksi tarik tunai relatif terbatas sebesar Rp135 miliar atau 3,44% dari total transaksi UE. Komposisi tersebut menegaskan bahwa fungsi utama UE di Sumatera Selatan semakin terkonsentrasi sebagai instrumen pembayaran ritel dan transfer dana yang cepat, mudah, dan efisien, sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap transaksi digital bernilai kecil hingga menengah.

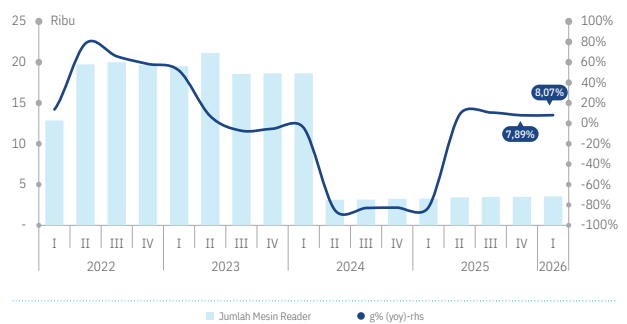
**Grafik 4.14. Jumlah UE**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Pada triwulan I 2026, Kota Palembang masih menjadi wilayah dengan dominasi tertinggi dalam penggunaan uang elektronik (UE) di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi.** Berdasarkan distribusi transaksi antarwilayah, Palembang mencatat pangsa sebesar 52,96% terhadap total nilai transaksi UE provinsi dan menyumbang sekitar 61% dari total volume transaksi UE. Dominasi tersebut menegaskan posisi Palembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa yang menjadi motor utama perkembangan transaksi digital di Sumatera Selatan.

**Dari sisi nominal transaksi, kontribusi Palembang tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sementara wilayah lain masih menunjukkan pangsa yang relatif terbatas dan tersebar.** Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis transaksi digital masih terpusat pada kawasan perkotaan dengan intensitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sementara itu, dari sisi volume transaksi, dominasi Palembang yang bahkan melampaui pangsa nominalnya menunjukkan tingginya frekuensi penggunaan UE untuk transaksi sehari-hari bernilai kecil hingga menengah, khususnya pada sektor ritel, transportasi, makanan dan minuman, serta layanan berbasis aplikasi digital.

**Kuatnya posisi Kota Palembang didukung oleh infrastruktur sistem pembayaran digital yang lebih berkembang dibandingkan wilayah lainnya, antara lain melalui ketersediaan merchant QRIS dan UE yang lebih luas, jaringan**

**Grafik 4.15. Jumlah UE reader**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

reader yang memadai, serta integrasi layanan pembayaran dengan berbagai *platform digital*. Selain itu, karakteristik masyarakat perkotaan yang relatif lebih adaptif terhadap inovasi teknologi turut mempercepat penetrasi transaksi non-tunai di kota tersebut. Peran Palembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan jasa juga menjadi faktor utama yang menciptakan ekosistem transaksi digital yang lebih aktif dan terkonsentrasi.

Di sisi lain, ketimpangan pangsa transaksi antara Palembang dan daerah lainnya menunjukkan bahwa tingkat adopsi pembayaran digital di Sumatera Selatan masih belum merata. Wilayah di luar Palembang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital, tingkat literasi keuangan masyarakat yang bervariasi, serta skala aktivitas ekonomi yang relatif lebih kecil. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa akselerasi digitalisasi pembayaran masih perlu diperkuat secara lebih inklusif agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten/kota.

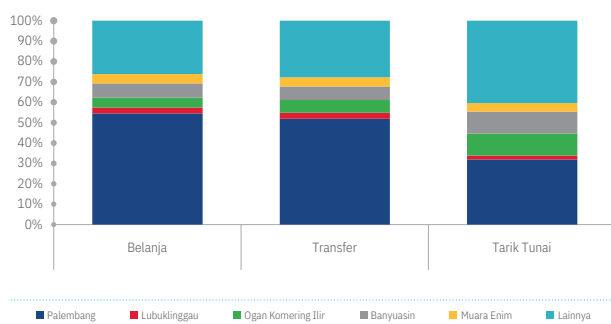
Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan penyelenggara jasa pembayaran terus memperkuat berbagai strategi perluasan ekosistem pembayaran digital, antara lain melalui peningkatan akseptasi QRIS dan UE, perluasan edukasi dan literasi transaksi non-tunai, serta penguatan kolaborasi dengan sektor perdagangan, transportasi, UMKM, dan layanan publik. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan digitalisasi sistem

pembayaran, memperkuat inklusi keuangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

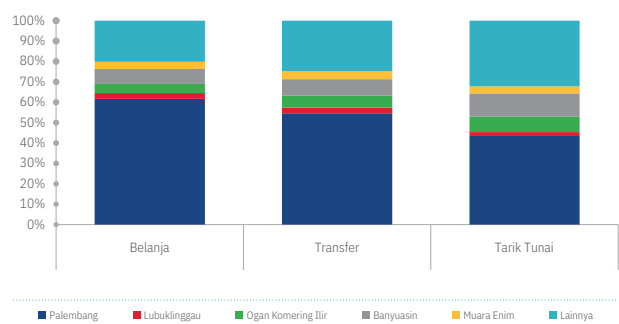
Transformasi digital yang terus berlangsung di berbagai sektor ekonomi telah mendorong meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran digital, salah satunya melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Kehadiran QRIS berperan penting dalam mendukung transaksi non-tunai yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus membantu pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi proses pembayaran. Perluasan implementasi QRIS yang semakin masif turut memperkuat terciptanya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Pada triwulan I 2026, nilai transaksi QRIS di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp8,05 triliun atau tumbuh 69,92% (yoy). Di sisi lain, jumlah *merchant* QRIS mencapai 1.156.148 *merchant* atau meningkat sebesar 18,15% (yoy) (Grafik 4-18). Berdasarkan distribusinya, sebagian besar *merchant* QRIS terkonsentrasi di Kota Palembang dengan pangsa mencapai 51,16% dari total *merchant* di Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 7,13%. Tingginya adopsi QRIS di Kota Palembang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan konektivitas digital yang relatif memadai, meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong akselerasi penggunaan QRIS (Grafik 4-19).

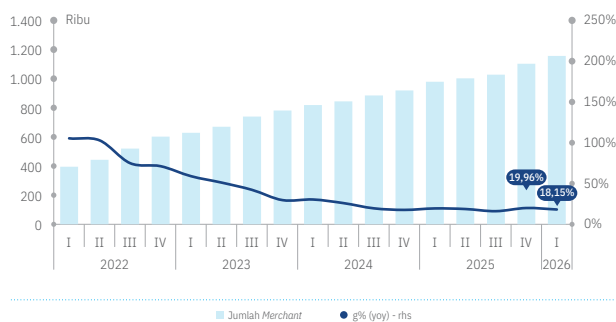
Grafik 4.16. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal



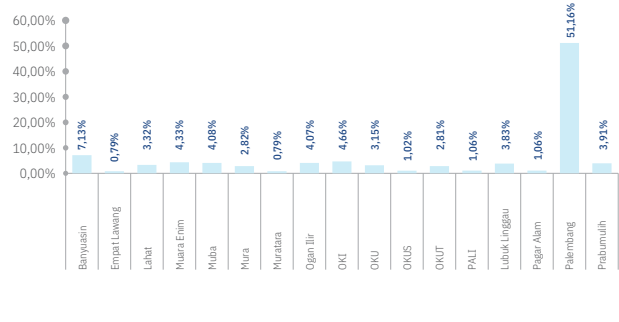
Grafik 4.17. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume

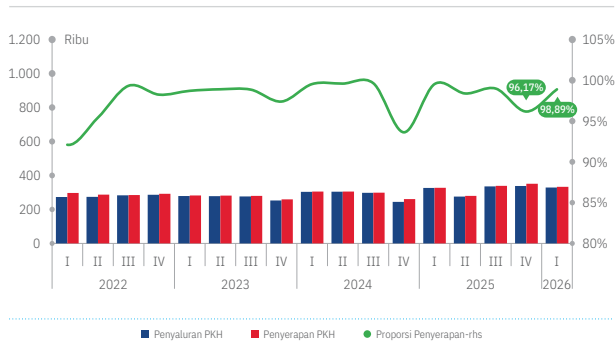


Grafik 4.18. Jumlah Merchant QRIS



Grafik 4.19. Persebaran Merchant QRIS



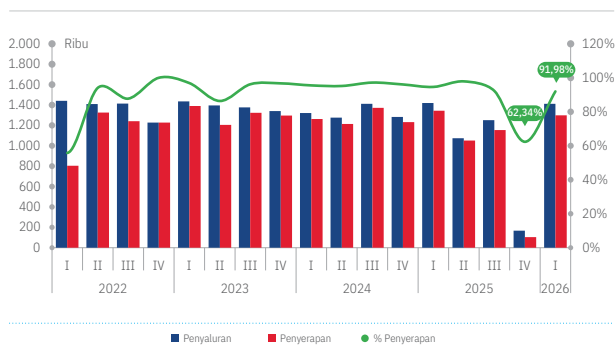
**Grafik 4.20. Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan ekosistem ekonomi digital di Provinsi Sumatera Selatan juga tercermin dari semakin luasnya implementasi penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Digitalisasi penyaluran bantuan tidak hanya mendukung proses distribusi yang lebih tepat sasaran dan transparan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana kepada masyarakat penerima manfaat.

Pada triwulan I 2026, realisasi penyaluran bantuan PKH di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau 327 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nominal sebesar Rp238,32 miliar. Tingkat penyerapan KPM tercatat sebesar 98,87%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 96,17% (Grafik 4-20). Capaian tersebut menunjukkan peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial, meskipun masih terdapat sejumlah bantuan yang telah masuk ke rekening KPM namun belum seluruhnya ditarik atau dimanfaatkan, sehingga secara administratif tercatat telah tersalurkan tetapi belum sepenuhnya terealisasi sebagai penyerapan.

Optimalisasi pelaksanaan PKH memerlukan dukungan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur, serta pendamping sosial di lapangan. Upaya penguatan validitas data penerima manfaat, pembaruan data secara berkala, dan peningkatan kapasitas pendamping menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan diterima oleh

**Grafik 4.21. Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako**

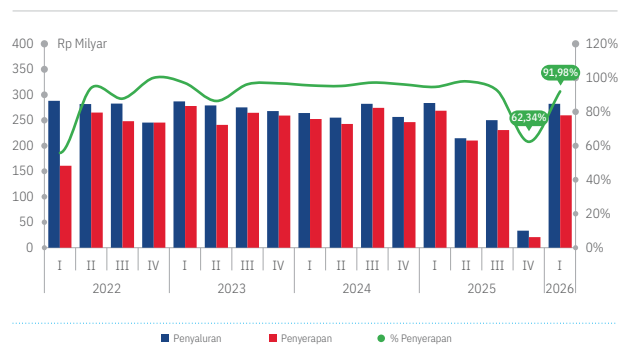
Sumber: Bank Indonesia, diolah

masyarakat yang berhak. Selain itu, edukasi kepada KPM terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana secara bijak dan produktif juga perlu terus diperkuat agar bantuan yang diterima tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang solid dan tata kelola yang baik, implementasi PKH diharapkan semakin efektif dalam mendukung pengurangan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan.

**Implementasi Program Sembako sebagai bagian dari bantuan sosial non-tunai di Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan kinerja penyaluran yang relatif baik.** Pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam Program Sembako turut mendukung proses distribusi bantuan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat penerima manfaat.

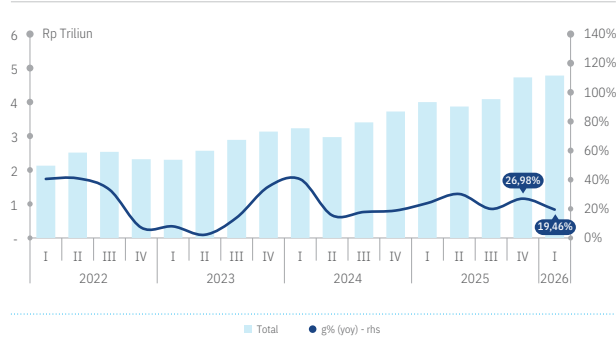
Pada triwulan I 2026, penyaluran bantuan Program Sembako secara non-tunai telah menjangkau sekitar 1,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nominal mencapai Rp282,26 miliar. Tingkat penyerapan bantuan tercatat sebesar 91,98% (Grafik 4-21 & Grafik 4-22). Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako pada triwulan I 2026 dilakukan melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama dilakukan melalui penyaluran tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero), sedangkan mekanisme kedua dilaksanakan secara non-tunai melalui bank-bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Di Provinsi Sumatera Selatan, implementasi bantuan sosial non-tunai diperkuat melalui penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta dukungan jaringan agen perbankan yang telah menjangkau hingga tingkat kecamatan. Kondisi tersebut mempermudah KPM dalam melakukan transaksi penarikan maupun pembelanjaan bantuan secara lebih praktis, aman, dan efisien. Ke depan, penguatan infrastruktur layanan keuangan

**Grafik 4.22. Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23. Nominal transaksi E-commerce



Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

serta peningkatan literasi masyarakat terhadap transaksi digital diharapkan dapat semakin mendukung efektivitas penyaluran bantuan sosial non-tunai di Sumatera Selatan.

**Aktivitas perdagangan digital di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya pemanfaatan platform e-commerce oleh masyarakat.** Perkembangan transaksi digital tersebut mencerminkan semakin kuatnya adaptasi masyarakat terhadap pola konsumsi berbasis daring yang didukung oleh kemudahan akses teknologi dan sistem pembayaran elektronik.

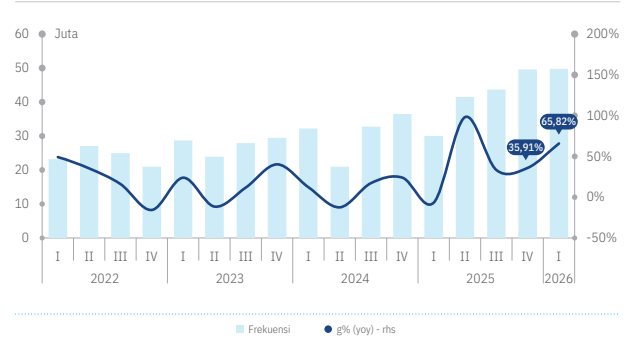
Pada triwulan I 2026, nominal transaksi e-commerce di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp4,77 triliun atau tumbuh 19,46% (yoy), meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 26,98% (yoy) (Grafik 4-23). Peningkatan transaksi tersebut didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat, bertambahnya jumlah pengguna platform digital, serta semakin beragamnya pilihan metode pembayaran elektronik yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi.

Dari sisi volume, jumlah transaksi e-commerce pada triwulan laporan mencapai 49,79 juta transaksi atau tumbuh sebesar 65,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 35,91% (yoy) dengan total transaksi sebanyak 49,58 juta transaksi (Grafik 4-24). Pertumbuhan frekuensi transaksi tersebut mencerminkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap aktivitas belanja daring. Kondisi ini turut didukung oleh perbaikan layanan logistik, percepatan proses pengiriman, serta strategi promosi digital yang semakin tersegmentasi sesuai karakteristik konsumen.

#### 4.4. Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Kinerja transaksi Uang Kertas Asing (UKA) pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026

Grafik 4.24. Frekuensi transaksi E-commerce



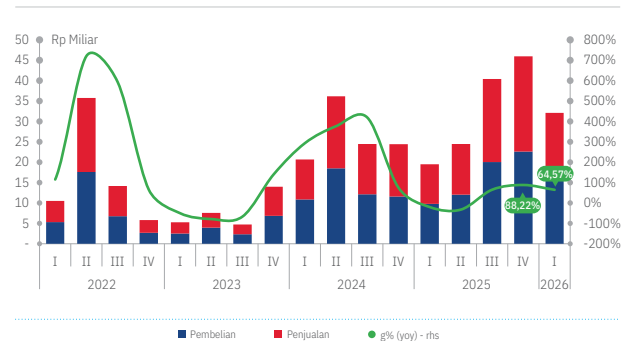
Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

**menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat.** Peningkatan aktivitas transaksi tersebut mencerminkan membaiknya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk berbagai keperluan, baik perjalanan internasional, pendidikan, maupun aktivitas bisnis.

Pada triwulan I 2026, total nominal transaksi KUPVA BB di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp32,09 miliar atau tumbuh 64,57% (yoy). Dari total tersebut, transaksi pembelian mencapai Rp15,76 miliar atau meningkat 60,82% (yoy), sementara transaksi penjualan tercatat sebesar Rp16,32 miliar atau tumbuh 68,36% (yoy). Peningkatan transaksi tersebut sejalan dengan semakin tingginya aktivitas masyarakat yang memerlukan valuta asing, didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya intensitas perjalanan ke luar negeri.

Ke depan, perkembangan transaksi KUPVA BB diperkirakan masih dipengaruhi oleh dinamika permintaan valuta asing dari masyarakat dan pelaku usaha, serta semakin beragamnya kanal transaksi yang tersedia. Selain itu, penguatan pengawasan dan tata kelola oleh Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga kegiatan usaha penukaran valuta asing tetap berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai ketentuan. Upaya tersebut penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan penukaran valuta asing di daerah.

Grafik 4.25. Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selain aktivitas penukaran valuta asing, perkembangan sistem pembayaran di Sumatera Selatan juga tercermin dari kinerja transfer dana masuk yang menunjukkan tren bervariasi. Aktivitas transfer dana domestik masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, sementara aliran dana masuk dari luar negeri masih mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada triwulan I 2026, nominal transfer dana masuk (*incoming*) domestik ke Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp1,89 triliun atau tumbuh 81,88% (yoy). Meskipun masih tumbuh kuat, capaian tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 101,65% (yoy) dengan nominal mencapai Rp2,18 triliun (Grafik 4-26). Pertumbuhan *incoming* domestik tersebut mencerminkan masih tingginya aktivitas transaksi dan perpindahan dana antarwilayah yang didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan penggunaan kanal transaksi digital.

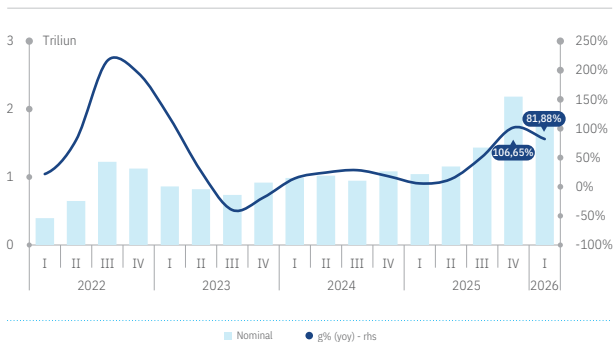
Di sisi lain, nominal transfer dana masuk yang bersumber dari luar negeri pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp41,56 miliar atau terkontraksi 46,86% (yoy). Kinerja tersebut relatif stagnan dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 46,77% (yoy) (Grafik 4-27). Penurunan *incoming* luar negeri tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih

terbatasnya aliran dana internasional ke daerah, termasuk dari aktivitas remitansi maupun transaksi lintas negara lainnya. Ke depan, perkembangan transfer dana masuk diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi domestik dan global, serta semakin luasnya pemanfaatan layanan transaksi keuangan digital.

Sejalan dengan perkembangan transfer dana masuk (*incoming*), kinerja transfer dana keluar (*outgoing*) di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 juga menunjukkan dinamika yang berbeda antara transaksi domestik dan luar negeri. Aktivitas transfer dana domestik masih mencatatkan pertumbuhan positif, sementara transaksi transfer ke luar negeri mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

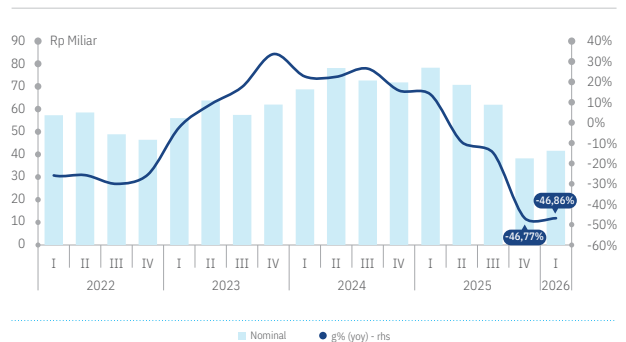
Pada triwulan I 2026, nominal transfer dana keluar domestik dari Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp2,87 triliun atau tumbuh 40,20% (yoy). Meskipun tetap tumbuh positif, capaian tersebut melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 50,40% (yoy) dengan nominal mencapai Rp3,42 triliun (Grafik 4-28). Peningkatan *outgoing* domestik tersebut mencerminkan masih tingginya aktivitas transaksi antarwilayah, termasuk untuk kebutuhan pembayaran kegiatan usaha serta berbagai aktivitas konsumsi dan perdagangan.

Grafik 4.26. Transfer Dana Domestik-Incoming



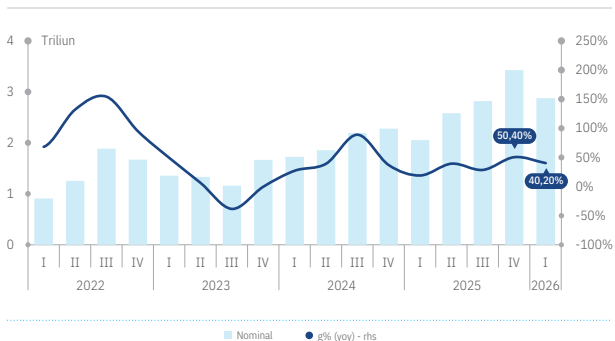
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27. Transfer Dana Luar Negeri-incoming



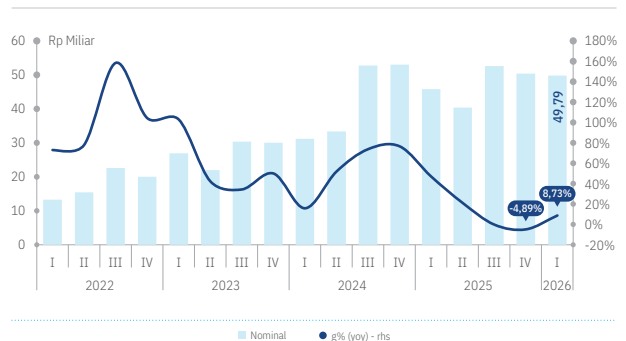
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.28. Transfer Dana Domestik-Outgoing



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.29. Transfer Dana Luar Negeri-Outgoing



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, nominal transfer dana keluar dari Sumatera Selatan ke luar negeri pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp49,79 miliar atau tumbuh 8,73% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 4,89% (yoy) (Grafik 4-29). Dari sisi frekuensi, transaksi outgoing luar negeri tercatat sebanyak 2,72 ribu transaksi atau tumbuh 12,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,39% (yoy). Perbedaan arah pertumbuhan antara nominal dan frekuensi transaksi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas transfer ke luar negeri didominasi oleh transaksi dengan nilai nominal yang relatif lebih kecil. Ke depan, perkembangan transfer dana *outgoing* diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika aktivitas perdagangan, kebutuhan transaksi lintas negara, serta semakin luasnya penggunaan layanan transfer dana digital oleh masyarakat dan pelaku usaha.

BOKS 3 :

## Launching Task Force Percepatan Investasi Sumatera Selatan



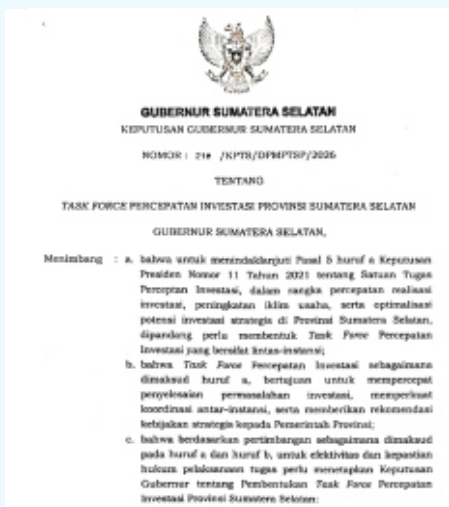
Gambar 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, beserta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengadakan rapat teknis task force percepatan investasi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2025, Sumatera Selatan mencatat capaian investasi sebesar Rp62,67 triliun atau 147,46% di atas target. Namun di saat yang sama, investasi daerah justru mengalami kontraksi sebesar -11,63% (yoy), terutama pada komponen Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini mengungkapkan bahwa persoalan utama investasi daerah tidak lagi terletak pada ketersediaan potensi, melainkan pada kemampuan mengeksekusi. Di satu sisi, potensi investasi sangat besar—didukung oleh kekayaan sumber daya alam, basis industri, serta posisi geografis yang strategis. Namun, sebagaimana banyak daerah lainnya,

tantangan justru muncul pada tahap implementasi, ketika investasi harus berpindah dari rencana menuju realisasi di lapangan.

Kesadaran akan hal tersebut mengemuka dalam diskusi lintas pemangku kepentingan yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pada 13 Maret 2026, dilakukan diskusi teknis untuk merumuskan pembentukan *Task Force* Percepatan Investasi dengan *output* utama: sebagai wadah kolaboratif lintas instansi yang berfokus pada percepatan realisasi investasi.

Lebih lanjut, *Task Force* Percepatan Investasi Sumatera Selatan mempunyai mandat antara lain: Mengidentifikasi dan mempercepat penyelesaian hambatan investasi pada proyek strategis, memperkuat koordinasi lintas instansi dalam proses perizinan dan pengawasan, melakukan pendampingan investor sejak tahap perencanaan hingga realisasi, melaksanakan promosi proyek investasi strategis, serta menyusun rekomendasi Kebijakan percepatan investasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Keanggotaan Task Force	
Pembina	Gubernur Sumatera Selatan
Pengarah	1. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Ketua Umum	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua Umum	Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Ketua Harian	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua II	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Wakil Ketua III	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Sekretaris	Ketua Tim Kerja Penata Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Keanggotaan *Task Force*

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	*Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	*Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Prof. Dr. Azwardi, SE., M.Si)
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	*Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	*Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perwilayahan, Standardisasi dan Bimbingan Sarana Industri Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	*Kepala Bidang Industri AGRO Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	*Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	*Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Promosi dan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Hiirisasi dan Pengembangan Iklim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	*Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan	

Gambar 2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dan Keanggotaan *Task Force* Percepatan Investasi Sumatera Selatan

Adapun *Task Force* Percepatan Investasi Sumatera Selatan turut didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan No.218/KPTS/DPMPTSP/2026 tentang *Task Force* Percepatan Investasi Sumatera Selatan yang selain mencakup wewenang dan fungsi juga menyertakan struktur sebagai fundamental sebuah satuan tugas.

Dan sebagai komitmen bersama yang berkelanjutan, *Task Force* Percepatan Investasi Sumatera Selatan telah diresmikan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada 25 Mei 2026, dimana kegiatan tersebut mencakup *talkshow* dan *capacity building* yang

mengundang beberapa narasumber diantaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara yang membahas giat, agenda, dan sepak terjang pembentukan iklim investasi yang bersaing di Sumatera Utara, Kementerian Investasi/BKPM yang membahas mengenai penyusunan dokumen IPRO/Pre-Feasibility Study, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membahas mengenai KPBU dan PPP. Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan DPMPTSP dan Bappeda dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan untuk memperkuat kemampuan teknis dan membentuk ekosistem investasi mumpuni di daerah.

Gambar 3. Launching, *Talkshow*, dan *Capacity Building* *Task Force* Percepatan Investasi Sumatera Selatan



# 05

## Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah



Pada triwulan I 2026, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik.

- TPAK di Sumatera Selatan pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan pasar kerja.
- Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,59%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,89%.
- Di sisi lain, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan pendapatan masyarakat saat ini lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu dan tetap optimis akan meningkat ke depan.
- Peningkatan optimisme dan aktivitas ekonomi tersebut turut berdampak pada membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

## 5.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Pada triwulan I 2026, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa indikator, seperti peningkatan jumlah penduduk usia kerja, penduduk bekerja, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Selatan pada periode pelaporan terakhir.

### 5.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Sejalan dengan penambahan penduduk, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Sumatera Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 6,72 juta orang, meningkat dibandingkan Februari 2025 sebesar 6,62 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 4,76 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,96 juta orang. Dibanding Februari 2025, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja pada masing-masing bertambah sebanyak 88,28 ribu orang dan 98,98 ribu orang, sementara jumlah pengangguran turun 10,70 ribu orang.

### 5.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. TPAK Sumatera

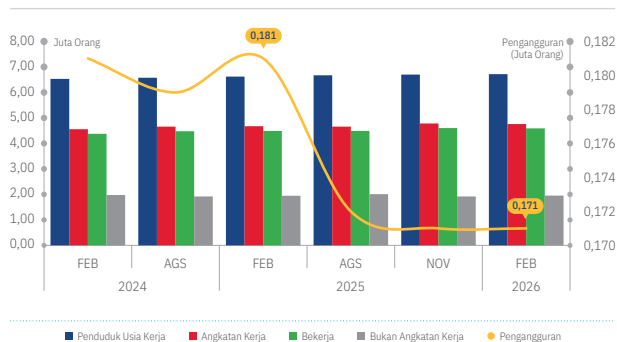
Selatan pada Februari 2026 mencapai 70,89%, naik sebesar 0,33% poin dibanding Februari 2025.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2026 TPAK laki-laki tercatat sebesar 85,94%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 55,35%. Dibandingkan Februari 2025, TPAK laki-laki pada triwulan laporan meningkat sebesar 1,28% (yoy), sementara TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,78% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi tenaga kerja pada kelompok laki-laki.

### 5.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

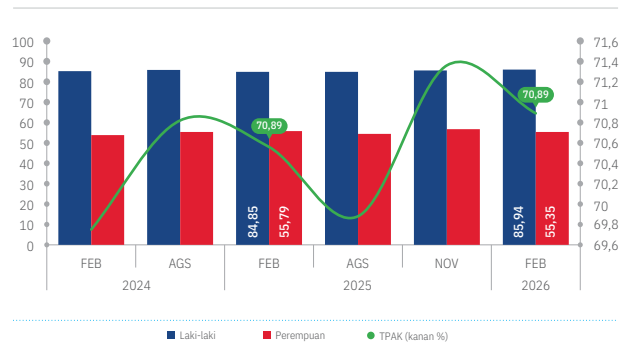
Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada LU utama penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, yaitu LU Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Industri Pengolahan. Komposisi penduduk bekerja menurut LU dapat menggambarkan struktur tenaga kerja dalam pasar. Berdasarkan Sakernas Februari 2026, tiga LU yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Selatan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,96%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,74%, serta Industri Pengolahan sebesar 6,69%. Faktor pendorong penyerapan tenaga kerja terbesar di LU pertanian ini adalah tingginya permintaan produk pertanian serta kehutanan di pasar lokal dan ekspor, yang didukung oleh

**Grafik 5.1.** Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2024-2026



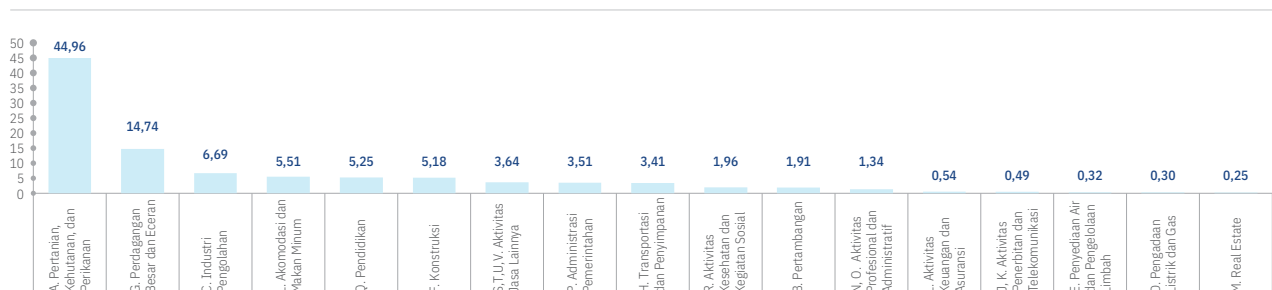
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 5.2.** Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2024-2026 (dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 5.3.** Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)



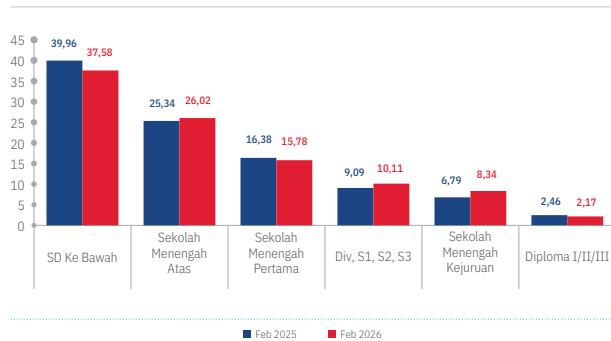
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

cuaca yang lebih kondusif mendorong produktivitas pertanian didukung oleh bendungan dan jalur irigasi. Sementara, tiga LU yang menyerap tenaga kerja paling rendah yaitu Real Estate sebesar 0,25%, Penyediaan Listrik dan Gas sebesar 0,30%, dan Penyediaan Air dan Pengelolaan Limbah sebesar 0,32%.

#### 5.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja di Sumatera Selatan pada Februari 2026 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Sebanyak 37,58% penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, namun proporsinya menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 10,11% dan mengalami tren yang semakin meningkat dibandingkan Februari 2025. Peningkatan terbesar pada penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 1,55% poin.

**Grafik 5.4. Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)**



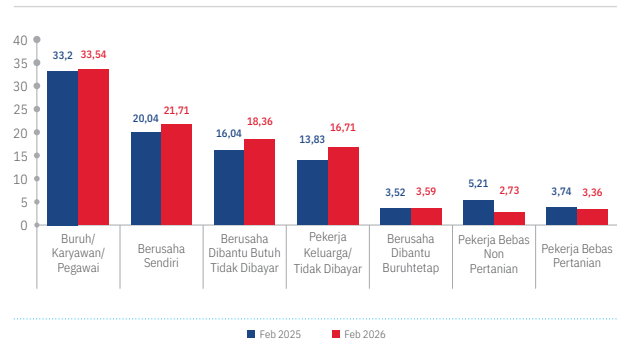
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

#### 5.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada Februari 2026, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 33,54%, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di non pertanian, yaitu sebesar 2,73%. Dibandingkan Februari 2026, status pekerjaan yang meningkat dengan persentase terbesar adalah berusaha sendiri sebesar 1,67% poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar pada status pekerja keluarga sebesar 2,90% poin.

Pada Februari 2026, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,85 juta orang (62,86%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,71 juta orang (37,14%). Dibandingkan Februari 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,40% poin.

**Grafik 5.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama**



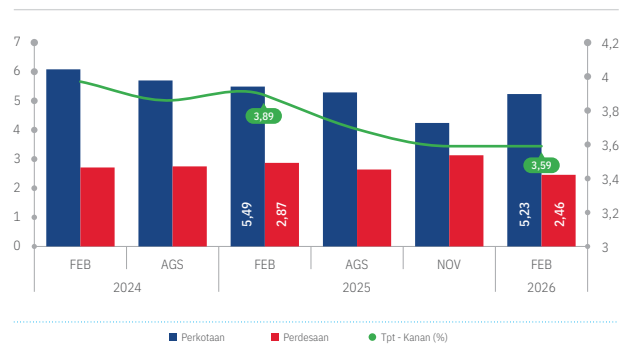
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

#### 5.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

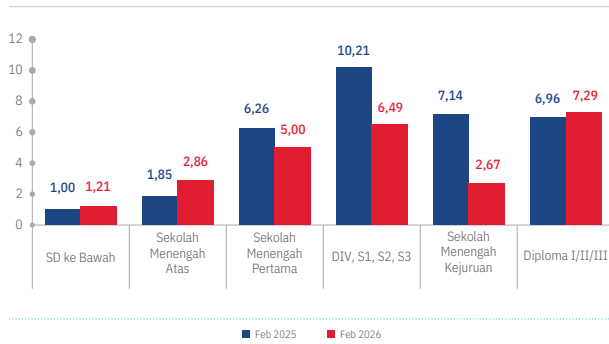
Indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan pada Februari 2026, yang tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,59%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 3,89%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,30% poin dibandingkan dengan Februari 2025. Dengan angka TPT yang tercatat sebesar 3,59%. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja dan kebijakan pengurangan pengangguran yang diterapkan selama ini cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 3,81%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,25%. TPT laki-laki dan perempuan masing-masing menurun sebesar 0,12 dan 0,58% poin dibandingkan Februari 2025. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan (5,23%) lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (2,46%). Dibandingkan dengan Februari 2025, TPT di perkotaan menunjukkan penurunan sebesar 1,26% poin dan TPT di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,41% poin. TPT perkotaan yang lebih tinggi mencerminkan adanya mismatch keterampilan atau kebutuhan kerja formal yang belum optimal di wilayah urban.

**Grafik 5.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2024-2025 (dalam %)**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

**Grafik 5.7. Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)**

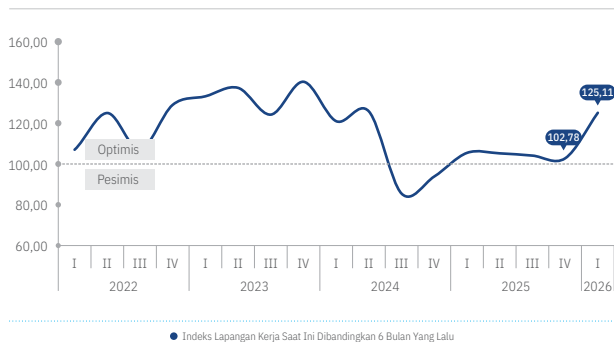
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh angkatan kerja, pola TPT pada Februari 2026 menunjukkan sedikit perbedaan dibandingkan Februari 2025. Pada Februari 2026, TPT tamatan Diploma IV, S1, S2, dan S3 masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,29%. Sementara, TPT paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,21%.

Selama periode Februari 2025 – Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu masing-masing mencapai 36,75% pada Februari 2025 dan mencapai 36,75% pada Februari 2026. Sementara itu, persentase pengangguran yang terendah pada Februari 2026 adalah tamatan Diploma I/II/III sebesar 1,60%.

### 5.1.7. Survei Konsumen

**Kondisi pasar kerja di Sumatera Selatan masih relatif terjaga pada triwulan I 2026.** Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen triwulan I 2026 yang menunjukkan Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dibandingkan 6 bulan yang lalu tercatat sebesar 125,11, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 102,78. Peningkatan tersebut

**Grafik 5.8. Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu**

● Indeks Lapangan Kerja Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu

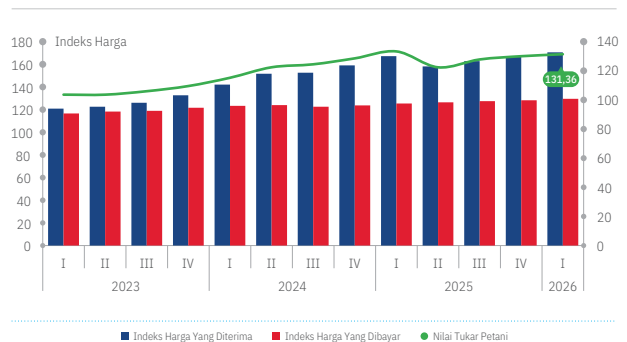
Sumber : Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

terjadi karena normalisasi aktivitas pasar kerja setelah libur akhir tahun, meningkatnya permintaan tenaga kerja menjelang HBKN Idulfitri, serta optimisme konsumen awal tahun terhadap peluang pekerjaan. Indeks yang masih berada di atas level optimis (100) menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga masih menilai kondisi lapangan kerja lebih baik dibandingkan enam bulan sebelumnya. Hal ini konsisten dengan indikator ketenagakerjaan aktual yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk bekerja serta penurunan TPT pada periode laporan.

## 5.2. Kondisi Kesejahteraan

**Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan.** Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 meningkat dibandingkan NTP triwulan sebelumnya, yaitu dari 130,00 menjadi 131,36 (Grafik 5-9). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani meningkat dimana nilai tukar produk yang dihasilkan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertanian.

**Peningkatan NTP pada triwulan I 2026 terutama bersumber pada peningkatan NTP Perkebunan Rakyat (NTPR), dan NTP Peternakan (NTPPT) (Grafik 5-10).** NTPR pada triwulan I 2026 tercatat 144,1 dari triwulan sebelumnya sebesar 141,49. Kenaikan indeks harga yang diterima petani tanaman Perkebunan Rakyat disebabkan naiknya harga komoditas kelompok tanaman perkebunan rakyat a.l karet, kelapa sawit, dan kelapa. Selanjutnya, NTPPT menunjukkan nilai sebesar 105,59, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 103,12. Kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani peternakan disebabkan oleh naiknya harga komoditas pada kelompok ternak besar (sapi potong), ternak kecil (kambing), unggas (ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan ayam kampung), dan kelompok hasil ternak (telur ayam ras).

**Grafik 5.9. Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani**

■ Indeks Harga yang Diterima ■ Indeks Harga yang Dibayar ● Nilai Tukar Petani

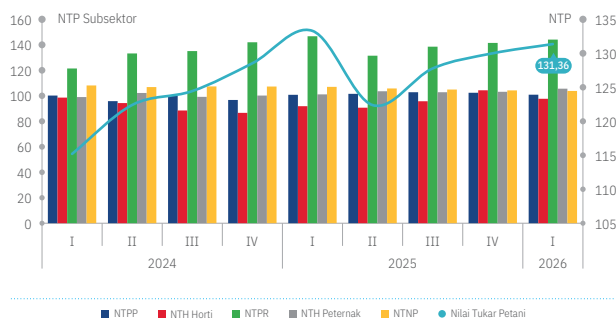
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

NTP pada triwulan laporan masih berada di atas angka 100 yang mencerminkan bahwa petani dalam kondisi surplus yaitu harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh petani. Indeks Harga yang diterima Petani (It) tercatat sebesar 170,58 pada triwulan I 2026 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 166,76, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang meningkat dari sebelumnya sebesar 128,28 menjadi 129,48.

Pada triwulan I 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 130,31 mengalami peningkatan sebesar 3,34% (yoy) (Grafik 5-11). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; dan Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

Sejalan dengan itu, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu (Tabel 5-1). Sebanyak 33,33% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka pada triwulan laporan lebih baik dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Sementara itu, 13,89% responden menyatakan penghasilan saat ini menurun/lebih buruk dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya.

Grafik 5.10. Nilai Tukar Petani Per Subsektor



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 5.1. Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu Triwulan I 2026

Bulan	Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
JAN	86	189	25	300
FEB	97	164	39	300
MAR	117	122	61	300
Jumlah	300	475	125	900
Persentase	33,33%	52,78%	13,89%	100,00%

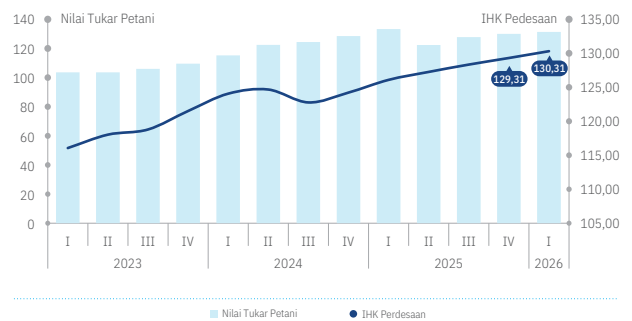
Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil Survei Konsumen, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan masih optimis bahwa penghasilan mereka ke depan akan relatif lebih baik. Masih solidnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan berlanjutnya program bantuan sosial dan adanya peningkatan UMP turut memberikan andil dalam optimisme penghasilan ke depan. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah 48,89% responden berpendapat bahwa penghasilan yang akan diterima pada 6 bulan mendatang akan lebih baik dibandingkan saat ini dan 46,56% responden menyatakan penghasilan yang akan diterima ke depan akan sama atau stabil dibandingkan dengan kondisi saat ini. Sementara itu, sebagian responden lainnya sebanyak 4,56% memperkirakan penghasilan 6 bulan yang akan datang menurun/lebih buruk dibandingkan saat ini (Tabel 5-2). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat masih terus terjaga.

### 5.3. Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 sebanyak 898,24 ribu orang atau 8,91% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 yang tercatat sebanyak 919,60 ribu orang atau 10,15% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan (Grafik 5-12).

Grafik 5.11. Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 5.2. Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan yang Akan Datang Triwulan I 2026

Bulan	Perkiraan Penghasilan 6 Bulan Mendatang Dibandingkan Saat Ini (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
JAN	137	155	8	300
FEB	145	144	11	300
MAR	158	120	22	300
Jumlah	440	419	41	900
Persentase	48,89%	46,56%	4,56%	100,00%

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

Adapun penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada periode laporan diiringi oleh peningkatan garis kemiskinan menjadi Rp609.044,00/kapita/bulan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga kelompok makanan seiring dengan besarnya pangsa kelompok tersebut bila dibandingkan kelompok non makanan.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan pada periode September 2025. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang sebanyak 310,56 ribu orang, menurun dibandingkan posisi Maret 2025 sebanyak 314,49 ribu orang. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan pada September 2025 menjadi 587,68 ribu orang dibandingkan posisi Maret 2025 sebanyak 605,12 ribu orang (Tabel 5-3).

Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan dalam Visi Misi Gubernur Sumsel tahun 2025-2029 yang terdapat pada Program Misi ke-V yaitu mendorong kesempatan kerja yang merata di Sumsel; meningkatkan kualitas tenaga pendamping pertanian yang merata; meningkatkan kerjasama

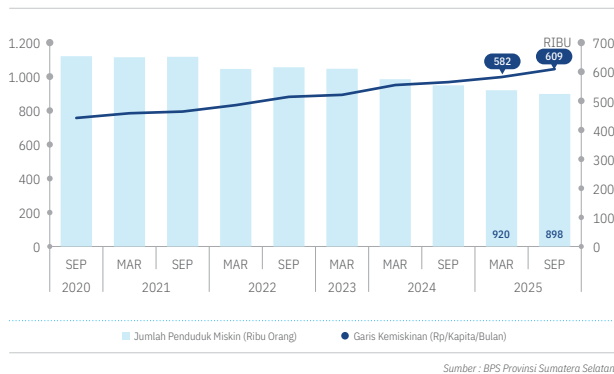
antar pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam melahirkan *socioecopreneur* dari generasi z dan generasi milenial; mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah; dan mendorong pengembangan lembaga mikro, dukungan permodalan usaha, kemudahan perizinan usaha, fasilitasi produk, teknologi usaha, dan kemasan produk dan akses bagi pasar UMKM. Selain itu, adanya program strategis seperti kesejahteraan dan kesehatan perempuan dan anak. Program-program dirancang dan digulirkan dengan harapan kemiskinan dan ketimpangan dapat berkurang signifikan.

### 5.3.1. Perubahan Garis Kemiskinan

**Garis Kemiskinan<sup>2</sup> Provinsi Sumatera Selatan pada periode September 2025 tercatat sebesar Rp609.044,00/kapita/bulan, meningkat sebesar 4,70% jika dibandingkan dengan Maret 2025 (Tabel 5-4).** Pada periode September 2025, peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kelompok bukan makanan. Besar sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM)<sup>3</sup> terhadap Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar 75,26% sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 24,74%.

Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK pada umumnya hampir sama antara perkotaan dan pedesaan. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni 19,57% dan 8,03%. Di pedesaan, beras memberi sumbangan sebesar 23,31% dan rokok kretek filter 11,52%. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (5,99% di perkotaan dan 4,26% di pedesaan), daging ayam ras (5,20% di perkotaan dan 4,48% di pedesaan), mie instan (3,19% di perkotaan dan 2,38% di pedesaan), dan seterusnya. Selanjutnya, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan dan pedesaan adalah komoditas perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan lainnya.

Grafik 5.12. Perkembangan Penduduk Miskin



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Bulan	Perkotaan		Perkotaan		Perkotaan & Pedesaan	
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin
2020	September	404,43	12,52	715,22	13,25	1.119,65	12,98
2021	Maret	402,25	12,36	711,51	13,12	1.113,76	12,84
	September	393,38	11,99	723,23	13,28	1.116,61	12,79
2022	Maret	371,50	11,23	673,18	12,31	1.044,69	11,90
	September	379,09	11,37	675,9	12,30	1.054,99	11,95
2023	Maret	371,75	11,07	673,93	12,21	1.045,68	11,78
2024	Maret	342,34	10,04	641,9	11,53	984,24	10,97
	September	310,04	9,02	638,81	11,43	948,85	10,51
2025	Maret	314,49	9,1	605,12	10,79	919,60	10,15
	September	310,56	8,91	587,68	9,85	898,24	9,85

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

2. Garis Kemiskinan merupakan suatu batas dalam mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

3. Komponen Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

**Tabel 5.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)								
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan & Pedesaan		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Mar-20	337.697	131.854	469.551	321.453	100.198	421.650	327.021	112.021	439.041
Sep-20	338.390	132.409	470.800	323.914	100.455	424.369	328.710	112.549	441.259
Mar-21	350.163	135.276	485.439	335.549	105.866	441.415	340.567	116.888	457.455
Sep-21	354.236	137.422	491.658	337.702	108.975	446.678	343.549	119.702	463.251
Mar-22	374.346	141.579	515.925	353.000	114.139	467.139	360.600	124.469	485.069
Sep-22	400.354	148.101	548.455	368.981	124.901	493.882	379.882	133.642	513.524
Mar-23	405.674	150.428	556.102	373.072	127.616	500.688	384.507	136.247	520.754
Mar-24	433.537	156.059	589.596	402.078	131.714	533.792	413.237	140.960	554.197
Sep-24	447.563	155.742	603.305	409.879	131.942	541.821	423.507	140.955	564.462
Mar-25	465.384	159.166	624.550	420.834	136.419	557.253	436.639	145.063	581.702
Sep-25	487.536	166.633	654.169	441.593	140.814	582.407	458.362	150.682	609.044

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

### 5.3.2. Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan

Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 tercatat sebesar **1,541**, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar **1,642**. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Rp609.044,00 per kapita per bulan) semakin membaik, dengan jarak semakin sempit antara pendapatan mereka dengan garis kemiskinan tersebut. Sementara, pada September 2025 Indeks Kearifan

Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya yaitu dari 0,371 menjadi 0,384, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin lebar (Tabel 5-5).

**Secara spasial, pada September 2025, P1 di wilayah pedesaan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.** Nilai P1 di pedesaan tercatat sebesar 1,549, sementara di perkotaan sebesar 1,529. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di pedesaan masih relatif lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan, meskipun kesenjangan semakin menyempit dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, untuk P2, pada September 2025 justru tercatat lebih tinggi di wilayah perkotaan sebesar 0,429 dibandingkan pedesaan sebesar 0,355. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan relatif lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan pada periode laporan.

**Tabel 5.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan**

Periode	Kota	Desa	Kota & Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2022	1,997	1,938	1,961
September 2022	1,855	1,749	1,789
Maret 2023	1,784	1,688	1,724
Maret 2024	1,688	2,011	1,888
September 2024	1,032	1,705	1,449
Maret 2025	1,484	1,739	1,642
September 2025	1,529	1,549	1,541
Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)			
Maret 2022	0,472	0,438	0,451
September 2022	0,423	0,364	0,386
Maret 2023	0,433	0,369	0,393
Maret 2024	0,390	0,499	0,457
September 2024	0,178	0,400	0,316
Maret 2025	0,330	0,397	0,371
September 2025	0,429	0,355	0,384

Sumber: BPS Sumatera Selatan

### 5.3.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

**Kondisi ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan.** Hal ini tercermin dari rasio gini yang tercatat sebesar 0,298 tercatat pada September 2025, lebih rendah dibanding periode Maret 2025 yang sebesar 0,311. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Sumatera Selatan.

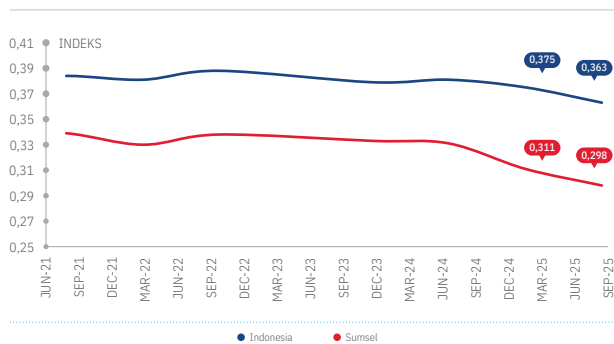
Rasio gini Sumatera Selatan lebih rendah dari rasio gini nasional yang tercatat sebesar 0,363 (Grafik 5-13). Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, posisi Sumatera Selatan menduduki

peringkat 13 dengan rasio gini terendah di Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,352, menurun dibanding Maret 2025 sebesar 0,370. Sementara itu, di daerah perdesaan, rasio gini tercatat sebesar 0,215, menurun dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,224.

Penurunan rasio gini ini disebabkan oleh menurunnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 20% berpengeluaran tinggi di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 38,38% pada periode

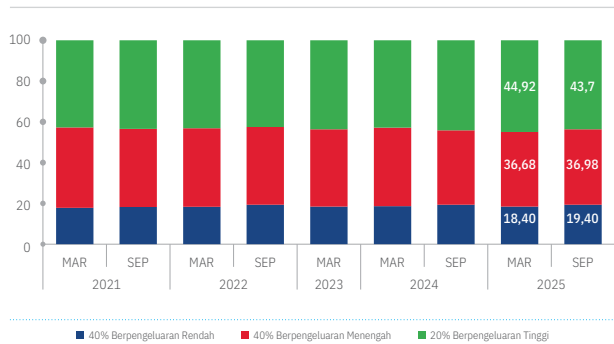
September 2025, menurun dari periode Maret 2025 yang sebesar 39,41% (Grafik 5-14). Adapun distribusi pendapatan kelompok 40% berpengeluaran terbawah pada September 2025 di perkotaan tercatat sebesar 19,32%, meningkat dibanding periode Maret 2025 yang tercatat sebesar 18,40% (Grafik 5-15). Selanjutnya, distribusi kelompok 20% berpengeluaran teratas di perdesaan turut mengalami penurunan dari 31,22% pada Maret 2025 menjadi 30,68% pada September 2025 (Grafik 5-16).

**Grafik 5.13. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional**



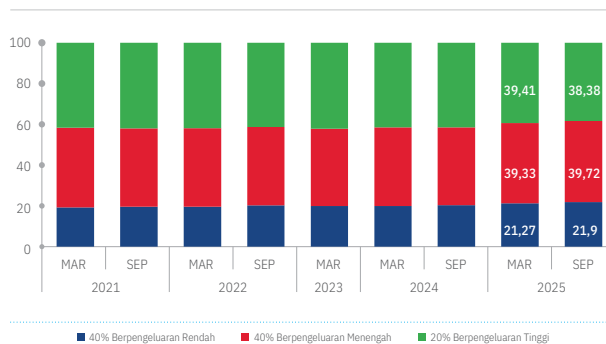
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 5.14. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk**



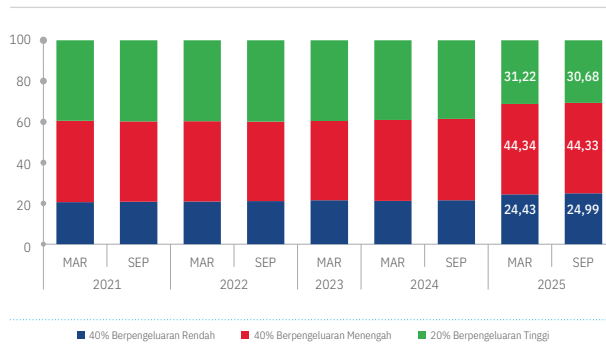
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 5.15. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

**Grafik 5.16. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan**



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah





# 06

## Prospek Perekonomian Daerah



Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2026, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.

- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar.
- Ke depan, inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar  $2,5\pm 1\%$ , mempertahankan capaian di tahun 2025.
- Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi dan hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan, mendorong digitalisasi, serta mendorong sektor ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

## 6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026

Perekonomian global pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, namun dengan prospek yang melemah dibandingkan prakiraan sebelumnya dan disertai ketidakpastian yang semakin tinggi. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF April 2026, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diproyeksikan sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan prakiraan WEO Update Januari 2026 sebesar 3,3%, dan diperkirakan meningkat terbatas menjadi 3,2% pada 2027. Laju pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan capaian sekitar 3,4% pada 2024–2025, serta masih berada di bawah rerata historis jangka panjang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perekonomian global masih memiliki daya tahan, namun ruang pemulihan menjadi lebih terbatas seiring meningkatnya tekanan dari sisi geopolitik dan energi. Sebelum terjadinya eskalasi konflik di Timur Tengah, prospek ekonomi global sebenarnya menunjukkan perbaikan, ditopang oleh masih kuatnya investasi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), kondisi keuangan global yang relatif akomodatif, pelemahan dolar AS, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter di sejumlah negara. Namun, konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026, termasuk gangguan terhadap jalur distribusi energi dan fasilitas produksi strategis, menjadi faktor utama yang menahan momentum pertumbuhan global tersebut.

Dampak konflik tersebut terutama bertransmisi melalui tiga jalur utama, yaitu kenaikan harga komoditas energi, peningkatan tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi, serta memburuknya sentimen pasar keuangan global. IMF memperkirakan harga komoditas energi meningkat signifikan pada 2026, dengan harga minyak naik sejalan dengan gangguan produksi dan transportasi di kawasan Timur Tengah. Kenaikan harga energi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi barang dan jasa yang intensif energi, termasuk transportasi, pupuk, bahan kimia, pangan, dan utilitas, sehingga menekan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,4% pada 2026, sebelum kembali menurun menjadi 3,7% pada 2027. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses disinflasi global menghadapi tekanan baru dari sisi pasokan, terutama apabila kenaikan harga energi berlanjut dan mulai memengaruhi pembentukan harga serta upah di berbagai negara. Risiko tersebut menjadi lebih besar di negara dengan ekspektasi inflasi yang belum sepenuhnya terjangkau, sehingga dapat mendorong respons kebijakan moneter yang lebih ketat dan pada akhirnya menahan pertumbuhan ekonomi.

Selain tekanan dari konflik geopolitik, prospek global juga masih dibayangi oleh berlanjutnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, fragmentasi ekonomi, dan perubahan pola rantai pasok global. Meredanya efek *front-loading* perdagangan yang

sebelumnya dilakukan pelaku usaha untuk mengantisipasi tarif berpotensi menahan volume perdagangan dunia pada 2026. Pada saat yang sama, dinamika tarif, penyesuaian hubungan dagang antarnegara, serta meningkatnya kecenderungan kebijakan yang lebih berorientasi domestik dapat menahan investasi dan perdagangan global. Risiko pasar keuangan global juga tetap perlu dicermati, terutama apabila kenaikan harga energi dan inflasi memicu sentimen *risk-off*, peningkatan premi risiko, penguatan dolar AS sebagai aset aman, serta arus modal keluar dari negara berkembang. Dalam kondisi tersebut, negara berkembang importir energi dan negara dengan buffer fiskal maupun eksternal yang terbatas menjadi lebih rentan terhadap tekanan nilai tukar, kenaikan biaya impor, pelebaran defisit eksternal, serta peningkatan beban subsidi atau dukungan fiskal. Dengan demikian, meskipun perekonomian global masih diperkirakan tumbuh, arah ke depan masih sangat bergantung pada durasi konflik, stabilitas harga energi, kredibilitas kebijakan moneter, serta kemampuan negara-negara menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas pasar keuangan.

**Inflasi global diperkirakan kembali meningkat pada 2026 seiring munculnya tekanan baru dari sisi pasokan, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan dan jalur distribusi energi global.** Menurut analisis IMF, inflasi *headline* global diproyeksikan meningkat dari 4,1% pada 2025 menjadi 4,4% pada 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses disinflasi global menghadapi tantangan baru, berbeda dari prakiraan sebelumnya yang mengarah pada penurunan inflasi yang lebih konsisten. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, termasuk pada sektor transportasi, pangan, pupuk, bahan kimia, dan utilitas, sehingga dapat menahan penurunan inflasi serta menekan daya beli masyarakat. Risiko inflasi juga dapat meningkat apabila kenaikan harga energi memengaruhi ekspektasi inflasi dan mendorong penyesuaian harga maupun upah secara lebih luas. Dalam konteks tersebut, arah kebijakan moneter global diperkirakan tetap berhati-hati dan berbeda antarnegara, bergantung pada kekuatan tekanan inflasi domestik, keterjangkaran ekspektasi inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, serta ruang kebijakan masing-masing negara.

Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global yang masih tinggi berpotensi mengganggu rantai pasok dunia serta menahan kinerja perdagangan dan investasi global. Konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko kenaikan harga komoditas, khususnya energi dan pangan, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses disinflasi dan memperbesar tekanan terhadap negara importir energi. Sejalan dengan itu, risiko gejolak di pasar keuangan global tetap perlu dicermati, terutama melalui

perubahan sentimen yang berlangsung cepat, peningkatan premi risiko, penguatan permintaan terhadap aset aman, serta potensi pengetatan kondisi keuangan global. Tekanan tersebut dapat berdampak lebih besar pada negara berkembang, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, buffer fiskal dan eksternal yang terbatas, serta kebutuhan pembiayaan eksternal yang besar. Dengan demikian, meskipun inflasi global diperkirakan kembali menurun pada 2027, prospek disinflasi masih rentan terhadap durasi konflik, perkembangan harga energi, kredibilitas kebijakan moneter, dan stabilitas pasar keuangan global.

Di tengah prospek pertumbuhan global yang masih positif namun semakin rentan akibat eskalasi konflik geopolitik, tantangan utama ke depan adalah menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui bauran kebijakan yang kredibel, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan dan jalur distribusi energi global meningkatkan risiko tekanan inflasi, pelemahan aktivitas ekonomi, serta gejolak pasar keuangan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter perlu tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkaran ekspektasi inflasi. Bank sentral di berbagai negara perlu tetap waspada dan siap merespons secara tegas apabila tekanan harga energi mulai memengaruhi ekspektasi inflasi dan mendorong efek lanjutan terhadap harga maupun upah. Namun, apabila ekspektasi inflasi tetap terjaga dan tekanan harga bersifat sementara, respons kebijakan moneter perlu tetap terukur agar tidak memperdalam perlambatan ekonomi. Komunikasi kebijakan yang transparan serta kredibilitas dan independensi bank sentral menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan pelaku ekonomi.

Di sisi fiskal, ruang kebijakan yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi dan pangan. Dukungan fiskal perlu dirancang secara hati-hati, terarah, bersifat sementara, serta tetap konsisten dengan rencana fiskal jangka menengah. Kebijakan subsidi atau kompensasi yang terlalu luas perlu

dihindari karena berisiko meningkatkan beban fiskal, mengurangi efektivitas sinyal harga, dan memperbesar kerentanan makroekonomi. Sejalan dengan itu, pembangunan kembali *buffer* fiskal tetap perlu menjadi prioritas melalui penguatan penerimaan, peningkatan efisiensi belanja, reprioritisasi anggaran, serta pengelolaan utang yang *prudent*. Di tengah risiko pengetatan kondisi keuangan global dan meningkatnya premi risiko, penguatan pengawasan sektor keuangan, kecukupan likuiditas, serta kesiapan instrumen stabilisasi pasar juga menjadi bagian penting dari respons kebijakan.

Lebih lanjut, meningkatnya fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional. Kejelasan arah kebijakan perdagangan antarnegara, transparansi implementasi kebijakan, serta penguatan pendekatan berbasis aturan (*rules-based*) diperlukan untuk menurunkan ketidakpastian dan mendukung pemulihan investasi. Negara-negara juga perlu terus mendorong integrasi perdagangan yang lebih terbuka, terukur, dan dapat diprediksi, termasuk melalui modernisasi arsitektur perdagangan internasional yang lebih adaptif terhadap ekonomi digital, rantai pasok strategis, serta perkembangan teknologi a.l. AI. Dalam konteks ketidakseimbangan eksternal yang masih persisten, diplomasi perdagangan perlu diiringi dengan penyesuaian makroekonomi yang menasar faktor fundamental, bukan semata melalui pembatasan perdagangan. Dengan demikian, koordinasi kebijakan global, stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan reformasi struktural menjadi prasyarat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dunia serta menopang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

**Prospek perdagangan internasional pada 2026 diperkirakan masih terbatas di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, berlanjutnya penyesuaian kebijakan perdagangan global, serta risiko gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah.** Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) IMF April 2026, volume perdagangan dunia barang dan jasa diperkirakan melambat dari 5,1% pada 2025 menjadi 2,8% pada 2026, sebelum kembali meningkat menjadi 3,8% pada 2027. Perlambatan tersebut mencerminkan normalisasi aktivitas perdagangan setelah tingginya pertumbuhan pada 2025, yang antara lain didorong oleh *front-loading* impor untuk mengantisipasi tarif, serta masih tertahannya permintaan global di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian kebijakan. Di sisi lain, perdagangan terkait teknologi masih menjadi penopang, khususnya melalui ekspor semikonduktor dan perangkat pendukung investasi digital serta AI, terutama di kawasan Asia. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan dari pelemahan perdagangan pada kelompok barang lainnya dan perubahan pola rantai pasok global.

**Tabel 7.1. Global Economic Outlook**

Wilayah	2024	2025	2026*
World	3,3	3,3	3,1
US	2,8	2,1	2,3
Euro Area	0,9	1,4	1,1
Japan	-0,2	1,1	0,7
China	5	5	4,4
India	6,5	7,3	6,5

Sumber: WEO IMF, \*) estimasi

**Tabel 7.2. Volume Perdagangan Internasional**

	2024	2025	2026*
Volume Perdagangan Internasional	3,8	5,1	2,8
Negara Maju			
Impor	2,1	4,7	2,6
Ekspor	1,8	3,7	2,5
Negara Berkembang			
Impor	5,6	5,7	2,7
Ekspor	6,5	7,4	3,5

Sumber: WEO IMF, \*) estimasi

Ke depan, risiko terhadap perdagangan global masih cenderung ke bawah. Ketidakpastian kebijakan perdagangan, termasuk dinamika tarif dan peninjauan kembali sejumlah kesepakatan dagang, masih dapat memicu peningkatan volatilitas dan menahan keputusan investasi pelaku usaha. Pada saat yang sama, fragmentasi geoekonomi mendorong pergeseran pola perdagangan antarnegara, antara lain melalui diversifikasi mitra dagang, penyesuaian sumber impor, serta reorientasi ekspor dari pasar tradisional ke kawasan lain. Konflik di Timur Tengah juga meningkatkan risiko gangguan jalur logistik dan kenaikan biaya energi, yang dapat memperbesar biaya perdagangan, menekan margin dunia usaha, serta menghambat pemulihan volume perdagangan. Dengan demikian, meskipun volume perdagangan dunia diperkirakan membaik pada 2027, prospeknya masih sangat bergantung pada meredanya ketegangan geopolitik, kejelasan arah kebijakan perdagangan, stabilitas harga energi, serta kemampuan negara-negara menjaga keterbukaan dan kepastian aturan dalam sistem perdagangan internasional.

Ke depan, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tetap dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi terutama perang dagang terus berlanjut, termasuk dampaknya terhadap kembali naiknya harga energi dan pangan, serta lebih lamanya pengetatan kebijakan moneter khususnya di negara maju untuk menurunkan tingkat inflasi kembali ke sasarannya di masing-masing negara.

Untuk mengatasi tingginya dan dampak buruk fragmentasi dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia melakukan penguatan diplomasi ekonomi internasional dengan meningkatkan kolaborasi lembaga antara bank sentral dan kementerian luar negeri dalam pengelolaan persepsi positif Indonesia untuk mendorong investasi dan perdagangan, perumusan kebijakan luar negeri untuk meningkatkan peran dan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan konektivitas sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan

syariah di level internasional. Selain itu, Indonesia juga terus menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan bauran kebijakan dalam berbagai fora internasional.

## 6.2. Prospek Makroekonomi Keseluruhan Tahun 2026

**Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kinerja perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan diperkirakan meningkat pada 2026.** Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%, didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dari sisi permintaan, penguatan konsumsi rumah tangga tetap penting untuk menopang permintaan domestik, di samping dorongan investasi yang perlu terus ditingkatkan. Dari sisi eksternal, berbagai upaya peningkatan ekspor dan penguatan daya saing tetap diperlukan untuk meredam dampak perlambatan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Sejalan dengan itu, sejumlah indikator dan hasil survei terkini menunjukkan prospek yang tetap positif, antara lain keyakinan konsumen, penjualan eceran, PMI manufaktur, serta ekspektasi kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Ketahanan sektor eksternal Indonesia juga tetap terjaga di tengah dinamika global, tercermin pada kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat.

Sebagai bagian dari strategi kebijakan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial serta akselerasi digitalisasi dalam transaksi pembayaran diperkuat untuk bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah, yang mencakup pembiayaan ekonomi, digitalisasi, hilirisasi industri, serta ketahanan pangan.

**Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.** Dalam konteks aliran modal global ke negara berkembang yang masih bersifat selektif serta ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dan memperkuat strategi operasi moneter *pro-market*, termasuk melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, guna menjaga daya tarik aset keuangan domestik, mendorong aliran masuk modal asing, dan memperkuat stabilitas Rupiah. Selain itu, implementasi kebijakan Pemerintah terkait DHE SDA turut mendukung penguatan pasokan valas domestik dan menopang stabilitas nilai tukar.

**Dalam aspek inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional akan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%.** Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau, kapasitas perekonomian yang memadai untuk merespons permintaan domestik. Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran juga terus mendukung efisiensi distribusi dan transaksi, sehingga turut menopang stabilitas harga. Namun, perlu dicermati risiko *imported inflation* sebagai imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang dapat berdampak pada kenaikan biaya bahan baku dan biaya distribusi. Ke depan, sinergi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk melalui penguatan TPIP/TPID, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi nasional.

**Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tetap resilien dan menguat pada kisaran 5,0–5,8%.** Prospek tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat pada kisaran 4,9–5,7% serta tetap resiliennya perekonomian global, meskipun perdagangan dunia melambat seiring normalisasi pola front-loading. Pertumbuhan ekonomi Sumsel di 2026 diperkirakan ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan stimulus fiskal pemerintah pusat, akselerasi program prioritas (Asta Cita) termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi di Sumatera Selatan, peningkatan produksi migas, serta perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan kelembagaan ekonomi (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/KDKMP). Dukungan terhadap konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tetap terjaga, antara lain seiring penyesuaian UMP dan stimulus pada momen HBKN (diskon tarif transportasi). Namun demikian, laju pertumbuhan Sumsel berpotensi tertahan oleh pelemahan permintaan batu bara di tengah ketidakpastian global, melambatnya perdagangan dunia, normalisasi harga komoditas unggulan, serta terbatasnya penambahan proyek strategis baru, sehingga ruang akselerasi pertumbuhan perlu terus diperkuat melalui sinergi kebijakan dan percepatan investasi.

**Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh pada tahun 2026. Peningkatan UMP Sumatera Selatan yang signifikan sebesar 7,1% mendorong kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2026.** Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi adanya kebijakan diskon listrik PLN yang mendorong peningkatan pendapatan riil masyarakat. Di samping itu, TPIP dan TPID juga terus melakukan upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Berlanjutnya penyaluran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga ikut menopang peningkatan konsumsi RT di tahun 2025. Namun demikian, permintaan masyarakat sedikit

tertahan akibat adanya penurunan permintaan global berpotensi menekan harga komoditas ekspor Sumatera Selatan seperti batu bara, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan pekerja industri dan sektor bisnis terkait.

**Konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh akseleratif dibanding tahun sebelumnya.** Akselerasi tersebut didorong oleh normalisasi realisasi belanja pemerintah pusat pascapenyesuaian/pengetatan pada 2025, serta meningkatnya kebutuhan belanja untuk mendukung program prioritas Pemerintah, khususnya penguatan swasembada/ketahanan pangan, implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih. Namun demikian, ruang fiskal daerah pada 2026 tetap menghadapi tantangan seiring informasi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk 18 Pemda di Sumatera Selatan menjadi Rp24,31 triliun (turun Rp9,31 triliun dibanding 2025 sebesar Rp33,63 triliun), sehingga berpotensi meningkatkan tekanan pembiayaan belanja layanan dasar dan infrastruktur, khususnya apabila PAD belum cukup kuat.

**Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan turut ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) yang menguat.** Akselerasi investasi terutama didorong oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis, khususnya proyek konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Sumsel, serta progres proyek sumber daya air berupa bendungan dan daerah irigasi yang mendukung ketahanan pangan dan pengendalian banjir. Selain proyek pemerintah, investasi swasta diperkirakan tetap berperan melalui penguatan kapasitas sektor energi dan industri pengolahan. Dari sisi energi, peningkatan kapasitas operasional pembangkit listrik di wilayah Sumsel memperkuat keandalan pasokan listrik regional dan menopang aktivitas ekonomi turunannya. Dari sisi industri pengolahan, keberlanjutan ekspansi/penyelesaian proyek pada industri pulp dan kertas serta investasi baru pada hilirisasi komoditas termasuk pengolahan kelapa terpadu diperkirakan turut memperkuat kinerja PMTB Sumatera Selatan pada 2026.

Ekspor Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan tertahan, terutama dipengaruhi oleh faktor sisi penawaran dan logistik komoditas unggulan. Dari sisi produksi, kebijakan pengurangan produksi di 2026 yang termaktub pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara berpotensi menahan fleksibilitas volume produksi dan pengapalan, karena realisasi produksi/penjualan perlu menyesuaikan kuota serta proses persetujuan dan evaluasi RKAB. Kondisi ini menyebabkan ekspor—khususnya komoditas batu bara—tidak sepenuhnya dapat merespons peluang permintaan dan harga secara cepat, sehingga kinerja ekspor cenderung lebih moderat. Dari sisi distribusi, pemberlakuan pelarangan angkutan batu bara

melintasi jalan umum di Sumatera Selatan (mulai 1 Januari 2026) dapat menyebabkan peralihan pengangkutan ke jalan khusus/*hauling* dan skema logistik alternatif, yang pada fase awal berpotensi menurunkan kelancaran pengiriman walaupun bersifat sementara. Selain itu, berkurangnya ketersediaan bahan baku karet dapat menyebabkan kinerja ekspor produk turunan karet turut tertahan di tahun ini.

**Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan ditopang oleh kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama yang tetap tumbuh solid, terutama LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi.** Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif dan penguatan dukungan sisi hulu melalui percepatan program ketahanan pangan, antara lain perluasan areal tanam melalui cetak sawah dan pengembangan padi gogo, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta penguatan pendampingan/bantuan sarana produksi untuk mendorong produktivitas. Efisiensi biaya produksi pertanian juga diperkirakan membaik seiring penguatan ketersediaan input dan perbaikan tata kelola distribusi, sehingga mendukung peningkatan output dan pendapatan petani. Selain tanaman pangan, subsektor perkebunan—khususnya kelapa sawit—diprakirakan tetap berkontribusi positif, didukung oleh kebutuhan domestik yang relatif kuat, termasuk dari implementasi program mandatori pemanfaatan biodiesel. Di sisi lain, LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh seiring kuatnya konsumsi rumah tangga, dukungan aktivitas musiman (HBKN), dan UMP yang lebih tinggi. Adapun LU Konstruksi diperkirakan tetap terjaga didorong oleh keberlanjutan proyek infrastruktur pemerintah pusat, meskipun tetap perlu mencermati risiko penyesuaian realisasi belanja modal daerah. Sedangkan dari sisi investasi swasta, berlanjutnya pembangunan pabrik tisu di Kab. OKI dan pabrik *crude coconut oil* di Kab. Banyuasin menjadi sentimen pendorong kinerja LU Konstruksi di tahun ini.

**Sementara itu, kinerja LU pertambangan Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2025.** Moderasi kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya ruang peningkatan produksi batu bara seiring penyesuaian RKAB 2026, serta friksi distribusi akibat implementasi pelarangan angkutan batu bara melalui jalan umum yang mendorong penyesuaian rantai logistik (peralihan ke jalan khusus/kereta) dan berpotensi menahan kelancaran pengiriman pada fase awal. Selain itu, faktor cuaca (curah hujan ekstrem pada periode awal tahun) juga berpotensi mengganggu aktivitas produksi dan *hauling*, sehingga menahan kinerja sektor pertambangan secara keseluruhan.

**Sejalan dengan itu, LU Industri Pengolahan pada 2026 diperkirakan turut tumbuh melambat.** Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan produksi pada subsektor berbasis komoditas—khususnya CPO serta *pulp & paper* seiring keterbatasan bahan baku akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif, sehingga menahan utilisasi/volume produksi. Dengan demikian, meskipun permintaan domestik dan perbaikan harga pada sebagian komoditas tetap menjadi bantalan, kinerja LU Industri Pengolahan pada 2026 diperkirakan tidak sekuat tahun sebelumnya.

### 6.3. Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

**Mencermati dinamika inflasi global yang diperkirakan melanjutkan tren penurunan serta stabilitas inflasi nasional, inflasi Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).** Inflasi yang relatif stabil tersebut terutama mencerminkan laju perekonomian yang tinggi, namun tetap terkendali seiring dukungan ketahanan pasokan pangan daerah, stabilitas nilai tukar, serta ekspektasi inflasi yang relatif terjaga di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas inflasi Sumsel pada 2026 ditopang oleh penguatan sisi pasokan melalui program ketahanan pangan terutama peningkatan produktivitas pertanian, antara lain optimalisasi lahan, perluasan cetak sawah, serta penguatan infrastruktur irigasi dan bendungan yang mendukung kontinuitas produksi sepanjang tahun. Upaya tersebut diperkuat oleh dukungan sarana produksi dan alsintan, perbaikan tata kelola budidaya dan pascapanen, serta penguatan kelembagaan dan pendampingan, sehingga pasokan komoditas pangan strategis lebih terjaga dan tekanan harga dapat diredam.

Meski demikian, sejumlah risiko inflasi tetap perlu dicermati. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global dan penyesuaian kebijakan perdagangan berpotensi memicu volatilitas harga komoditas dunia. Kondisi ini dapat mendorong tekanan inflasi impor, termasuk melalui volatilitas harga emas global yang berimplikasi pada harga emas perhiasan, serta potensi kenaikan biaya impor sejumlah komoditas. Dari sisi domestik, kenaikan UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar 7,1% berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa serta menguatkan konsumsi rumah tangga, terutama pada fase awal tahun.

Tekanan dari kelompok harga yang diatur pemerintah juga perlu diwaspadai, terutama apabila terjadi kenaikan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga energi domestik atau gangguan produksi/distribusi energi yang meningkatkan biaya logistik. Di sisi lain, penetapan/penyesuaian tarif layanan tertentu di wilayah tertentu dapat menambah tekanan harga

pada kelompok rumah tangga terdampak. Selain itu, transmisi penyesuaian kebijakan cukai rokok yang telah berjalan sejak 2025 berpotensi masih berlanjut memengaruhi harga rokok di pasar pada 2026.

Dari perspektif keseimbangan risiko, tekanan inflasi dari sisi komoditas pangan pada 2026 cenderung lebih terkendali apabila program peningkatan produktivitas padi dan penguatan langkah pengendalian inflasi pangan berjalan efektif, termasuk penguatan GIPS, perluasan GSMP (termasuk *goes to pesantren*), serta penguatan *link-matching* kelembagaan/ agregator pangan dengan *offtaker*. Sementara itu, risiko inflasi yang bersumber dari penguatan permintaan dan kenaikan biaya produksi cenderung lebih mengarah ke atas, sejalan dengan sensitivitas terhadap harga energi, dinamika harga komoditas impor tertentu, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat melalui pelaksanaan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027, yang mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan stabilisasi harga pangan; peningkatan ketersediaan pasokan melalui pengembangan lumbung pangan, perluasan lahan hortikultura, dan optimalisasi irigasi; kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah dan perbaikan infrastruktur logistik; serta komunikasi efektif melalui penguatan kualitas data dan sosialisasi pengendalian ekspektasi inflasi. Pelaksanaan program GNPIP, kerja sama antardaerah (KAD), subsidi ongkos angkut, dan intervensi pasar terkoordinasi menjadi instrumen kunci menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, dengan koordinasi kebijakan yang kuat dan konsisten, inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam lintasan yang mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah. Penguatan pasokan pangan lokal, efisiensi distribusi, serta pengelolaan risiko harga energi dan komoditas global menjadi kunci keberlanjutan stabilitas inflasi di Sumatera Selatan.

#### 6.4. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di level global, nasional, dan Sumatera Selatan di 2025 dan proyeksi di 2026, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan perlu memperkuat sinergi dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan antara lain:

#### 1) Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Pangan

Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat lumbung pangan nasional, yang terlihat dari produksi padi 2,83 juta ton di 2023 (tertinggi kelima se-nasional). Namun demikian, beras menjadi penyumbang andil inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan. Adapun peluang dan tantangan dari sisi produksi antara lain masih kurangnya infrastruktur pengembangan lahan rawa untuk pertanian; tingginya biaya produksi terutama dari harga dan ketersediaan pupuk; dan hambatan pada akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi petani. Dari sisi distribusi, inefisiensi logistik dan maraknya sistem ijon dengan tengkulak ditengarai menyebabkan panjangnya rantai distribusi beras di Sumsel. Hal ini tercermin dari tingginya Marginal Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas strategis dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, MPP beras mencapai 34,16% dan cabai merah 41,41%, menandakan tingginya disparitas harga dan biaya distribusi antarwilayah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan maupun pengendalian inflasi. Kolaborasi ini perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan sesuai Program Asta Cita, yang pada gilirannya mendukung daya beli dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

##### a) Keterjangkauan Harga

- Perluasan program kios/toko/warung pengendalian inflasi
- Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat

##### b) Ketersediaan Pasokan

- Mendorong produksi pangan lokal
- Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai
- Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan nelayan, a.l. melalui KUR

##### c) Kelancaran Distribusi

- Penguatan sistem distribusi dan rantai pasokan melalui perbaikan tata niaga
- Optimalisasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
- Peningkatan kualitas infrastruktur logistik
- Digitalisasi UMKM pangan

##### d) Komunikasi Efektif

- Diversifikasi komoditas pangan masyarakat
- Mendorong kemitraan antara petani dan industri (*contract farming*)
- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi

## 2) Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan signifikan meskipun telah terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 8,91%, yang merupakan pencapaian terendah dalam beberapa tahun terakhir, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten/kota, tujuh daerah sudah mencapai tingkat kemiskinan satu digit, tetapi masih ada beberapa wilayah yang menghadapi kemiskinan ekstrem, terutama di kabupaten seperti Lahat, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, dan Empat Lawang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak, serta ketidakmampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kontribusi besar dari komoditas seperti beras dan rokok terhadap garis kemiskinan.

Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan perlu diterapkan antara lain melalui:

### a) Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

- Memperkuat jaring pengaman sosial melalui program bantuan sembako dan bantuan tunai dengan penyaluran yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem.
- Mengadakan operasi pasar murah secara rutin di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi guna menekan harga kebutuhan pokok, terutama beras.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan dengan mendorong daya beli melalui program-program kemandirian ekonomi.

### b) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin

- Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan pendampingan usaha bagi UMKM.
- Mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan inklusi keuangan untuk memastikan masyarakat miskin memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi guna mengelola risiko ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha.

### c) Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Antarperangkat Daerah

- Memastikan implementasi strategi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.
- Mengoptimalkan peran instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi inklusif bagi masyarakat miskin.

## 3) Mengakselerasi Investasi untuk Mendorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

Investasi memegang peran yang sangat krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Pada triwulan I 2026, kontribusi investasi terhadap PDRB mencapai 30,09%, menjadikannya salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Porsi yang signifikan ini menunjukkan bahwa percepatan investasi berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat dibandingkan komponen PDRB lainnya. Lebih jauh, investasi tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam transformasi ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, potensi investasi di Sumatera Selatan belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Beberapa kendala masih perlu ditangani, antara lain belum optimalnya proses realisasi proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek swasta, serta keterbatasan insentif fiskal yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dapat mengurangi daya tarik investor, terutama ketika dibandingkan dengan daerah lain yang menawarkan skema insentif dan fasilitas yang lebih kompetitif.

Selain itu, struktur ekonomi Sumatera Selatan hingga kini masih ditopang oleh ekspor komoditas unggulan berbasis sumber daya alam mentah, terutama batu bara, kelapa sawit, dan karet. Ketergantungan ini menjadikan perekonomian daerah sangat rentan terhadap gejolak global, baik berupa fluktuasi harga internasional maupun perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Setiap kali terjadi penurunan harga komoditas, tekanan langsung dirasakan pada kinerja ekspor, penerimaan daerah, hingga daya beli masyarakat. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk melakukan hilirisasi komoditas agar perekonomian Sumatera Selatan lebih tahan terhadap guncangan global. Dengan mendorong proses pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan, penciptaan lapangan kerja lebih luas, serta struktur industri daerah menjadi lebih kokoh. Namun, proses hilirisasi masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya akses terhadap teknologi modern, hingga infrastruktur logistik yang belum memadai.

Untuk mendorong hilirisasi, optimalisasi investasi menjadi prasyarat utama. Investasi yang masuk perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada penggalian dan ekspor bahan mentah, tetapi juga mendukung transformasi struktural melalui pengolahan lanjutan di daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat *soft infrastructures* dan *hard infrastructures* sebagai penopang iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

#### a) Penguatan *Soft Infrastructures*

- **Koordinasi tata ruang dan perizinan:** memperkuat sinergi dalam penyusunan RTRW dan RDTR, sekaligus memastikan perizinan investasi berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- **Regulasi insentif fiskal daerah:** mendorong penyusunan kebijakan turunan berupa pengurangan pajak dan retribusi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna meningkatkan daya tarik investor.
- **Optimalisasi sistem OSS berbasis risiko (RBA):** meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas aplikasi OSS agar proses perizinan investasi lebih cepat, transparan, dan efisien.
- **Sinergi pusat-daerah:** memperkuat koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mengatasi hambatan birokrasi.

#### b) Penguatan *Hard Infrastructures*

- **Infrastruktur konektivitas:** membangun dan memperkuat jalan antarkota, *hauling road*, serta jalur kereta logistik guna memperlancar distribusi bahan baku dan produk olahan. Selain itu, realisasi pembangunan *New Palembang Port* sebagai pelabuhan baru mampu menampung kapal berkapasitas besar, sekaligus mendukung pelabuhan eksisting (Boom Baru).
- **Kawasan industri siap pakai:** memastikan ketersediaan lahan *clean and clear* serta mempercepat pengembangan kawasan industri strategis (KEK Tanjung Api-Api, Tanjung Enim, Sriwijaya CBD) agar investor mendapatkan kepastian lokasi usaha.
- **Ketersediaan energi dan air:** menjamin pasokan energi listrik dan air baku yang memadai serta berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas industri.

Selain memperbaiki iklim investasi, langkah yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan efektif. Strategi ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan insentif, tetapi juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, teknologi

pengolahan yang memadai, serta diversifikasi produk hilir yang mampu bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kualitas SDM menjadi kunci, antara lain melalui program *link and match* antara institusi pendidikan dengan kebutuhan industri, pendirian sekolah vokasi dan pusat pelatihan berbasis kemitraan dengan swasta, serta insentif bagi perusahaan yang aktif dalam menyediakan program magang bersertifikat. Di sisi lain, kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga riset, dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat transfer teknologi hilirisasi serta pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Tujuan hilirisasi sendiri mencakup diversifikasi produk olahan dari komoditas unggulan Sumatera Selatan. Batu bara diarahkan pada pengembangan gasifikasi, Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, pupuk, dan bahan kimia dasar. Kelapa sawit ditujukan untuk menghasilkan produk oleokimia, biodiesel, serta pangan olahan. Sementara karet memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk ban kendaraan, sarung tangan medis, hingga kebutuhan industri lainnya. Dengan diversifikasi tersebut, struktur ekonomi akan lebih bernilai tambah, menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekspor daerah.

#### 4) Mengembangkan Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, yang tercermin dalam penurunan peringkat dalam *East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025*. EV-DCI bertujuan untuk memetakan perkembangan pilar daya saing digital dan sektor yang turut membangun ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera Selatan turun enam peringkat dari peringkat 22 pada tahun 2024 menjadi peringkat 28 pada tahun 2025, dengan skor 37,1. Penurunan ini menunjukkan adanya urgensi perbaikan dalam beberapa aspek daya saing digital, terutama terkait dengan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan pada jaringan 4G di Sumatera Selatan, masih terdapat wilayah dengan blank spot, yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan internet yang memadai. Selain itu, masih belum optimalnya tingkat literasi digital dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi digital di Sumatera Selatan.

Untuk meningkatkan ekonomi digital di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil:

#### a) Perluasan Infrastruktur Digital

- Memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital, terutama di *blank spot* yang belum terjangkau layanan internet yang memadai.
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah (melalui TP2DD), pemerintah pusat, dan operator telekomunikasi untuk memastikan pemerataan akses internet, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.

#### b) Peningkatan Literasi Digital

- Menggalakkan program pelatihan digital bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha.
- Memperkuat regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), yang mendorong penggunaan layanan pembayaran nontunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

### 5) Mendorong Sektor Ekonomi dan Keuangan Hijau sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan ekonomi dan keuangan hijau merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang berkelanjutan. Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan diperlukan untuk mendorong proyek-proyek berbasis hijau, baik melalui penyediaan regulasi yang mendukung, pendanaan, maupun insentif fiskal. Dukungan antarpemangku kepentingan akan memastikan bahwa agenda pembangunan hijau tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Adapun LU Pertanian dan UMKM memiliki posisi strategis sebagai lokomotif ekonomi hijau di Sumatera Selatan. Implementasi praktik berkelanjutan di sektor pertanian—misalnya penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kelapa sawit—dapat meningkatkan daya saing, memperkuat akseptasi produk Sumatera Selatan di pasar internasional, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, integrasi pembiayaan hijau dalam mendukung UMKM dan petani akan membantu mereka mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan atau sistem irigasi hemat energi, sehingga tidak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga mengurangi emisi karbon.

Untuk mempercepat adopsi praktik ekonomi hijau di tingkat akar rumput, peran *local champion* sangat penting sebagai *role model*. *Local champion* merupakan pelaku UMKM yang

memiliki dedikasi tinggi, terbuka pada inovasi, serta mampu mendorong perubahan mindset di komunitasnya. Melalui program *capacity building*, pendampingan, dan *showcasing best practices*, *local champion* dapat menjadi motor penyebaran inovasi hijau ke kelompok-kelompok UMKM lainnya. Dengan sinergi Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia, penguatan kapasitas ini akan memperluas dampak ekonomi hijau secara lebih inklusif.

Selain penguatan di tingkat komunitas, langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah membangun ekosistem pembiayaan hijau yang kokoh. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait dapat memperkuat dukungan insentif bagi UMKM yang mengadopsi praktik berkelanjutan, sekaligus mendorong lembaga keuangan mengembangkan produk pembiayaan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah meluncurkan **Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)** yang memberikan keringanan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek ekonomi hijau. Dengan plafon insentif yang diperluas hingga 5% dan realisasi ratusan triliun rupiah secara nasional, KLM menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan hijau di daerah. Pemanfaatan KLM oleh perbankan di Sumatera Selatan, apabila dipadukan dengan kebijakan insentif fiskal daerah, akan memperkuat aliran kredit ke sektor pertanian berkelanjutan, hilirisasi komoditas, serta UMKM hijau. Sinergi ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Selatan menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.





3.399

3.917

6.774



4.023

4.264

5.165

8.715



3.901

2.999

1.364

2.164

3.713

5.619

6.177

7.774



# Lampiran

## A. Tabel Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Sumatera Selatan (mtm%)</b>													
2024	1	-0,08	-0,11	-0,80	0,10	0,07	0,21	-0,29	-0,07	-0,24	0,00	0,02	0,33
	2	0,01	0,20	-0,31	-0,05	0,02	0,07	-0,11	-0,11	-0,36	0,01	0,01	-0,08
	3	0,25	0,55	-0,40	0,03	-0,22	-0,03	0,12	-0,14	0,00	0,00	0,55	0,64
	4	0,43	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	0,00	0,02	0,12
	5	0,06	-0,05	-0,28	0,17	-0,70	0,05	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,28	1,01
	6	-0,03	-0,48	0,25	0,28	-0,01	0,17	0,24	0,00	0,43	0,00	0,16	0,26
	7	-0,29	-1,68	0,35	-0,10	0,07	0,62	0,29	0,04	0,82	1,73	0,01	0,68
	8	-0,19	-1,06	0,17	0,03	0,16	0,24	0,32	0,01	-0,02	0,04	0,01	0,84
	9	-0,12	-0,51	-0,03	0,08	0,12	0,08	-0,12	-0,04	0,06	0,04	0,09	0,29
	10	0,09	0,07	0,02	0,11	0,00	0,00	-0,45	0,02	0,20	0,00	0,00	1,34
	11	0,58	1,49	-0,03	0,03	-0,14	0,14	0,40	0,01	-0,36	0,05	0,10	0,93
	12	0,50	1,72	0,00	-0,10	-0,03	0,19	-0,06	-0,01	0,08	0,00	0,03	-0,13
2025	1	-0,36	2,27	-0,21	-8,35	0,02	0,06	0,20	-0,07	0,45	0,00	0,21	0,86
	2	-0,41	-0,79	0,06	-3,58	0,23	0,07	0,51	-0,02	0,20	0,00	0,04	2,71
	3	1,53	1,18	1,15	7,71	-0,04	0,18	-0,17	-0,01	0,04	0,00	0,01	1,98
	4	1,39	0,48	-0,03	6,09	0,09	0,00	0,48	-0,39	0,08	0,00	0,18	4,63
	5	-0,35	-0,81	-0,79	-0,01	-0,11	0,00	-0,11	0,08	0,04	0,00	0,47	-0,86
	6	0,08	-0,10	0,11	-0,03	0,08	0,31	0,02	0,01	0,69	0,00	0,07	0,92
	7	0,14	0,30	-0,15	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,00	0,02	0,68	0,06	0,27
	8	-0,04	-0,24	0,01	0,11	0,16	0,01	-0,23	-0,05	-0,07	0,07	0,06	0,44
	9	0,27	0,41	-0,19	-0,01	-0,09	0,10	0,03	0,02	-0,03	0,07	0,06	1,67
	10	0,13	-0,30	-0,11	-0,02	-0,18	-0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	2,95
	11	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,07	0,05	-0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,32
	12	0,49	1,06	-0,08	0,06	0,03	-0,01	0,39	0,00	-0,01	0,00	0,13	1,11
2026	1	0,05	-1,14	0,11	0,09	0,04	0,08	-0,38	-0,01	0,00	0,16	0,01	4,81
	2	0,58	1,11	0,11	0,00	0,02	-0,01	-0,21	0,07	-0,06	0,00	0,05	2,76
	3	0,29	0,80	0,82	0,02	0,12	0,06	0,63	0,09	0,00	0,00	0,08	-1,07

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Palembang (mtm%)</b>													
2024	1	-0,02	0,17	-0,05	0,01	0,02	0,17	-0,59	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,27
	2	0,21	0,85	0,01	-0,02	0,04	0,11	-0,13	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,03
	3	0,46	1,68	-0,69	0,06	-0,24	-0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,20	0,34
	4	0,38	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	5	0,10	0,13	-0,02	-0,01	-0,94	0,08	0,25	0,01	0,00	0,00	0,17	1,00
	6	-0,07	-0,56	0,24	0,00	0,03	0,05	0,35	0,00	0,01	0,00	0,19	0,03
	7	-0,31	-2,15	0,25	-0,08	0,08	0,36	0,41	0,05	0,51	1,88	0,00	0,71
	8	-0,27	-1,40	-0,01	0,01	0,21	0,34	0,25	0,00	-0,06	0,06	0,00	0,40
	9	-0,13	-0,68	-0,01	0,05	0,17	0,05	-0,07	-0,03	0,07	0,00	0,13	0,27
	10	0,09	0,14	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	1,55
	11	0,39	0,91	0,18	-0,01	-0,23	0,19	0,52	0,00	-0,45	0,06	0,06	1,02
	12	0,42	1,80	0,03	0,03	0,12	0,26	0,11	0,02	0,40	0,00	0,01	0,32
2025	1	-0,47	2,43	-0,03	-7,70	0,08	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,09	0,96
	2	-0,30	-0,78	0,08	-2,94	0,26	0,10	0,59	-0,03	0,30	0,00	0,03	2,88
	3	1,52	1,22	0,36	7,25	-0,09	0,24	-0,22	0,00	0,06	0,00	0,00	2,08
	4	1,33	0,45	-0,04	4,95	0,13	-0,13	0,68	-0,40	0,13	0,00	0,25	4,34
	5	-0,19	-0,49	-0,03	-0,10	-0,21	-0,03	-0,05	-0,02	0,04	0,00	0,69	-0,99
	6	0,09	0,02	0,01	-0,06	0,14	0,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81
	7	0,17	0,39	0,01	0,05	0,10	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,67	0,08	0,45
	8	-0,07	-0,40	0,03	0,11	0,24	-0,01	-0,25	-0,08	0,01	0,09	0,09	0,32
	9	0,30	0,61	-0,01	0,00	-0,17	0,17	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	1,69
	10	0,16	-0,17	-0,17	0,00	-0,30	-0,09	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
	11	-0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,12	0,06	-0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,19
	12	0,39	0,91	-0,14	0,02	0,04	-0,01	0,42	0,00	0,22	0,00	0,16	0,73
2026	1	0,05	-1,31	0,10	0,07	0,05	-0,02	-0,44	0,00	0,07	0,19	0,00	4,88
	2	0,58	1,35	-0,01	0,00	0,04	0,00	-0,15	0,10	-0,01	0,00	0,00	2,62
	3	0,28	0,97	1,05	0,00	0,12	0,08	0,60	0,12	0,00	0,00	0,02	-1,35

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
<b>Lubuklinggau (mtm%)</b>												
2024	1	-0,13	-0,56	0,00	0,08	0,06	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00	0,63
	2	0,20	0,77	0,00	0,02	-0,12	0,10	-0,43	0,05	-0,01	0,00	0,79
	3	0,30	0,56	0,23	0,05	0,01	0,00	0,19	-0,03	0,33	0,00	0,72
	4	0,36	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03
	5	0,14	0,28	0,02	0,15	0,19	-0,01	-0,22	-0,05	0,00	0,00	0,14
	6	-0,10	-0,45	0,00	0,23	-0,06	0,06	0,17	-0,44	-0,16	0,00	0,09
	7	-0,31	-1,34	0,09	0,02	-0,08	-0,11	-0,22	0,09	0,00	1,20	0,00
	8	-0,24	-1,28	0,01	0,07	0,10	0,18	0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00
	9	-0,06	-0,52	0,05	0,08	-0,04	0,04	-0,11	-0,01	0,06	0,58	0,16
	10	0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06	0,15	-0,41	0,00	-0,02	0,00	0,00
	11	0,26	0,59	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,25
	12	0,58	1,58	0,00	0,03	0,19	0,03	0,52	0,03	0,00	0,00	0,03
2025	1	-0,64	1,67	0,00	-8,59	0,42	0,73	0,03	-0,08	0,14	0,00	0,64
	2	-0,13	0,53	0,00	-4,08	0,75	-0,01	0,30	0,00	0,02	0,00	1,98
	3	1,41	1,06	0,33	7,67	-0,08	0,08	-0,45	0,01	0,01	0,00	0,13
	4	1,29	-0,02	0,00	7,31	-0,08	0,00	0,05	-0,46	0,00	0,00	0,26
	5	-0,21	-1,07	0,00	0,00	0,56	0,39	-0,05	-0,11	0,08	0,00	0,49
	6	0,11	0,08	0,00	0,00	-0,09	0,34	0,32	0,00	0,61	0,00	0,00
	7	0,21	0,28	0,50	0,10	0,15	0,00	0,03	0,00	1,36	0,65	0,91
	8	0,07	0,26	-0,01	0,00	0,01	0,10	-0,41	0,03	0,21	0,10	0,14
	9	0,27	0,29	0,00	0,00	0,01	0,10	0,23	0,04	0,00	0,75	0,07
	10	0,09	-0,65	0,06	0,00	0,13	0,02	0,03	0,07	0,02	0,00	0,17
	11	0,02	-0,23	0,15	-0,08	0,03	0,12	0,05	-0,06	0,04	0,00	0,00
	12	0,37	0,84	0,03	0,08	0,01	0,01	0,38	0,05	0,02	0,00	0,11
2026	1	0,03	-0,79	0,00	0,05	0,05	0,31	-0,13	0,00	-0,01	0,00	2,82
	2	0,41	0,45	0,03	0,00	0,04	-0,03	-0,13	0,12	0,00	0,00	2,89
	3	0,27	0,83	1,19	0,03	0,18	0,10	0,13	0,11	0,00	0,00	-1,17

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Ogan Komering Ilir (mtm%)</b>													
2024	1	-0,11	0,09	-4,36	0,88	0,37	0,33	-0,16	0,00	-0,55	0,00	0,06	0,31
	2	-0,13	-0,22	-0,11	-0,42	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,04	0,24
	3	0,05	-0,55	0,20	-0,15	-0,33	0,44	-0,01	-1,04	-0,17	0,00	2,19	2,23
	4	0,42	0,02	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12	0,12
	5	0,11	-0,08	-1,52	1,67	-0,04	-0,03	-0,03	-0,23	0,00	0,00	0,57	0,83
	6	0,19	-0,57	0,48	2,84	0,00	0,03	-0,05	0,24	2,75	0,00	0,00	1,60
	7	-0,40	-1,55	0,75	-0,37	0,07	2,89	0,00	0,00	3,52	1,61	0,06	1,19
	8	-0,18	-0,97	0,71	0,16	0,00	0,00	0,95	0,00	0,09	0,00	0,00	1,07
	9	-0,16	-0,36	-0,15	-0,01	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,07	0,16	0,00	0,26
	10	0,07	-0,26	0,13	1,35	0,00	0,00	-0,32	0,11	0,18	0,00	0,00	1,03
	11	0,92	2,20	-0,81	0,19	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,47	0,00	0,32	0,21
	12	0,70	1,62	0,10	-0,34	0,16	0,00	-0,05	0,00	0,23	0,00	0,06	0,55
2025	1	-0,03	2,16	-1,12	-11,76	-0,07	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,87	0,86
	2	-0,44	-0,40	0,04	-5,57	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	3	1,68	0,97	5,25	11,47	0,07	0,00	-0,21	-0,05	0,00	0,00	0,02	1,78
	4	1,34	0,19	0,00	10,82	0,01	0,00	-0,13	-0,38	0,00	0,00	0,00	5,56
	5	-0,49	-0,49	-4,36	0,00	-0,01	0,02	~0	0,38	0,00	0,00	0,00	-0,66
	6	0,09	-0,44	0,58	-0,01	-0,03	0,13	-0,20	0,00	4,46	0,00	0,27	12,16
	7	0,05	0,22	-1,07	-0,05	-0,19	0,14	0,20	0,00	0,00	1,07	0,00	0,11
	8	-0,11	-0,48	-0,04	0,21	0,00	-0,13	-0,06	0,00	-0,62	0,00	0,00	1,13
	9	0,03	-0,18	-1,09	-0,11	0,08	-0,25	0,02	0,00	-0,17	0,35	0,32	1,78
	10	0,05	-0,23	0,00	-0,16	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
	11	0,04	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
	12	0,67	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,03	0,00	0,00	0,09	1,60
2026	1	0,08	-0,71	0,30	0,07	0,02	0,01	-0,21	-0,13	0,00	0,00	0,00	4,61
	2	0,60	0,84	0,22	0,01	0,05	0,00	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,09	3,08
	3	0,36	0,80	0,49	0,12	0,18	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,79

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Muara Enim (mtm%)</b>													
2024	1	-0,28	-1,14	0,00	0,17	-0,05	0,50	1,66	-0,49	-0,96	0,00	0,10	0,58
	2	-0,93	-1,57	-2,28	-0,10	-0,05	-0,11	0,00	-0,80	-1,37	0,00	0,00	-1,03
	3	-0,69	-1,81	0,00	0,03	-0,02	0,44	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,64
	4	0,81	0,25	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14	0,00	0,06	0,00	0,01	0,30
	5	-0,29	-0,75	0,00	0,02	-0,72	0,00	-1,23	0,03	0,00	0,00	0,58	1,55
	6	-0,02	-0,09	0,05	0,01	-0,21	1,12	-0,19	-0,03	0,33	0,00	0,25	0,10
	7	-0,07	-0,30	0,42	0,01	0,12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,59	0,00	-0,09
	8	0,24	0,00	0,41	-0,01	0,07	-0,06	0,20	0,01	0,00	0,00	0,05	2,49
	9	-0,02	-0,14	0,01	0,43	0,03	0,30	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	10	0,12	0,20	0,00	-0,31	0,31	0,00	-0,18	0,07	-0,08	0,00	0,00	0,90
	11	1,28	2,85	0,00	0,26	0,11	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1,31
	12	0,60	1,70	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,02	0,00	-1,60	0,00	0,00	-0,07
2025	1	-0,02	2,06	0,00	-10,14	-0,40	0,14	0,38	-0,45	2,79	0,00	0,00	0,44
	2	-1,02	-1,73	0,00	-6,75	-0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,16	2,85
	3	1,40	1,34	0,00	7,92	0,08	0,15	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
	4	1,80	1,16	0,00	10,41	0,06	0,18	-0,10	-0,38	0,00	0,00	0,00	5,46
	5	-0,98	-2,19	0,00	0,68	-0,04	-0,11	-0,71	0,43	0,00	0,00	0,00	-0,96
	6	-0,04	-0,13	0,00	0,18	-0,01	-0,05	-0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,30
	7	0,06	0,15	0,00	0,68	-0,28	0,48	0,20	-0,37	2,22	0,42	0,16	10,23
	8	0,22	0,47	0,00	-0,01	0,03	0,34	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
	9	0,35	0,53	0,00	-0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
	10	0,13	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,73
	11	0,12	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
	12	0,85	1,40	0,00	0,41	0,04	0,00	0,33	0,01	-1,20	0,00	0,00	2,59
2026	1	0,06	-1,18	0,00	0,33	-0,02	0,62	-0,23	0,07	-0,25	0,00	0,00	5,45
	2	0,64	0,86	0,55	0,00	-0,14	-0,03	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,19	3,09
	3	0,24	0,22	-0,04	0,07	-0,04	-0,04	1,40	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,05

## B. Tabel Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Sumatera Selatan (yoy%)</b>													
2024	1	3,35	7,71	1,04	1,67	0,06	1,10	0,95	-0,13	2,35	2,18	2,17	3,52
	2	3,15	7,81	0,28	1,64	-0,01	1,30	0,91	-0,21	1,51	1,65	1,51	2,75
	3	3,24	8,13	-0,50	1,83	-0,24	1,34	0,75	-0,38	1,45	1,62	1,78	3,03
	4	9,00	7,61	-1,39	1,84	-0,44	1,19	0,80	-0,47	1,90	1,62	1,82	4,15
	5	2,98	6,64	-1,68	2,02	-1,31	1,24	1,64	-0,52	1,63	1,47	2,05	5,12
	6	2,48	4,44	-1,18	2,30	-1,30	1,26	1,91	-0,51	2,07	1,47	1,97	5,94
	7	1,87	2,02	-1,40	2,17	-0,86	1,92	2,04	-0,28	1,61	2,86	1,59	6,45
	8	1,80	1,72	-1,18	2,17	-0,78	1,65	2,02	-0,26	2,00	1,78	1,56	7,29
	9	1,40	0,47	-1,41	2,17	-0,61	1,73	1,81	-0,42	2,67	1,82	1,53	7,35
	10	1,09	0,20	-1,39	0,70	-0,54	1,71	1,13	-0,39	2,05	1,82	1,40	8,51
	11	0,73	-1,21	-1,17	0,68	-0,64	1,78	1,60	-0,37	1,55	1,87	1,40	1,50
	12	1,20	0,49	-0,48	0,61	-0,67	1,81	1,35	-0,37	1,27	1,87	1,52	8,09
2025	1	0,92	2,89	0,11	7,89	0,72	1,66	1,84	0,37	1,97	1,87	1,71	8,66
	2	0,49	1,87	0,48	-11,15	-0,51	1,66	2,47	-0,28	2,54	1,86	1,74	11,69
	3	1,77	2,50	2,05	-4,32	-0,34	1,88	2,17	-0,15	2,58	1,86	1,20	13,18
	4	2,74	2,60	1,41	1,48	-0,24	1,81	1,69	-0,48	1,98	1,86	1,12	16,44
	5	2,33	1,82	0,89	1,30	0,36	1,76	1,54	-0,38	2,02	1,86	1,31	14,28
	6	2,44	2,21	0,75	0,99	0,45	1,90	1,32	-0,37	2,28	1,86	1,21	15,02
	7	2,88	4,27	0,25	1,11	0,43	1,32	0,87	-0,41	1,47	0,80	1,26	14,55
	8	3,04	5,13	0,10	1,19	0,43	1,09	0,32	-0,47	1,41	0,84	1,30	14,10
	9	3,44	6,11	-0,07	1,10	0,22	1,11	0,46	-0,41	1,32	0,87	1,28	15,67
	10	3,49	5,72	-0,19	0,97	0,04	1,05	0,89	-0,43	1,12	0,87	1,28	17,50
	11	2,91	4,18	-0,17	0,95	0,11	0,96	0,36	-0,44	1,54	0,82	1,18	16,78
	12	2,91	3,50	-0,24	1,11	0,17	0,75	0,82	-0,43	1,46	0,82	1,28	18,23
2026	1	3,33	0,05	0,08	10,42	0,19	0,77	0,24	-0,37	1,00	0,98	1,08	22,86
	2	4,36	1,97	0,13	14,53	-0,02	0,70	-0,48	-0,28	0,74	0,98	1,09	22,93
	3	3,09	1,60	-0,2	6,35	0,14	0,57	0,32	-0,18	0,71	0,98	1,17	19,24

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Palembang (yoy%)</b>													
2024	1	2,54	6,21	1,07	1,95	0,12	0,92	0,57	0,27	0,31	2,13	1,10	3,04
	2	2,63	7,16	0,65	2,11	0,10	1,07	0,53	0,27	0,27	1,57	0,70	2,13
	3	2,90	8,54	-0,06	2,16	-0,20	0,98	0,32	0,23	0,23	1,53	0,87	2,02
	4	2,97	8,76	-0,16	2,16	-0,39	0,98	0,31	0,13	0,27	1,53	0,63	2,72
	5	3,03	8,10	-0,19	2,15	-1,34	1,06	1,62	0,14	0,27	1,53	0,71	3,68
	6	2,64	6,09	-0,07	2,16	-1,35	0,91	1,99	0,14	0,28	1,53	0,64	4,47
	7	2,09	3,07	-0,16	2,09	-0,97	1,28	2,28	0,19	0,73	3,21	0,64	5,18
	8	1,85	2,39	-0,14	2,10	-0,82	0,94	2,31	0,19	0,53	1,95	0,61	5,45
	9	1,41	0,73	-0,16	2,04	-0,58	0,93	2,10	0,01	0,60	1,95	0,74	5,56
	10	1,01	0,51	-0,16	0,02	-0,76	0,94	1,37	0,01	0,77	1,95	0,72	6,86
	11	0,95	-0,19	0,01	0,01	-0,94	1,26	1,98	0,01	0,34	2,00	0,78	7,35
	12	1,24	1,30	0,02	0,01	1,05	1,43	1,63	0,06	0,74	2,00	0,79	6,72
2025	1	0,78	3,59	0,00	-7,71	-0,99	1,26	2,42	-0,06	0,89	2,00	0,88	7,46
	2	0,27	1,92	0,07	-10,41	-0,77	1,25	3,16	-0,09	1,24	1,99	0,91	10,53
	3	1,32	1,45	1,13	-3,98	-0,63	1,68	2,77	-0,09	1,30	1,99	0,70	12,44
	4	2,28	1,44	0,97	0,76	-0,46	1,65	2,37	-0,42	1,36	1,99	0,92	15,88
	5	1,98	0,81	0,96	0,67	0,28	1,54	2,07	-0,45	1,40	1,40	1,99	1,45
	6	2,14	1,39	0,73	0,62	0,39	1,90	1,77	-0,45	1,39	1,99	1,29	14,48
	7	2,63	4,02	0,49	0,74	0,41	1,54	1,09	-0,50	0,88	0,79	1,36	14,19
	8	2,83	5,07	0,53	0,84	0,43	1,18	0,59	0,58	0,94	0,82	1,45	14,09
	9	3,28	6,42	0,53	0,79	0,10	1,31	0,69	-0,53	0,88	0,82	1,32	15,71
	10	3,36	6,09	0,35	0,79	-0,17	1,22	1,14	-0,53	0,59	0,82	1,32	17,14
	11	2,95	5,16	0,17	0,80	-0,06	1,09	0,45	-0,53	1,13	0,77	1,27	16,18
	12	2,92	4,25	0,06	0,85	0,10	0,82	0,98	-0,51	0,95	0,77	1,42	17,40
2026	1	3,45	0,43	0,19	9,33	0,07	0,80	0,35	-0,51	0,91	0,96	1,33	21,96
	2	4,37	2,59	0,10	12,65	-0,15	0,70	-0,39	-0,38	0,60	0,96	1,30	21,65
	3	3,1	2,34	0,79	5,04	0,06	0,53	0,43	-0,26	0,54	0,96	1,32	17,57

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Lubuklinggau (yoy%)</b>													
2024	1	2,01	4,29	0,31	0,45	0,75	0,96	1,06	0,01	1,58	1,77	0,52	3,66
	2	2,15	5,08	0,31	0,37	0,57	1,00	0,70	0,06	0,82	1,77	0,48	3,52
	3	2,36	5,59	0,46	0,47	0,56	1,00	0,59	-0,04	1,05	1,77	1,21	3,39
	4	2,45	5,36	0,85	0,39	0,53	0,96	0,80	-0,06	1,22	1,77	1,52	4,79
	5	2,51	4,98	0,93	0,60	0,78	0,98	1,37	-0,11	1,22	1,77	1,66	5,26
	6	2,16	3,71	0,93	0,78	0,82	1,03	1,61	-0,68	0,49	1,77	1,75	5,15
	7	1,45	1,42	1,01	0,75	0,58	0,87	1,10	-0,57	0,29	2,14	1,73	6,03
	8	1,31	0,80	1,02	0,77	0,68	1,00	0,94	-0,68	0,29	1,20	1,68	7,47
	9	1,11	-0,07	1,07	0,82	0,68	1,04	0,86	-0,81	-0,04	1,78	1,79	7,95
	10	0,89	-0,56	1,07	0,84	0,60	0,78	0,25	-0,71	-0,29	1,78	1,79	8,34
	11	0,68	-1,36	1,06	0,84	0,33	0,74	0,11	-0,37	-0,30	1,78	2,05	8,96
	12	1,02	-0,08	1,06	0,82	0,22	0,45	0,22	-0,38	0,25	1,78	1,82	8,23
2025	1	0,50	2,17	1,06	-7,92	0,58	1,18	0,35	-0,46	0,40	1,78	1,82	8,25
	2	0,16	1,92	1,06	-11,69	1,45	1,07	1,08	-0,51	0,42	1,78	1,78	10,21
	3	1,28	2,43	1,17	-4,96	1,36	1,15	0,44	-0,47	0,20	1,78	1,18	11,67
	4	2,22	2,11	0,50	1,92	1,28	1,15	-0,32	-0,93	0,04	1,78	1,09	14,07
	5	1,85	0,74	0,48	1,77	1,66	1,55	-0,15	-0,99	0,12	1,78	1,45	13,92
	6	2,07	1,29	0,48	1,55	1,63	1,83	-0,01	-0,55	0,89	1,78	1,36	14,50
	7	2,61	2,95	0,89	1,62	1,89	1,94	0,24	-0,64	2,26	1,23	1,36	13,67
	8	2,92	4,55	0,87	1,55	1,77	1,86	-0,28	-0,59	2,48	1,34	1,50	12,04
	9	3,26	5,40	0,82	1,47	1,82	1,92	0,05	-0,54	2,42	1,51	1,41	12,69
	10	3,34	4,65	0,88	1,44	2,01	1,79	0,50	-0,47	2,46	1,51	1,58	14,11
	11	3,09	3,80	1,03	1,36	2,02	1,90	0,63	-0,53	2,49	1,51	1,33	15,34
	12	2,87	3,05	1,06	1,41	1,84	1,88	0,50	-0,51	2,51	1,51	1,41	15,84
2026	1	3,57	0,56	1,06	10,99	1,46	1,45	0,34	-0,43	2,36	1,51	1,57	18,35
	2	4,13	0,49	1,09	15,71	0,75	1,43	-0,08	-0,30	2,34	1,51	1,77	19,40
	3	2,95	0,26	1,96	7,5	1,01	1,45	0,51	-0,20	2,34	1,51	1,87	16,16

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Ogan Komering Ilir (yoy%)</b>													
2024	1	4,92	9,80	-3,48	1,44	1,16	2,48	0,39	-0,37	6,52	5,77	2,59	5,28
	2	4,60	9,73	-4,18	-0,31	0,89	3,35	0,56	-0,18	2,32	4,57	2,30	5,40
	3	4,56	9,31	-5,89	0,74	0,65	3,75	0,58	-1,22	1,86	4,57	3,89	6,51
	4	3,54	7,49	10,04	0,79	0,15	2,02	0,51	-1,46	1,45	4,57	4,90	6,54
	5	2,81	5,83	11,46	2,47	-0,46	1,99	-0,22	-1,90	-0,51	2,23	5,49	7,50
	6	2,27	3,16	-9,44	5,33	-0,24	2,02	-0,17	-1,57	2,49	2,23	5,06	9,33
	7	1,78	1,67	-9,17	5,60	-0,06	4,97	-0,23	-1,55	5,64	1,61	4,18	10,42
	8	1,95	1,55	-8,43	5,44	-0,03	4,97	0,72	-1,55	5,73	1,61	4,18	11,65
	9	1,72	1,01	-8,22	5,30	-0,03	4,97	0,50	-1,66	5,80	1,77	4,18	11,82
	10	1,44	0,07	-8,11	6,30	-0,03	4,97	0,09	-1,55	6,00	1,77	4,18	12,73
	11	0,31	-2,68	-5,82	5,91	0,08	3,68	0,27	-1,58	5,25	1,77	4,52	11,46
	12	1,48	-0,65	-1,92	5,81	0,25	3,68	0,22	-1,26	5,68	1,77	4,59	11,83
2025	1	1,57	1,40	1,41	-7,45	-0,19	3,34	0,59	-1,26	6,26	1,77	5,44	12,45
	2	1,25	1,21	1,57	12,23	0,19	3,34	0,84	1,26	7,30	1,77	5,40	14,41
	3	2,91	2,77	6,68	-2,01	0,22	2,89	0,63	-0,28	7,48	1,77	3,16	13,91
	4	3,85	2,90	3,78	8,67	0,23	2,89	0,49	-0,43	6,47	1,77	1,91	18,19
	5	3,23	2,49	0,79	6,89	0,26	2,94	0,52	0,18	6,47	1,77	1,34	16,45
	6	3,13	2,63	0,88	3,93	0,23	3,04	0,38	-0,05	8,24	1,77	1,61	17,07
	7	3,60	4,47	-0,94	4,26	-0,02	0,29	0,58	-0,05	4,56	1,23	1,56	15,56
	8	3,67	4,99	-1,67	4,32	-0,02	0,16	-0,44	-0,05	3,82	1,23	1,56	15,63
	9	3,86	5,17	-2,60	4,22	0,06	-0,09	-0,21	0,06	3,57	1,42	1,88	17,39
	10	3,85	5,21	-2,72	2,66	0,16	-0,09	0,17	-0,05	3,38	1,42	1,88	10,46
	11	2,93	3,02	-1,93	2,52	0,16	-0,09	0,07	-0,05	3,88	1,42	1,49	17,5
	12	2,90	2,63	-2,02	2,87	0,00	-0,09	0,31	-0,08	3,64	1,42	1,58	19,38
2026	1	3,02	-0,25	-0,63	16,66	0,09	-0,09	-0,12	-0,21	3,64	1,42	23,81	23,81
	2	4,09	0,99	-0,44	23,56	0,10	-0,09	-0,76	-0,21	3,22	1,42	25,13	25,13
	3	2,74	0,81	-4,95	10,97	0,20	-0,09	-0,23	-0,16	3,22	1,42	21,97	21,97

Tahun /bulan	Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	
<b>Muara Enim (yoy%)</b>													
2024	1	6,31	11,35	7,75	0,36	-2,31	0,72	4,34	-1,85	8,98	0,00	8,14	4,18
	2	4,63	8,53	4,73	0,49	-2,29	0,57	4,15	-2,64	7,49	0,00	5,16	2,90
	3	3,76	6,12	4,73	0,99	-2,24	1,01	4,15	-2,64	7,54	0,00	3,94	4,56
	4	3,70	4,71	4,73	1,21	-2,20	1,71	4,80	-2,57	11,24	0,00	4,05	8,75
	5	3,18	3,33	4,72	1,27	-3,67	1,71	4,21	-2,54	11,24	0,00	4,66	10,19
	6	2,17	0,82	4,77	1,31	-3,87	2,85	4,01	-2,57	11,60	0,00	4,92	10,29
	7	1,04	-0,79	2,98	0,21	-2,18	3,29	3,45	-1,22	2,41	0,59	3,00	8,89
	8	1,52	0,02	3,45	0,18	-2,49	2,92	1,96	-1,13	6,15	0,59	2,82	12,12
	9	1,08	-0,87	1,25	0,76	-2,51	3,60	1,75	-1,21	11,45	0,59	2,02	11,64
	10	1,13	-0,48	1,25	0,47	-0,64	3,60	1,10	-1,13	5,42	0,59	1,09	12,67
	11	0,08	-2,64	-1,42	0,79	-0,46	3,64	1,11	-1,15	4,56	0,59	1,09	12,56
	12	0,74	-0,54	-1,42	0,32	-0,30	2,93	1,17	-1,10	-0,28	0,59	1,09	11,08
2025	1	1,00	2,68	-1,42	-10,01	-0,65	2,56	-0,10	-1,06	3,50	0,59	0,99	10,93
	2	0,91	1,02	0,05	-1,53	-0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09	0,02	0,10	1,12
	3	3,03	5,80	0,88	-9,37	-0,50	2,38	0,63	-0,26	4,88	0,59	1,15	16,82
	4	4,04	6,38	0,88	-0,27	-0,54	1,87	-0,76	-0,71	1,39	0,59	1,05	18,39
	5	3,32	4,84	0,88	0,39	0,13	1,76	-0,24	-0,31	1,39	0,59	0,47	15,47
	6	3,31	4,79	0,83	0,56	0,33	0,58	-0,23	-0,26	1,06	0,59	0,22	15,70
	7	3,45	5,26	0,41	0,52	0,25	0,75	-0,13	-0,27	0,51	0,42	0,22	15,65
	8	3,42	5,76	0,01	0,52	0,21	1,15	-0,50	-0,28	0,51	0,42	0,16	13,28
	9	3,81	6,46	0,00	0,09	0,20	0,86	-0,15	-0,28	0,51	0,42	0,16	14,77
	10	3,81	5,47	0,00	0,41	-0,11	0,86	0,03	-0,32	0,59	0,42	0,16	19,13
	11	2,62	2,55	0,00	0,24	-0,21	0,84	0,05	-0,34	0,59	0,42	0,16	18,91
	12	2,88	2,25	0,00	1,19	-0,16	0,84	0,40	-0,33	1,00	0,42	0,16	22,06
2026	1	2,96	-0,99	0,00	12,98	0,22	1,34	-0,21	0,20	-1,98	0,42	0,16	28,14
	2	4,69	1,62	0,55	21,16	0,08	1,31	-1,01	0,20	-1,98	0,42	0,19	28,44
	3	3,49	0,50	0,52	12,35	-0,04	1,11	-0,02	0,20	-1,98	0,42	0,31	25,89

## C. Daftar KUPVA Bukan Bank Berizin di Sumatera Selatan

Nama KUPVA BB	Alamat	Status Kantor	No. Telp/ Hp
PT Try Dharma Perdana	Jl. Kol. Atmo No.446 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081377918991 / 0711-351786
PT Sinar Valuta Asing Palembang	Jl. Sayangan No.164 RT 003/001 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081367727628
PT Berkat Sukses Bersama	Jl. R. Sukamto, PTC Mall GF-A2.27-28, 8 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Pusat	0811786128
PT Makmur Alam Jaya	Jl. Beringin Janggut II No.6/351, 17 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081373088288/ 0711-317601
PT Sentral Megah Sentosa	Jl. R. Soekamto No.8A, PTC Mall Blok GF A1 No 18 Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang	Kantor Pusat	0853-6682-3351
PT Sentosa Valasindo Abadi	Jl. Petanang No. 1231, RT 17 RW 15, Palembang	Kantor Pusat	082280575006
PT Sumber Daya Usaha	Internasional Plaza Jl. Jenderal Sudirman No.147 Blok B-3, Palembang	Kantor Pusat	08117892478/ 0711-365691
PT H. La Tunrung A.M.C	Jl. R. Sukamto, No.79 RT 10/005 Kel.8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Cabang	082175059245/0711-5630188
PT Bhaktisakti Ganda Intiharmoni	Palembang Trade Center Mall (PTC) Lantai GF Blok A2, No.42-43 Jl. R Sukamto Palembang, Sumatera Selatan	Kantor Cabang	08558341789/ 0711-382418



# Daftar Istilah

<b>Mtm</b>	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
<b>Qtq</b>	Quarter to quarter perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan Sebelumnya
<b>Yoy</b>	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya
<b>Share Of Growth</b>	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB
<b>Investasi</b>	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal
<b>Sektor ekonomi dominan</b>	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan
<b>Migas</b>	Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas
<b>Omzet</b>	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi
<b>Share effect</b>	Kontribusi pangsa sektor atau sub sektor terhadap total PDRB
<b>Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)</b>	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100
<b>Indeks Harga Konsumen (IHK)</b>	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu
<b>Indeks Kondisi Ekonomi</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
<b>Indeks Ekspektasi Konsumen</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
<b>Survei Konsumen</b>	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau indikator dini (prompt indicator) mengenai tendensi/arah konsumsi rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi stabilitas keuangan rumah tangga dan ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi kedepan untuk mendukung penyusunan kebijakan moneter Bank Indonesia.
<b>Weighted Net Balance</b>	Istilah lain dari Survei Bersih Tertimbang yang merupakan nilai share masing-masing sektor/subsektor terhadap total sektor PDB (atas dasar harga konstan tahun 2000) dengan total bobot sama dengan 1.
<b>Survei Kinerja Dunia Usaha</b>	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, yaitu triwulan yang sedang berjalan dan perkiraan pada triwulan yang akan datang guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta sebagai bahan informasi dalam penyusunan kajian ekonomi dan keuangan baik nasional maupun regional

<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
<b>Dana Perimbangan</b>	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli
<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
<b>Andil inflasi</b>	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/keompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan
<b>Bobot inflasi</b>	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut
<b>Ekspor</b>	Adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
<b>Impor</b>	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
<b>PDRB atas dasar harga berlaku</b>	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian
<b>PDRB atas dasar harga konstan</b>	Merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya
<b>Bank Pemerintah</b>	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI
<b>Dana Pihak Ketiga (DPK)</b>	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito
<b>Loan to Deposits Ratio (LDR)</b>	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
<b>Cash inflows</b>	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
<b>Cash Outflows</b>	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu

<b>Net Cashflows</b>	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash inflows</i> bila terjadi sebaliknya
<b>Aktiva Produktif</b>	Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.
<b>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan
<b>Kualitas Kredit</b>	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
<b>Capital Adequacy Ratio (CAR)</b>	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
<b>Financing to Deposit Ratio (FDR)</b>	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
<b>Inflasi</b>	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus ( <i>persistent</i> )
<b>Kliring</b>	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
<b>Kliring Debet</b>	Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional
<b>Non Performing Loans/ Financing (NPLs/Ls)</b>	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
<b>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)</b>	Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15 % dari jumlah Kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan)
<b>Rasio Non Performing Loans/ Financing (NPLs/Fs)</b>	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, <i>gross</i> . Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs.

<b>Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET</b>	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit
<b>Sistem Bank Indonesia Real time Gross Settlement (BI RTGS)</b>	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
<b>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)</b>	Sistem kliring bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
<b>Industri</b>	Suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (assembling) dari bagian suatu industri.
<b>Pekerja</b>	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha tersebut.
<b>Pekerja Dibayar</b>	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha dengan mendapatkan upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.
<b>Pekerja Tidak Dibayar</b>	Pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan tetapi tidak mendapatkan upah/gaji, tidak termasuk mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja yang biasa di perusahaan.
<b>Input</b>	Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa bahan baku, bahan bakar, barang lainnya di luar bahan baku/penolong, jasa industri, sewa gedung dan biaya jasa non industri lainnya.
<b>Output</b>	Nilai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima, keuntungan jual beli, penambahan stok barang setengah jadi dan penerimaan-penerimaan lainnya.
<b>Nilai Tambah/Value Added</b>	Selisih nilai <i>output</i> dengan nilai <i>input</i> atau biasa disebut dengan nilai tambah menurut harga pasar.
<b>Produktivitas</b>	Rasio antara nilai <i>output</i> dengan jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar.
<b>Tingkat Efisiensi</b>	Ratio antara nilai tambah atas dasar harga pasar terhadap <i>output</i> produksi.
<b>Intensitas Tenaga Kerja</b>	Suatu rasio antara biaya upah/gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja terhadap nilai tambah.
<b>Gross Margin</b>	% <i>tase value added</i> dikurangi biaya tenaga kerja dibagi <i>output</i> .
<b>Usaha</b>	Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko.
<b>Perusahaan</b>	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/ dikelola secara komersil yaitu yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada satu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

## Tim Penyusun

Penanggung Jawab

**Bambang Pramono**

Koordinator Penyusun

**Adhie Wicaksono**

**M. Ardian Dwinanto**

Tim Penulis

**Komang Greggy Sridana**

**Aldi Pratama Sembiring**

**Ihsan Bagus Atyantodito**

**Dwita Adilah**

**Karina Nisa Aprilia**

**Theodora Stefany**

**Anggitha Ariijhayutyas Pinilih**

**Karina Qurrota Annida**

**M. Emyr Gunawan Rahmatullah**

**Nasrullah**

**Xenaneira Shodrokova**

Kontributor

**Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi**

**Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan**

**Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah**

**Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran**

**Unit Kehumasan**

**Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah**

Produksi dan Distribusi

**Dewi Sinta P. S.**



Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang

Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013

<https://www.bi.go.id>

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang  
Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013  
<https://www.bi.go.id>

